



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024**



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh,*

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan inayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan berbagai peraturan pelaksanaannya serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap tingkatan organisasi instansi diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta melaporkan capaian sasaran pembangunan atau pencapaian sasaran-sasaran strategisnya.

Dalam upaya peningkatan pelaksanaan pemerintahan agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta untuk mewujudkan *good governance*, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan No PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun guna memberikan arah dan target secara transparan kepada organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah di dalam Rencana Strategis periode 5 tahunan dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang diwujudkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sebagai indikator target pertahunnya.

Guna pengukuran dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan maka disusun dokumen Laporan Kinerja, dalam hal ini adalah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini disusun sebagai upaya pemantauan dan monitoring berkala terhadap capaian kinerja secara periode triwulan untuk memperoleh data analisa dan evaluasi guna memberikan masukan dan arahan terhadap perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tahun berjalan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ini sebagai bagian dari langkah dan strategi untuk mewujudkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, transparan, efisien dan efektif, dan diharapkan dengan disusunnya laporan ini, dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan organisasi Kementerian Perhubungan dan pada khususnya untuk mencapai target Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.

Kiranya Allah SWT selalu memberikan RidhoNya dalam memberikan bimbingan dan arahan guna terwujudnya konektivitas, aksesibilitas serta peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran transportasi laut.

*Wassalamualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh*

Jakarta, 31 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc.  
NIP. 19730808 1999903 1 003

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>BAB I    Pendahuluan</b> .....	<b>I - 1</b>
A.    Latar Belakang .....	I - 1
B.    Struktur Organisasi Dan Tugas Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut .....	I - 4
C.    Sumber Daya Manusia .....	I - 39
D.    Isu Strategis Dan Permasalahan Yang Dihadapi .....	I - 41
<b>BAB II   PERENCANAAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL</b>	
<b>PERHUBUNGAN LAUT</b> .....	<b>II - 1</b>
A.    Perencanaan Strategis.....	II - 1
B.    Perjanjian Kinerja .....	II - 18
<b>BAB III  CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN</b>	
<b>LAUT</b> .....	<b>III - 1</b>
A.    Capaian Kinerja.....	III - 1
B.    Kontribusi Terhadap Capaian Indikator Kegiatan Program Direktorat Jenderal Perhubungan Laut .....	III - 45
C.    Realisasi Anggaran .....	III - 46
<b>BAB IV  PENUTUP</b> .....	<b>IV - 1</b>
A.    Kesimpulan .....	IV - 1
B.    Langkah Kedepan .....	IV - 6

## DAFTAR TABEL

I.3.1	Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan...	I	-	39
I.3.2	Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan.....	I	-	40
II.1.1	Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020 – 2024.....	II	-	4
II.1.2	Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024.....	II	-	6
II.1.3	Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024.....	II	-	7
II.1.4	Target Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024.....	II	-	9
II.1.5	Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Program Transportasi Laut 2020-2024	II	-	13
II.1.6	Deskripsi Major Project (MP) 22 Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu (Integrated Port Network).....	II	-	15
II.1.7	Indikasi Target dan Pendanaan Prioritas Nasional Bidang Transportasi Laut dalam RPJMN 2020-2024 .....	II	-	16
II.2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.....	II	-	18
II.2.2	Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut....	II	-	19
III.1.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 .....	III	-	4
III.1.2	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional .....	III	-	6
III.1.3	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP 1) Kesatu (1).....	III	-	8
III.1.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kesatu (1).....	III	-	8
III.1.5	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur.....	III	-	9
III.1.6	Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur Tahun 2024 .....	III	-	10
III.1.7	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedua (2).....	III	-	12
III.1.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedua (2).....	III	-	13
III.1.9	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul....	III	-	13
III.1.10	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketiga (3).....	III	-	17

III.1.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketiga (3).....	III - 18
III.1.12	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut.....	III - 20
III.1.13	Jumlah Kejadian Kecelakaan Dan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Tahun 2024.....	III - 22
III.1.14	Jumlah Kejadian Kecelakaan Tahun 2024.....	III - 23
III.1.15	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keempat (4).....	III - 26
III.1.16	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keempat (4).....	III - 27
III.1.17	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut.....	III - 27
III.1.18	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Program Kelima (5).....	III - 30
III.1.19	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kelima (5).....	III - 31
III.1.20	Tingkat Keandalan Kenavigasian.....	III - 31
III.1.21	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keenam (6).....	III - 35
III.1.22	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keenam (6).....	III - 35
III.1.23	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M).....	III - 36
III.1.24	Jumlah Sertifikat Yang Diterbitkan dan Jumlah Kapal > 400 GT Terdaftar.....	III - 37
III.1.25	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketujuh (7).....	III - 39
III.1.26	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketujuh (7).....	III - 40
III.1.27	Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan.....	III - 40

III.1.28	Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Pelayaran (Kapal, Pelabuhan Dan Pekerjaan Bawah Air) Yang Berhasil Di Tanggulangi.....	III - 42
III.1.29	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedelapan (8).....	III - 43
III.1.30	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedelapan (8).....	III - 44
III.2.1	Kontribusi Terhadap Capaian IKP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024.....	III - 45
III.3.1	Perbandingan Pagu DIPA Akhir dengan Realisasi Ditjen Hubla Tahun 2024....	III - 46
III.3.2	Realisasi Belanja Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut .....	III - 51
III.3.3	Realisasi Belanja Per Program .....	III - 52
III.3.4	Pengukuran dan Nilai Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024.....	III - 53



## DAFTAR GRAFIK

III.1.1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional.....	III - 7
III.1.2	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran yang Membentuk (Loop) Secara Teratur .....	III - 10
III.1.3	<i>Persentase On Time Performance</i> pada Pelabuhan Utama	III - 14
III.1.4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut.....	III - 20
III.1.5	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut.....	III - 28
III.1.6	Tingkat Keandalan Kenavigasian.....	III - 32
III.1.7	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M).....	III - 37
III.1.8	Persentase Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Pelayaran (Kapal, Pelabuhan Dan Pekerjaan Bawah Air) Yang Berhasil Di Tanggulangi.....	III - 41

## DAFTAR GAMBAR

I.1.1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.....	I	-	4
I.2.1	Mekanisme Koordinasi Unit Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT).....	I	-	19
I.2.2	Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran Utama .....	I	-	21
I.2.3	Struktur Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan .....	I	-	23
I.2.4	Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I .....	I	-	25
I.2.5	Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II .....	I	-	25
I.2.6	Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III .....	I	-	26
I.2.7	Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV .....	I	-	26
I.2.8	Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam.....	I	-	28
I.2.9	Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I.....	I	-	30
I.2.10	Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II.....	I	-	30
I.2.11	Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III.....	I	-	31
I.2.12	Struktur Organisasi Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I.....	I	-	32
I.2.13	Struktur Organisasi Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II.....	I	-	33
I.2.14	Struktur Organisasi Distrik Navigasi Kelas I.....	I	-	34
I.2.15	Struktur Organisasi Distrik Navigasi Kelas II.....	I	-	35
I.2.16	Struktur Organisasi Distrik Navigasi Kelas III.....	I	-	35
I.2.17	Struktur Organisasi Distrik Navigasi Tipe A Kelas.....	I	-	36
I.2.18	Struktur Organisasi Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran.....	I	-	37
I.2.19	Struktur Organisasi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.....	I	-	38
II.1.1	Peta Strategi Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024.....	II	-	3



# BAB 1

## Pendahuluan

### A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai upaya mewujudkan *good governance*, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 telah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan dimana setiap unit Eselon I sampai dengan Eselon IV di Lingkungan Kementerian Perhubungan wajib untuk menyampaikan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya dimutakhirkan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 disusun sebagai gambaran tolak ukur kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Tahun Anggaran 2024 secara berkala. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan laporan pencapaian kinerja dikaitkan dengan sejauh mana organisasi telah melakukan upaya-upaya strategik dan operasional di dalam mencapai tujuan/sasaran dalam kerangka pemenuhan Sasaran Program yang telah ditetapkan.



Sasaran Strategis serta Sasaran Program organisasi telah dibakukan di dalam suatu dokumen Rencana Strategis yang memiliki rentang waktu 5 (lima) tahun. Kemudian untuk capaian yang harus dipenuhi setiap tahunnya dalam periode 5 (lima) tahun tersebut, di dalam mendukung capaian sasaran strategis ditetapkan sejumlah Indikator Keluaran Program. Pemenuhan atas sasaran strategik ini setiap tahunnya akan berakumulasi pada pencapaian tujuan strategik organisasi di akhir tahun kelima.

Selanjutnya ukuran kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ditelaah dan direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
3. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta berbagai peraturan perundangan lainnya dan berbagai peraturan turunannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah menyusun suatu laporan keuangan dan laporan kinerja yang terintegrasi dengan berbagai sistem manajemen pemerintahan lainnya;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, mengamanatkan Kementerian PAN dan RB untuk mengkoordinasikan pelaksanaannya di berbagai Instansi Pemerintah;



11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dipergunakan sebagai acuan bagi setiap Instansi Pemerintah dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang bersangkutan;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.



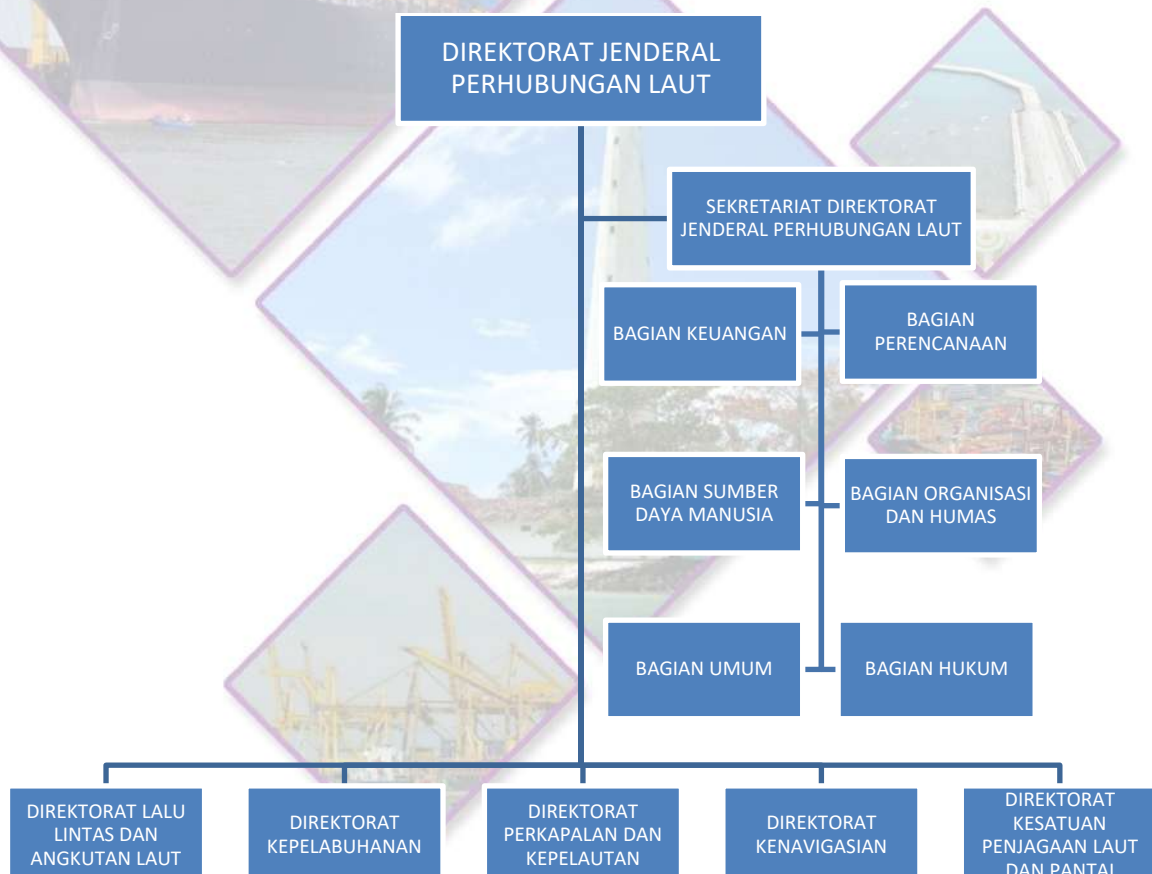
## B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, adapun struktur organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut digambarkan sebagai berikut:

### 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Adapun Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yaitu :

- Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
- Direktorat Kepelabuhanan;
- Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
- Direktorat Kenavigasian;
- Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.



Gambar I.1.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



## **2. Tugas dan Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut**

### **a. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut**

#### **1) Tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut**

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan sebagian tugas pokok Kementerian Perhubungan, dan merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang transportasi laut berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2) Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut**

- a) Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan angkutan laut, kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan angkutan laut; kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan angkutan laut, kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut;
- d) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan angkutan laut, kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan laut, kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut;
- f) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



## **b. Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut**

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi tersebut, yaitu:

### **1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut**

#### **a) Tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut**

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

#### **b) Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut**

- i. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program dan anggaran kegiatan, pentarifan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta anggaran;
- ii. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern dan intern di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;
- iii. Penyiapan manajemen kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pengelolaan jabatan fungsional di bidang transportasi laut, serta evaluasi dan pelaporan;
- iv. Penyiapan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi laut, pelaksanaan dokumentasi hukum, pemberian pertimbangan dan advokasi, perjanjian nasional, penyuluhan peraturan perundang-undangan, bahan pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian Internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;
- v. Penyiapan koordinasi dan penyusunan pembinaan administrasi perkantoran dan kearsipan, kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan, perencanaan dan penentuan kebutuhan, inventarisasi dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan; dan
- vi. Penyiapan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan data informasi publik, tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.





**c) Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut**

Adapun susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari:

- i. Bagian Perencanaan;
- ii. Bagian Keuangan;
- iii. Bagian Sumber Daya Manusia;
- iv. Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri;
- v. Bagian Umum dan Perlengkapan;
- vi. Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat.

Adapun penjabaran dari masing-masing tugas dan fungsi masing-masing Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sebagai berikut:

**i. Bagian Perencanaan**

**i). Tugas Bagian Perencanaan**

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program dan anggaran kegiatan, pentarifan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

**ii). Fungsi Bagian Perencanaan**

- Penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan tinjau ulang kebijakan, penyusunan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana bergulir, penetapan kinerja, dan pinjaman/hibah serta kerja sama;
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran tahunan, rancangan rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, konsep dokumen pelaksanaan anggaran; dan
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran, pelaporan dan evaluasi kinerja, analisa dan evaluasi pelaksanaan tarif, serta koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.



## **ii. Bagian Keuangan**

### **i) Tugas Bagian Keuangan**

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern dan intern di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

### **ii) Fungsi Bagian Keuangan**

- Penyiapan bahan koordinasi administrasi pelaksanaan anggaran, penyusunan dan pemantauan atas pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan dan revisi anggaran dan koordinasi pelaksanaan reuvi revisi anggaran oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, serta monitoring estimasi/prognosa dan penyerapan anggaran, pelaksanaan anggaran kegiatan dan monitoring evaluasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- Penyiapan bahan koordinasi perbendaharaan termasuk penyusunan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara tingkat satker kantor pusat dan wilayah DKI, verifikasi pembukuan dan penatausahaan/pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak termasuk piutang dan target, koordinasi pelaksanaan audit, penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil audit aparat fungsional intern, monitoring penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi, serta monitoring pengelola anggaran/barang; dan
- Penyiapan bahan koordinasi laporan keuangan tingkat eselon I, penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi tingkat eselon I: Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara, koordinasi pelaksanaan reuvi laporan keuangan, koordinasi pelaksanaan pemeriksaan, penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern, serta penyiapan bahan pelaksanaan tindak lanjut hasil reuvi laporan keuangan.



### **iii. Bagian Sumber Daya Manusia**

#### **i). Tugas Bagian Sumber Daya Manusia**

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program pengembangan, mutasi, disiplin, pemberhentian dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

#### **ii). Fungsi Bagian Sumber Daya Manusia**

- Penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan dan pengangkatan pegawai untuk pertama kali, pengembangan karier, pelaksanaan sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil serta pengelolaan sistem informasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan usulan pemindahan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional, assessment, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pelaksana, kepangkatan pegawai, pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, serta pengelolaan jabatan fungsional di bidang transportasi laut; dan
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan disiplin, pemberhentian, kesejahteraan, penilaian kinerja pegawai dan pengendalian gratifikasi.

### **iv. Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri**

#### **i). Tugas Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri**

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi laut, pelaksanaan dokumentasi hukum, pemberian pertimbangan dan advokasi, perjanjian nasional, penyuluhan peraturan perundang-undangan, bahari pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian Internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.



## **ii). Fungsi Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri**

- Penyiapan bahan pembentukan peraturan perundangundangan di bidang transportasi laut, serta dokumentasi hukum;
- Penyiapan bahan penyusunan pemberian pertimbangan dan pelaksanaan advokasi, perjanjian nasional, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan; dan
- Penyiapan bahan penyusunan pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

## **v. Bagian Umum dan Perlengkapan**

### **i). Tugas Bagian Umum dan Perlengkapan**

Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan pembinaan administrasi perkantoran dan kearsipan, kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan, perencanaan dan penentuan kebutuhan, inventarisasi dan penatausahaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

### **ii). Fungsi Bagian Umum dan Perlengkapan**

- Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan administrasi perkantoran, kearsipan, pengendalian dan pengawasan kearsipan, pengelolaan arus surat masuk dan surat keluar, memberikan pelayanan dan pengaturan suratmenyurat, penyusunan perencanaan dan penentuan kebutuhan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa tingkat satker kantor pusat, pengurusan dan pengaturan barang persediaan;
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan penyediaan kebutuhan rumah tangga dan keperluan rapat serta pertemuan dinas, pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor serta inventaris kantor, pelayanan angkutan pegawai, perawatan kendaraan dinas, pembinaan dan pelaksanaan keprotokolan, pelayanan kesehatan pegawai; dan



- Penyiapan bahan koordinasi, penyiapan bahan inventarisasi/penatausahaan Barang Milik Negara, serah terima dan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara, pemanfaatan Barang Milik Negara, penghapusan Barang Milik Negara, pemindahtanganan Barang Milik Negara, penataan Rumah Negara.

## **vi. Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat**

### **i). Tugas Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat**

Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan data informasi publik, tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

### **ii). Fungsi Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat**

- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan serta pelaksanaan penataan organisasi tata laksana, reformasi birokrasi, penyusunan peta jabatan dan uraian jenis kegiatan, dan evaluasi jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, kebijakan, hubungan masyarakat, pelaksanaan pengelolaan operasional layanan komunikasi dan pelayanan informasi publik, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi, hubungan masyarakat dan pelayanan informasi publik serta tindak lanjut pengaduan masyarakat; dan
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, kebijakan, pembinaan, monitoring, evaluasi, arsitektur dan standardisasi tata kelola data dan informasi pada pelaksanaan dan/atau pengelolaan operasional layanan, manajemen risiko, pengembangan serta integrasi basis data dan sistem komunikasi dan informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



## **2) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut**

### **a. Tugas Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut**

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan.

### **b. Fungsi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut**

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;
- 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;
- 4) Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;



- 5) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana; dan
- 6) Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.

### **3) Direktorat Kepelabuhanan**

#### **a. Tugas Direktorat Kepelabuhanan**

Direktorat Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.

#### **b. Fungsi Direktorat Kepelabuhanan**

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan



penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;

- 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- 4) Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- 5) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan; dan
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.

#### **4) Direktorat Perkapalan dan Kepelautan**

##### **a. Tugas Direktorat Perkapalan dan Kepelautan**

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaiklautan kapal laut yang tidak





digunakan sebagai angkutan penyeberangan, perlindungan lingkungan maritim dan kepelautan.

**b. Fungsi Direktorat Perkapalan dan Kepelautan**

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pencegahan pencemaran dari kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pencegahan pencemaran dari kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan;
- 3) Penyiapan penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria di bidang rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pencegahan pencemaran dari kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan;
- 4) Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal laut yang tidak



digunakan sebagai angkutan penyeberangan, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pencegahan pencemaran dari kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan;

- 5) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pencegahan pencemaran dari kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan 181 perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan; dan
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.

## **5) Direktorat Kenavigasian**

### **a. Tugas Direktorat Kenavigasian**

Direktorat Kenavigasian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang kenavigasian.

### **b. Fungsi Direktorat Kenavigasian**

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian;



- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian;
- 3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian;
- 4) Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian;
- 5) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian; dan
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.

## **6) Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai**

### **a. Tugas Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai**

Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana.

### **b. Fungsi Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai**

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai,

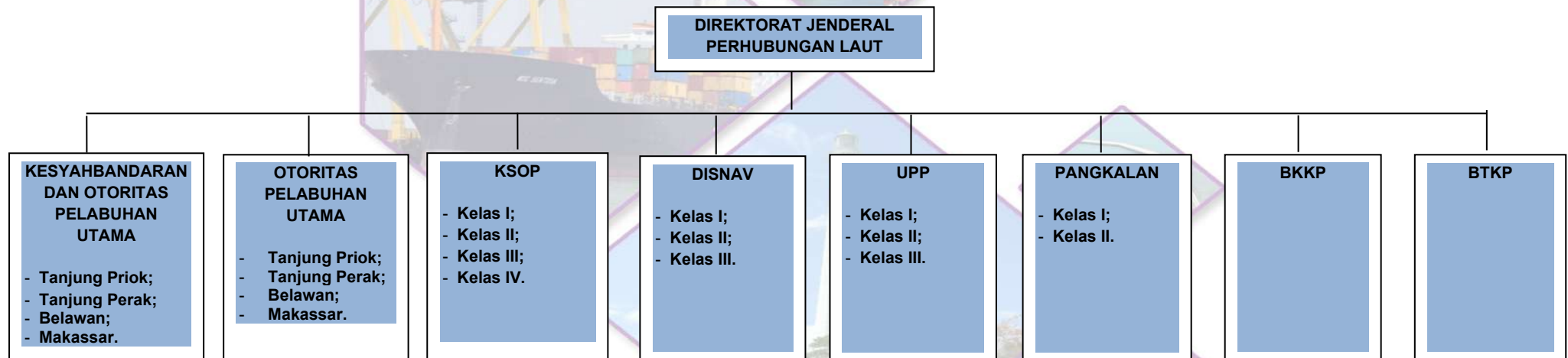


- penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana;
  - 3) Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana;
  - 4) Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana;
  - 5) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana; dan
  - 6) Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.



### 3. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

#### MEKANISME KOORDINASI UNIT ESELON I DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DENGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)



Gambar I.2.1. Mekanisme Koordinasi Unit Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

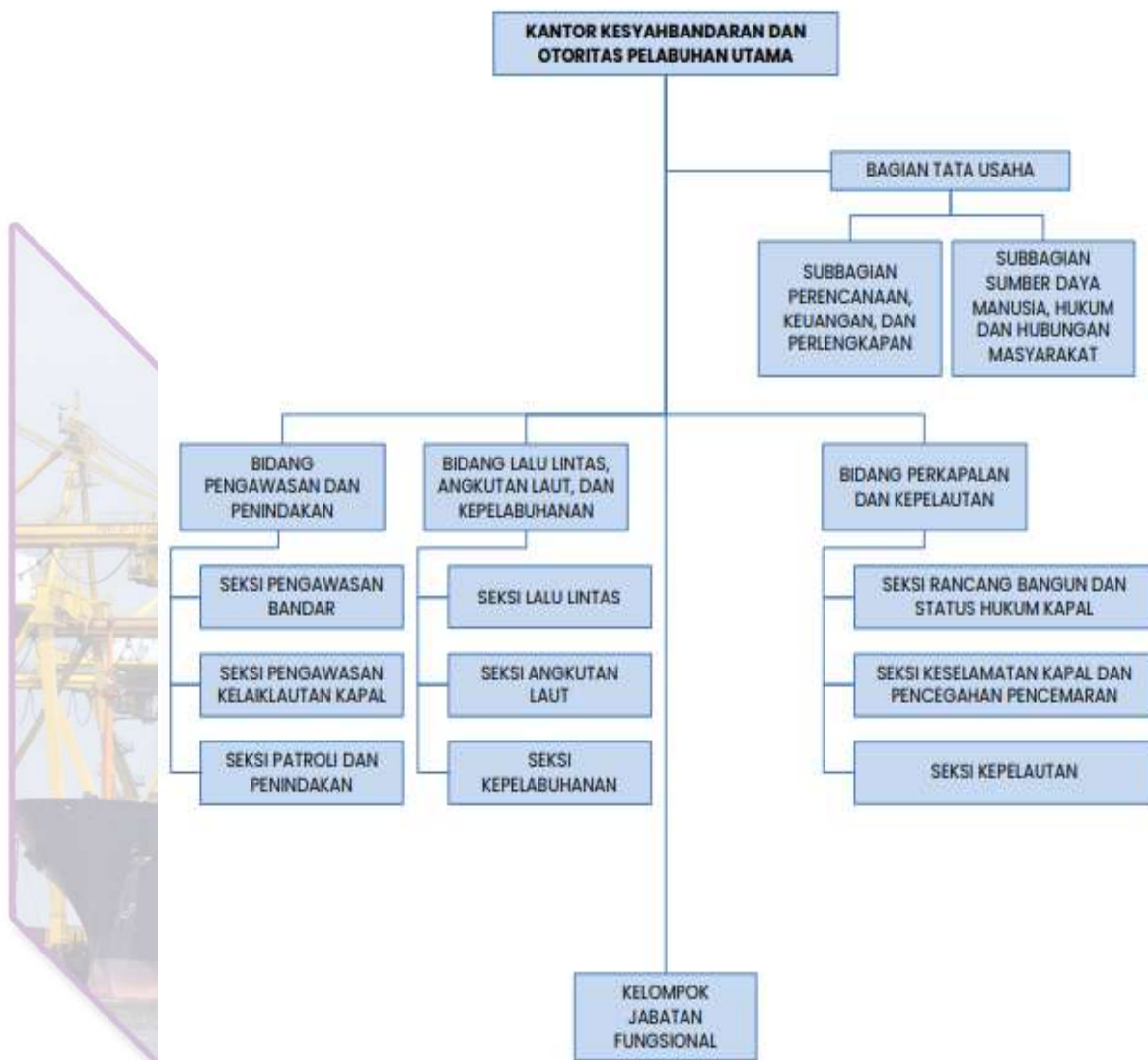


## a. Tugas dan Fungsi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Ditjen Hubla

### 1) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama

Berdasarkan PM 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, yang mempunyai melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, serta sertifikasi kelaiklautan kapal. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan koordinasi seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan, pemeriksaan dan penyimpanan surat, dokumen, dan warta kapal, penerbitan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan, pemeriksaan kapal, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal, dan penahanan kapal atas perintah pengadilan;
- b) pelaksanaan pengaturan, penyediaan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pengawasan penggunaan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal dan penetapan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan;
- c) pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, jaringan jalan, dan sarana bantu navigasi pelayaran;
- d) pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut;
- e) pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi kelaiklautan kapal serta penyijilan awak kapal;
- f) penyusunan perencanaan, pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, sumber daya manusia, hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat; dan
- g) penyusunan evaluasi dan pelaporan.



Gambar I.2.2. Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama



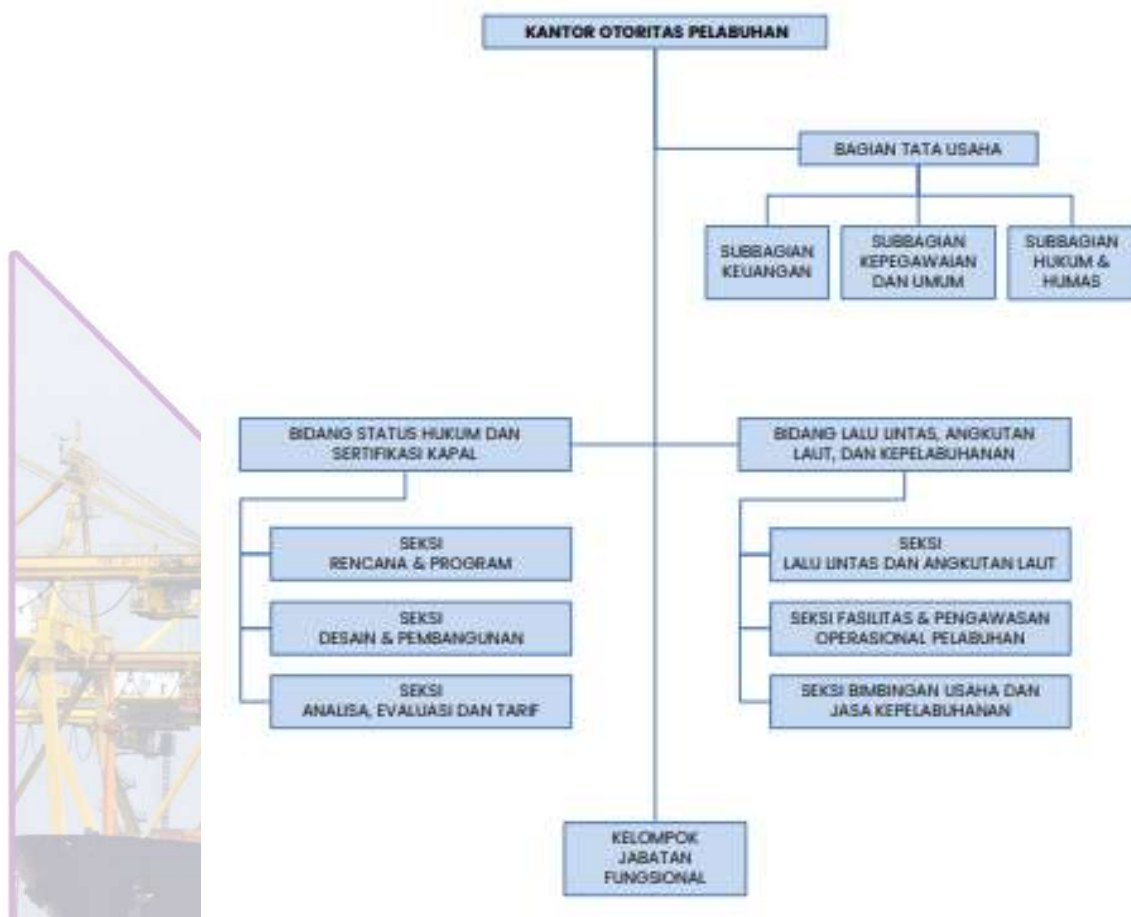


## 2) Otoritas Pelabuhan Utama

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, yang mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial., Kantor Otoritas Pelabuhan Utama menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan;
- b) Pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan;
- c) Pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
- d) pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan;
- e) pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya;
- f) pelaksanaan pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri, atas penggunaan perairan dan/atau daratan, dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal;
- h) Pelaksanaan penjaminan keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di Pelabuhan;
- i) Pelaksanaan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
- j) Pelaksanaan pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengusahaan di Pelabuhan
- k) Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
- l) pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.





Gambar I.2.3. Struktur Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan

### 3) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, melalui penyelenggaraan beberapa fungsi sebagai berikut:

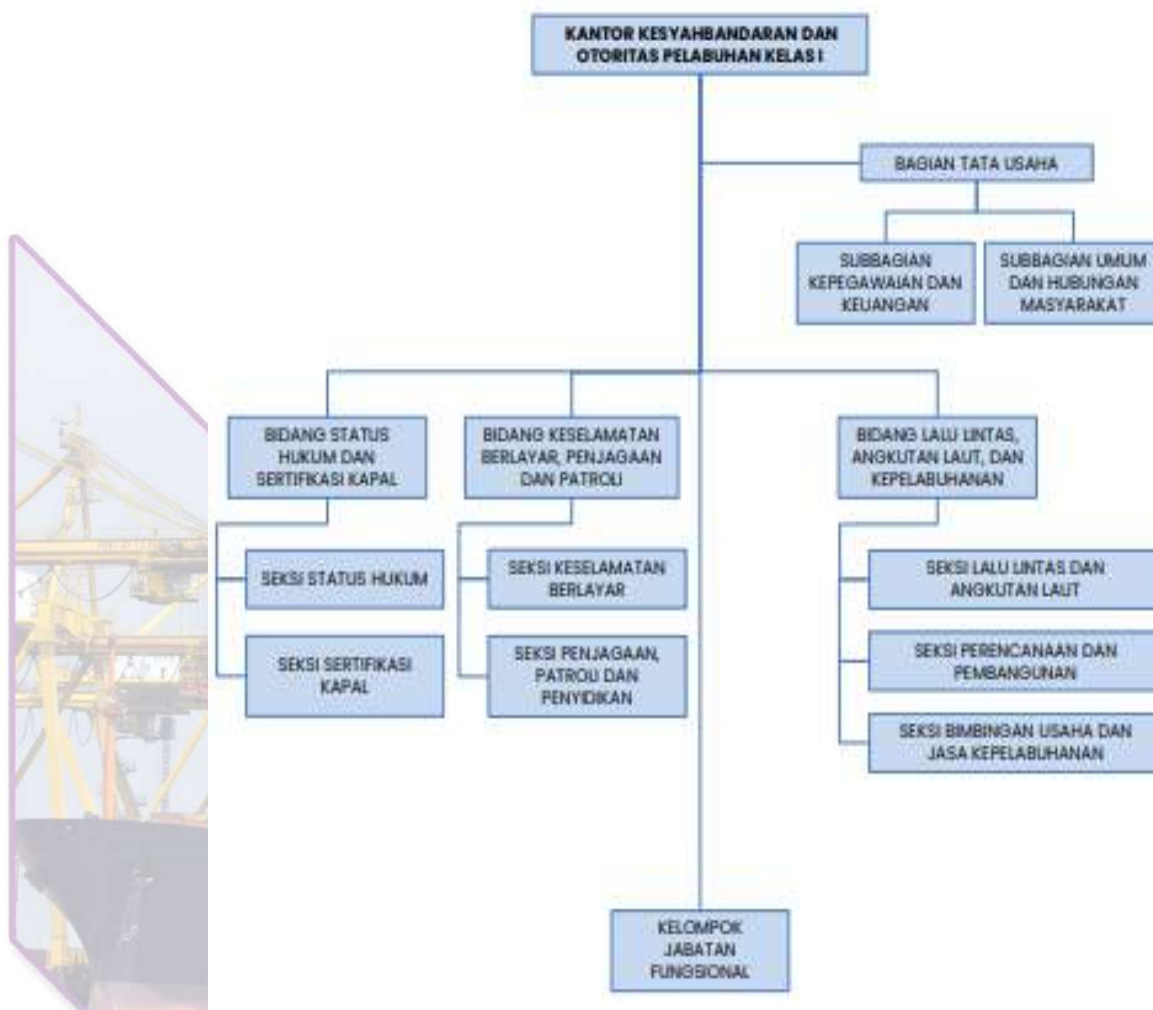
- a) Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dapat dibentuk wilayah kerja sesuai kebutuhan berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja;



- b) Wilayah kerja merupakan organisasi non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan yang membawahinya;
- c) Wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas membantu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan;
- d) Pembentukan atau perubahan wilayah kerja ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut setelah mendapatkan persetujuan Menteri Perhubungan;
- e) Perubahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan Peraturan Menteri Perhubungan ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) kelas, yaitu:

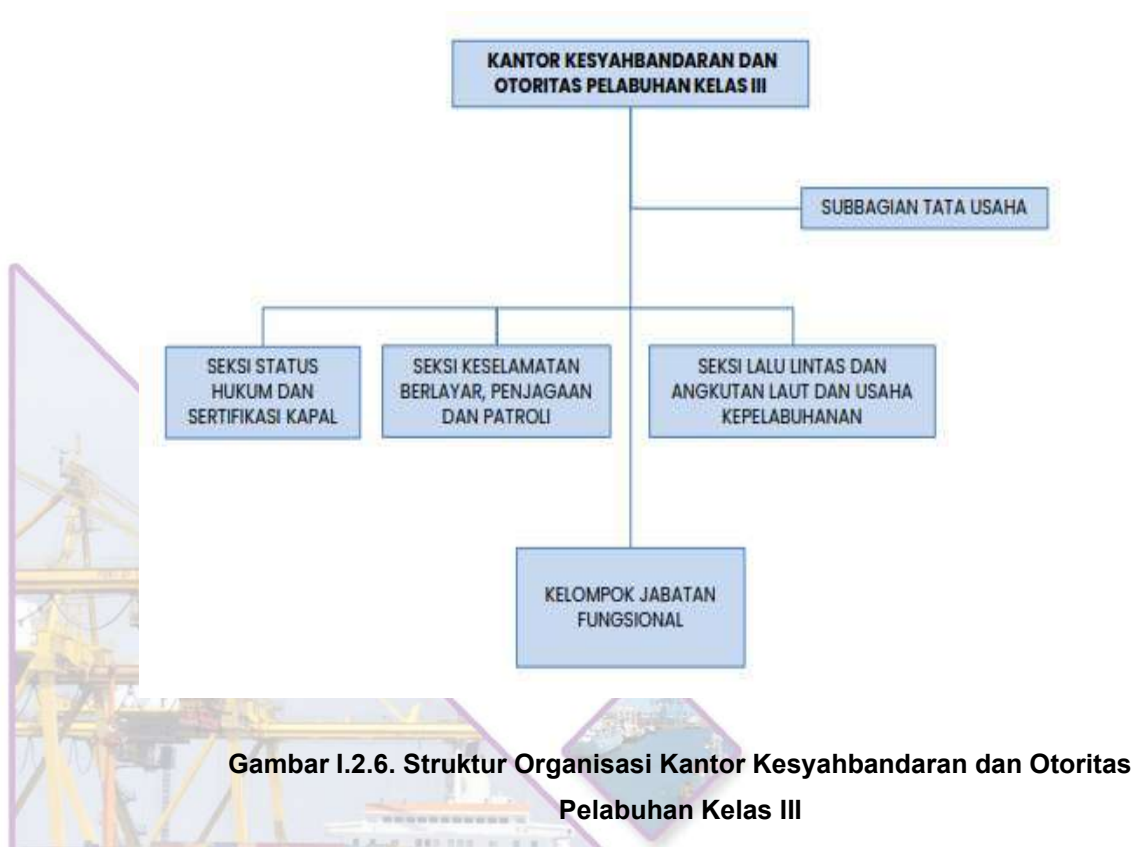
- a) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I
- b) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II
- c) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III
- d) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV



Gambar I.2.4. Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I



Gambar I.2.5. Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II



#### 4) Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas

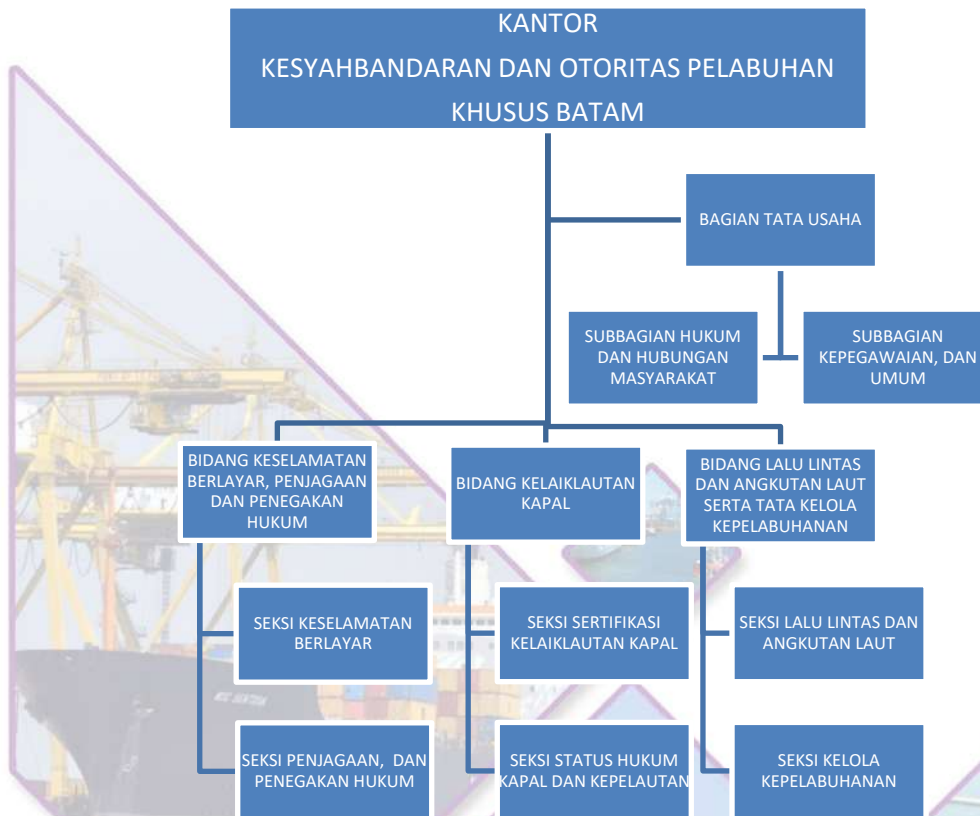


Pelabuhan Khusus Batam, yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan jasa lalu lintas angkutan laut, kepelabuhanan, keamanan dan keselamatan pelayaran untuk memperlancar angkutan laut, melalui penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, pengujian, penilikan, verifikasi dan sertifikasi surat dan dokumen di bidang kelaiklautan kapal;
- b) Pelaksanaan pengawasan tertib berlayar dan persetujuan kegiatan kapal di perairan pelabuhan serta perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan;
- c) Pelaksanaan penegakan hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- d) Pelaksanaan koordinasi kegiatan kepabeanan, keimigrasian, ke karantina, dan kegiatan institusi pemerintahan lainnya dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- e) Pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
- f) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dalam hal keamanan dan ketertiban di pelabuhan melalui pembentukan Komite Keamanan Pelabuhan (*Port Security Committee*) dan Petugas Keamanan Pelabuhan (*Port Security Officer*);
- g) Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan melalui penyusunan sistem dan prosedur pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan;
- h) Pelaksanaan pengawasan penggunaan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
- i) Pelaksanaan penjaminan kelancaran arus barang di pelabuhan melalui penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri;
- j) Penetapan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan;
- k) Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat serta pengawasan kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan;



- l) Pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat; dan
- m) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.



Gambar I.2.8. Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam

## 5) Unit Penyelenggara Pelabuhan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 17 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran, serta sertifikasi kelaiklautan kapal. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;



- b) Penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan sarana bantu navigasi pelayaran;
- c) Penjaminan kelancaran arus barang, penumpang dan hewan;
- d) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan;
- e) Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan;
- f) Penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan;
- g) Penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- h) Pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan;
- i) penyiapan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran;
- j) Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi kelaiklautan kapal; dan
- k) Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat..

Unit Penyelenggara Pelabuhan diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelas, yaitu:

- a) Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I;
- b) Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II; dan
- c) Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III.

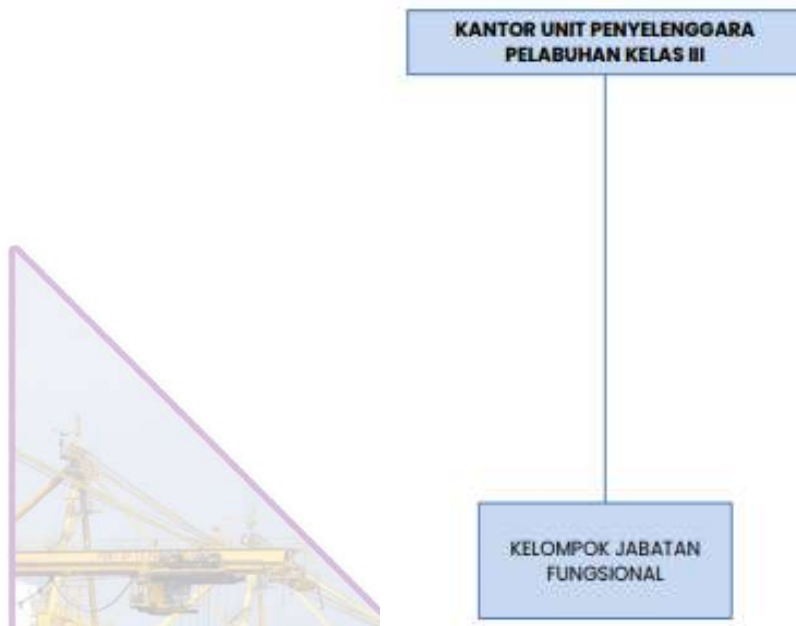


Gambar I.2.9 Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I



Gambar I.2.10 Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II





**Gambar I.2.11 Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III**

#### **6) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 119 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai, yang mempunyai tugas tugas melaksanakan kegiatan penjagaan, penyelamatan, pengamanan dan penertiban serta penegakan peraturan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai, Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai menyelenggarakan fungsi::

- a) Penyusunan rencana, program dan evaluasi;;
- b) Pelaksanaan operasi dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai;
- c) Pelaksaaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran;
- d) Pelaksanaan pengawasan dan penertiban kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, penyelaman, instatasi/eksplorasi dan eksploitasi, bangunan diatas dan dibawah air;
- e) Pemberian bantuan pencarian dan pertolongan musibah di laut dan penanggulangan kebakaran;;
- f) Pelaksanaan pengamanan dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran serta penanggulangan pencemaran di perairan;
- g) Pelaksanaan pelatihan pengawakan kapal dan instalasi;



- h) pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan dukungan logistik; dan
- i) pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtangaan.

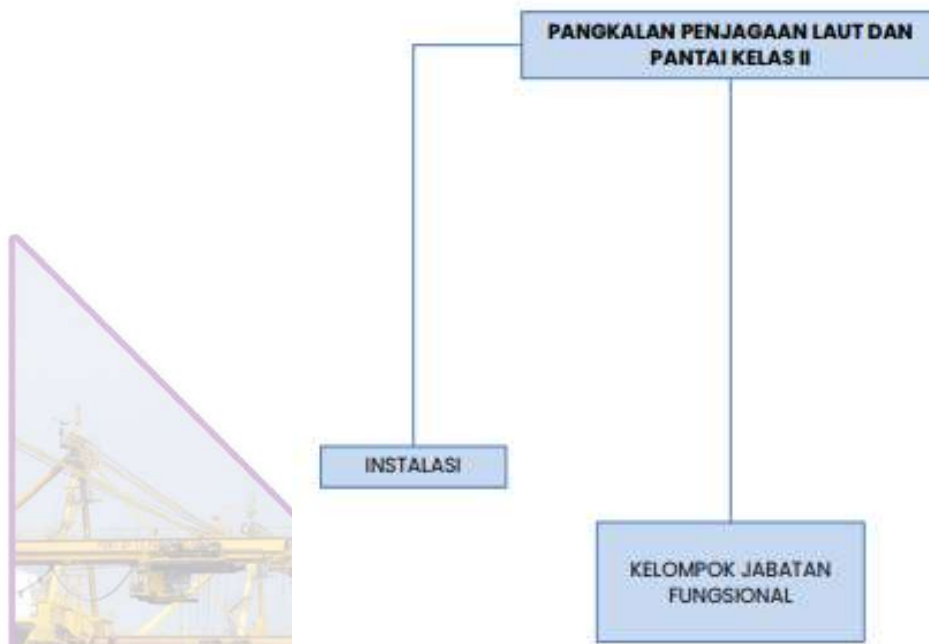
Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai diklasifikasikan ke dalam 2 kelas, yaitu:

- a) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I; dan
- b) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II.



Gambar I.2.12 Struktur Organisasi Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I





Gambar I.2.13 Struktur Organisasi Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II

### 7) Distrik Navigasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Distrik Navigasi, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kenavigasian dan pengawasan sebagian penyelenggaraan kenavigasian yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya dan badan usaha, Distrik Navigasi menyelenggarakan fungsi:

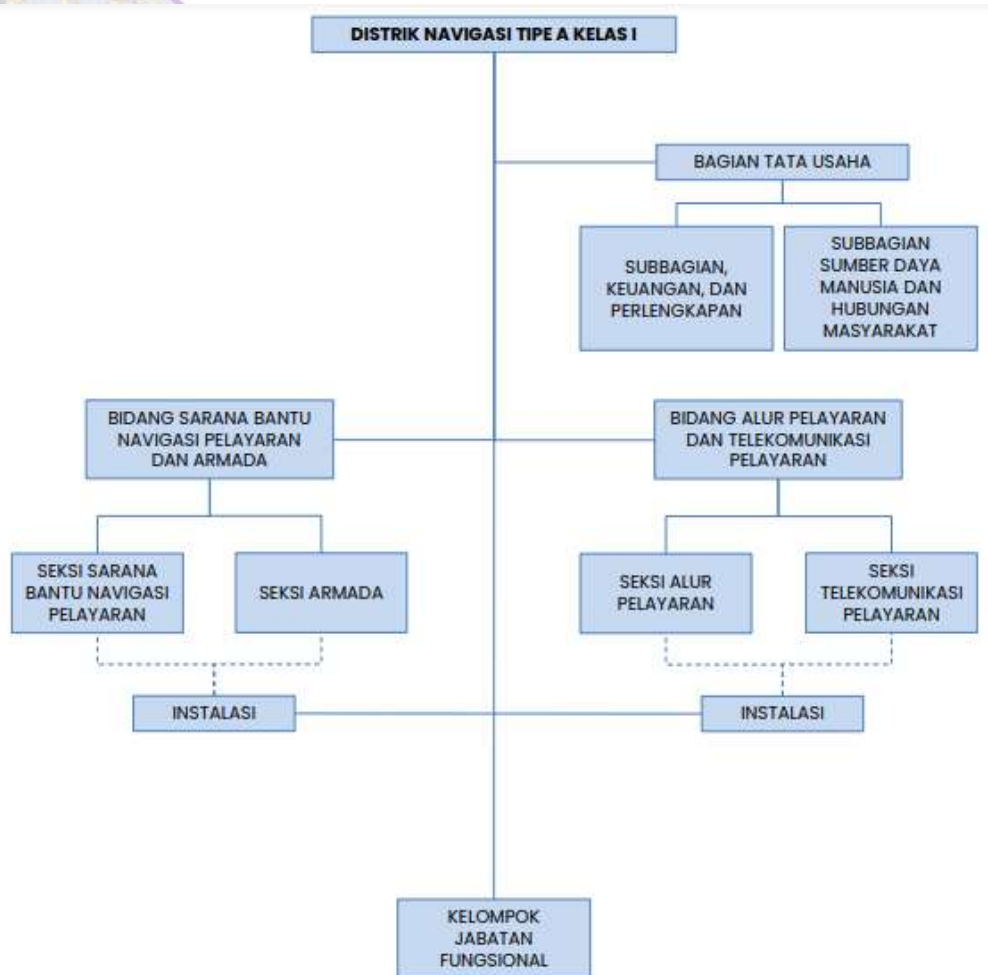
- a) Perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan alur pelayaran;
- b) Perencanaan, penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran;
- c) Perencanaan, penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan telekomunikasi pelayaran;
- d) Pengelolaan armada;
- e) Penyebarluasan informasi cuaca pelayaran;;
- f) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kenavigasian yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya dan badan usaha;



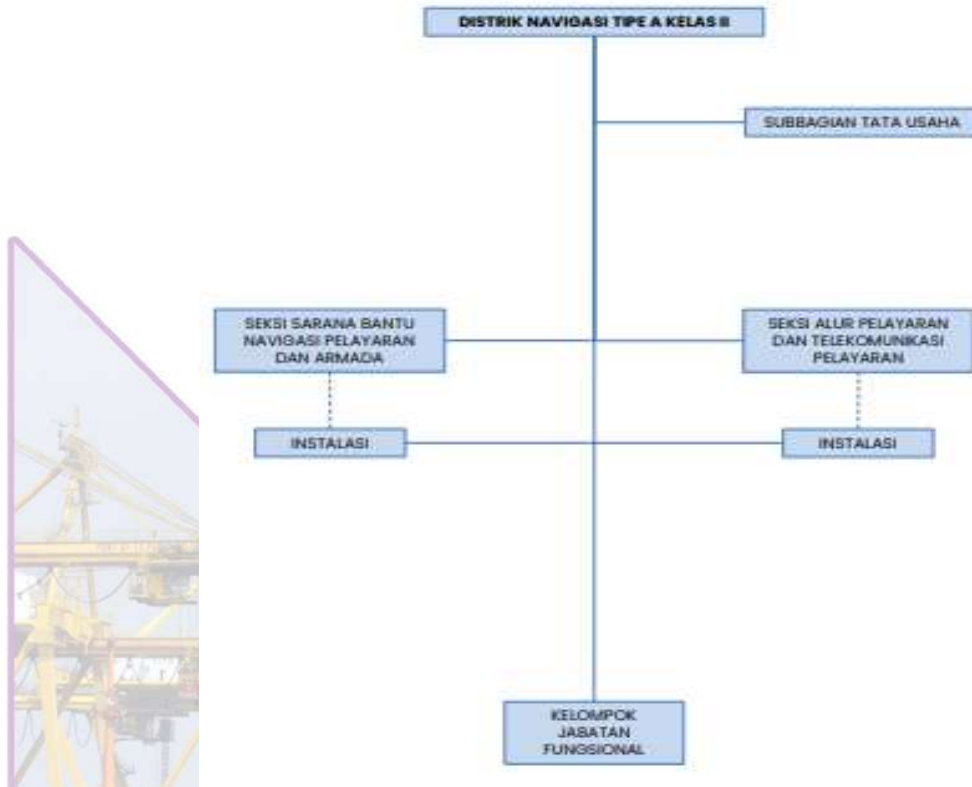
- g) Penyusunan perencanaan, pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, kerumahtangaan, perlengkapan, sumber daya manusia, hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat; dan.
- h) penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Distrik Navigasi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu:

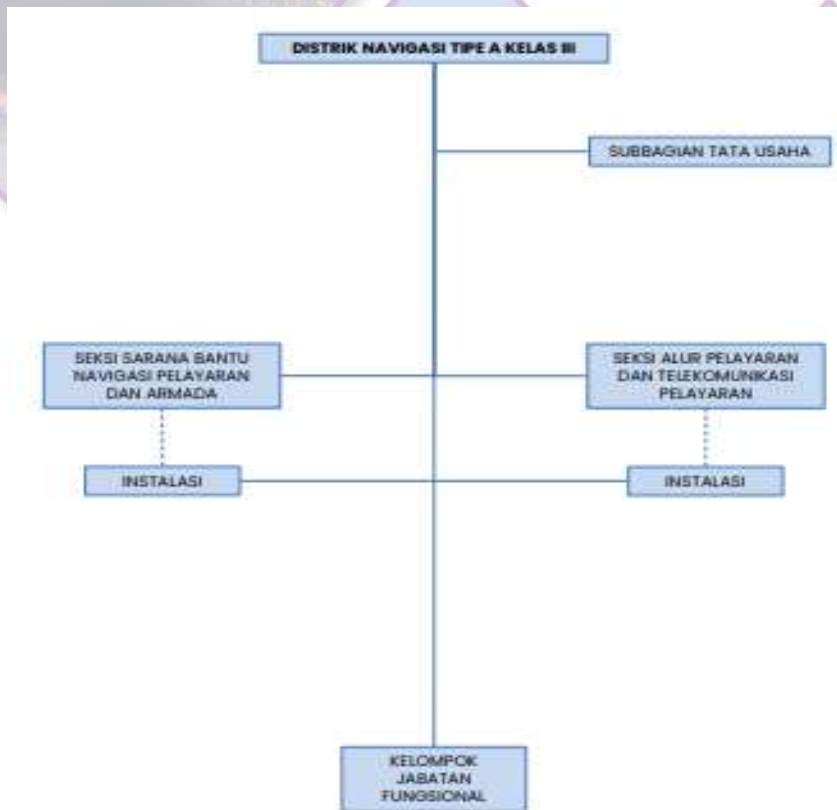
- a) Distrik Navigasi Kelas I
- b) Distrik Navigasi Kelas II
- c) Distrik Navigasi Kelas III



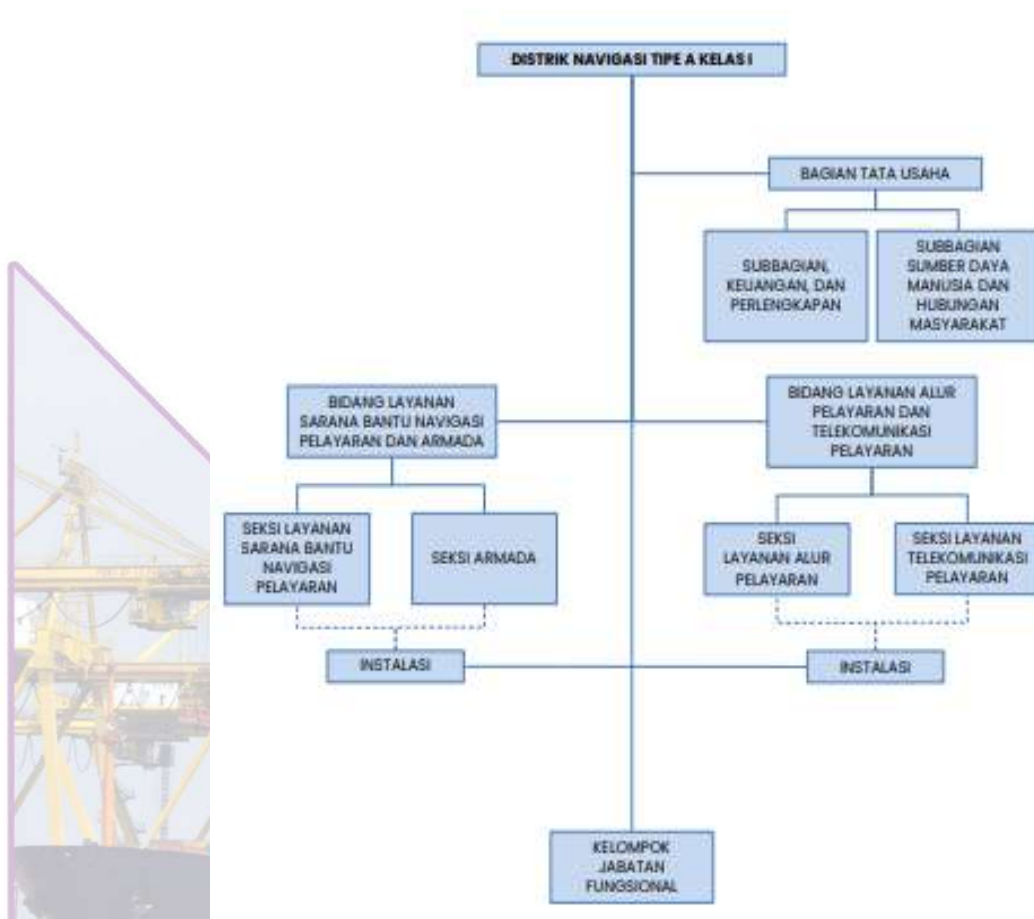
Gambar I.2.14. Struktur Organisasi Kantor Distrik Navigasi Kelas I



Gambar I.2.15. Struktur Organisasi Kantor Distrik Navigasi Kelas II



Gambar I.2.16. Struktur Organisasi Kantor Distrik Navigasi Kelas III



Gambar I.2.17. Struktur Organisasi Kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas I

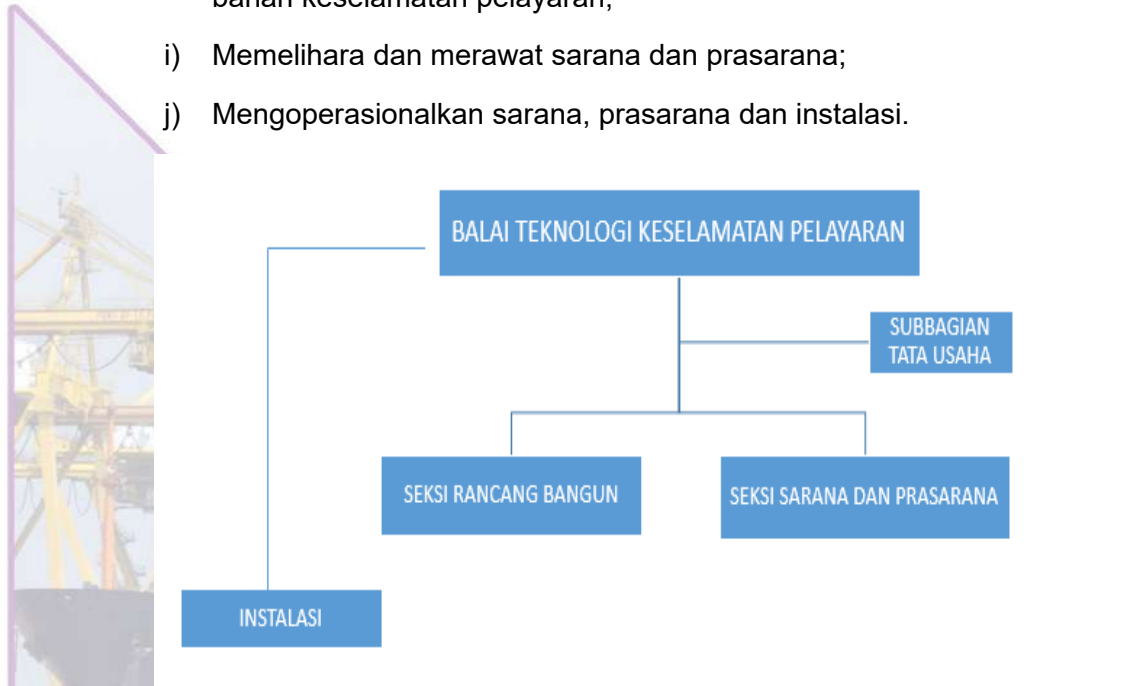
## 8) Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penilaian dan pengujian alat dan bahan keselamatan pelayaran serta Menyiapkan standarisasi dan sertifikasi alat dan bahan keselamatan pelayaran, melalui penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan penilaian dan pengujian alat dan bahan keselamatan pelayaran;
- Melaksanakan rancang bangun dan pembuatan alat dan bahan keselamatan pelayaran;
- Menyiapkan standarisasi dan sertifikasi alat dan bahan keselamatan pelayaran;
- Melaksanakan survey pelayaran, posisi alat keselamatan pelayaran, penentuan kedalaman;



- e) Melaksanakan pemberitaan keselamatan pelayaran;
- f) Menetapkan rencana program kerja serta evaluasi;
- g) Melaksanakan administrasi, ketatausahaan dan kerumahtangaan;
- h) Melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian alat dan bahan keselamatan pelayaran;
- i) Memelihara dan merawat sarana dan prasarana;
- j) Mengoperasikan sarana, prasarana dan instalasi.



Gambar I.2.18. Struktur Organisasi Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran

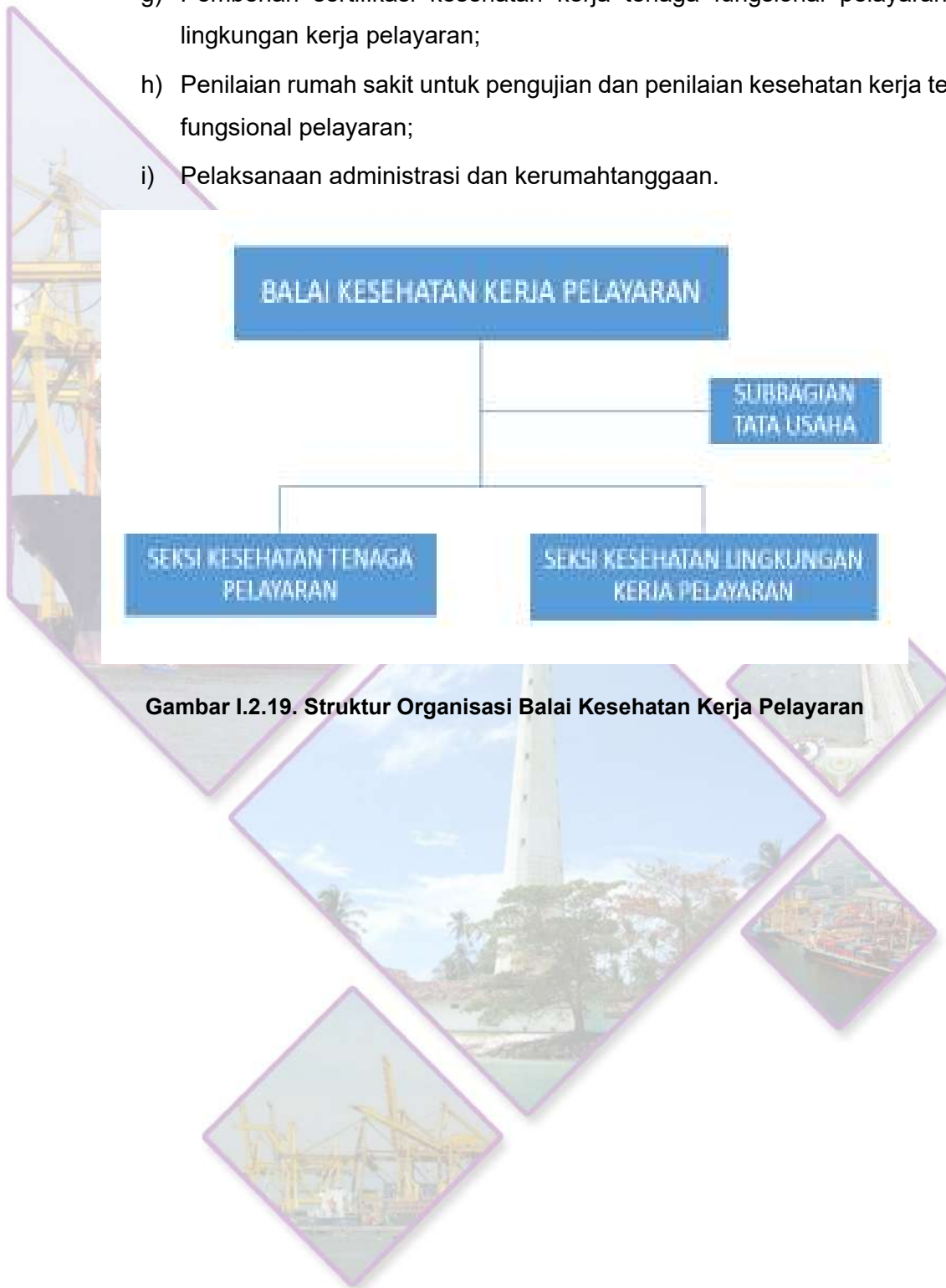
## 9) Balai Kesehatan Kerja Pelayaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Kesehatan Kerja Pelayaran Balai Kesehatan Kerja Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan pengujian, penilaian, dan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga fungsional pelayaran serta penilaian dan penilikan terhadap lingkungan kerja pelayaran, melalui penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana dan program serta evaluasi;
- b) Pelaksanaan pengujian, penilaian dan pemeliharaan kesehatan tenaga fungsional pelayaran;
- c) Pelaksanaan penilaian dan penilikan penerapan keselamatan kerja, gizi kerja, *ergonomic*, *hygiene* dan sanitasi;
- d) Pelaksanaan penilaian lingkungan kerja pelayaran;



- e) Penyiapan penyusunan pedoman pengujian kesehatan, pemeliharaan dan lingkungan kerja pelayaran;
- f) Penyiapan penyusunan standar kesehatan kerja tenaga fungsional pelayaran dan lingkungan kerja pelayaran;
- g) Pemberian sertifikasi kesehatan kerja tenaga fungsional pelayaran dan lingkungan kerja pelayaran;
- h) Penilaian rumah sakit untuk pengujian dan penilaian kesehatan kerja tenaga fungsional pelayaran;
- i) Pelaksanaan administrasi dan kerumahtangaan.



Gambar I.2.19. Struktur Organisasi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran





### C. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Tahun 2024 yaitu 13.784 pegawai. Adapun Rekapitulasi pegawai dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan:

Tabel I.3.1  
Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai	
		2023	2024
1.	S3	18	20
2.	S2	1336	1427
3.	S1	4189	4113
4.	D4	1074	1156
5.	D3	1399	1508
6.	D2	12	12
7.	D1	51	46
8.	SLTA atau Kurang	5736	5502
<b>TOTAL</b>		<b>13.820</b>	<b>13.784</b>



2. Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan:

Tabel I.3.2  
Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan

No	Golongan	Jumlah Pegawai	
		2023	2024
1.	IV/e	0	0
2.	IV/d	5	7
3.	IV/c	20	20
4.	IV/b	94	106
5.	IV/a	434	481
6.	III/d	1860	1829
7.	III/c	1868	2064
8.	III/b	3435	3306
9.	III/a	2871	2879
10.	II/d	1758	1473
11.	II/c	928	800
12.	II/b	390	391
13.	II/a	94	68
14.	I/d	3	2
15.	I/c	2	2
16.	I/b	0	1
17.	I/a	1	0
18.	X	0	5
19.	IX	0	90
20.	VII	0	158
21.	V	0	102
<b>TOTAL</b>		<b>13.820</b>	<b>13.784</b>



#### D. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Dalam pelaksanaan program Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk periode Rencana Strategi (Renstra) 2020 - 2024 yang bertujuan mewujudkan terpenuhinya Konektivitas Transportasi Laut, serta mewujudkan layanan prima terhadap kebutuhan masyarakat seefektif dan seefisien mungkin guna menurunkan biaya logistik nasional dan digitalisasi layanan.

Pada tahun 2024 terdapat beberapa program/ kegiatan yang disusun sebagai upaya dalam menghadapi isu-isu tersebut, antara lain:

1. Pembangunan Pelabuhan Patimban;
2. Proyek-proyek yang didanai oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
3. Program pendukung Pariwisata (Labuhan Bajo, Sanur dan Likupang);
4. Reviu Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN);
5. Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada Bidang Kepelabuhanan;
6. Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN);
7. Program Pelayanan Pelayaran Perintis;
8. Program Pelayanan angkutan ternak (sebagai wujud menjawab isu *animal welfare*);
9. Penerapan Sistem *Inaportnet* secara bertahap pada 2024 pelabuhan komersil;
10. Pengembangan Sistem Informasi Kepelautan;
11. Pembangunan Menara Suar Tanjung Batu – Disnav Tarakan;
12. Pembangunan Kapal Patroli PLP Kelas III, IV dan V.



# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024

#### A. PERENCANAAN STRATEGIS

Pada Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Program dan 8 (delapan) Indikator Kinerja Program yang memiliki target-target capaian kinerjanya, baik dalam rentang lima tahun (2020 – 2024) maupun yang bersifat tahunan. Untuk mencapai target yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2020 - 2024.

##### 1. Rencana Kinerja 5 (lima) Tahun

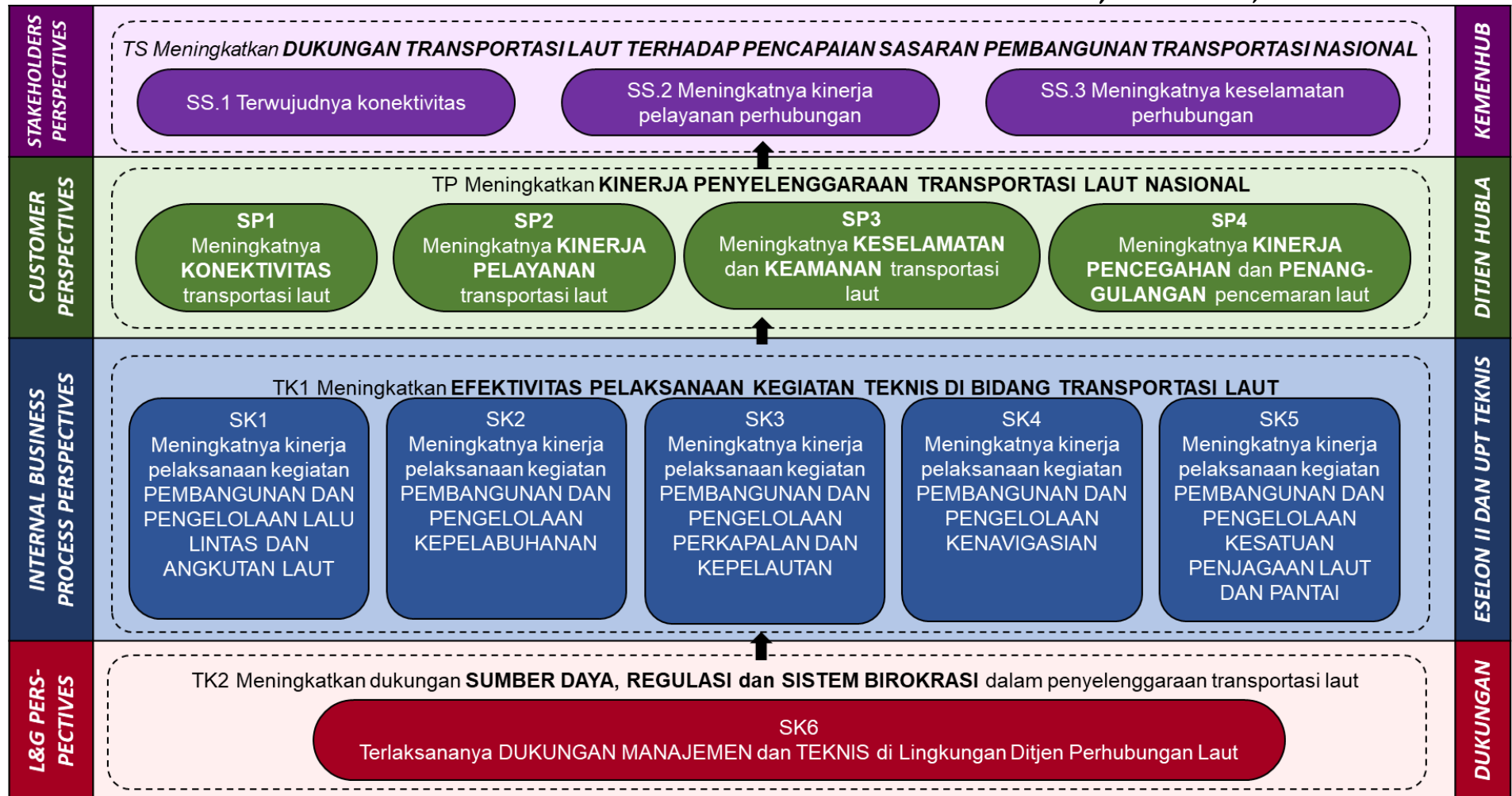
Indikator Kinerja (IK) adalah ukuran capaian kinerja dari sasaran. Adapun nomenklatur indikator kinerja yang digunakan sasaran tersebut diatas sesuai dengan PM No 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, terdiri dari:

- a. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) atau sering juga disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah representasi terukur dari Sasaran Strategis (SS). Secara hirarki target capaian IKSS merupakan tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan karena terkait dengan capaian sasaran prioritas Presiden.
- b. Indikator Kinerja Sasaran Program (IKP) sebagai representasi terukur dari Sasaran Program (SP). Secara hirarki target capaian IKP merupakan tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang diberikan kewenangan untuk menjalankan Program Pembangunan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut.
- c. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK) sebagai representasi terukur dari Sasaran Kegiatan (SK). Secara hirarki target capaian IKK merupakan tanggung jawab dari Unit Eselon II/UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di mana masing-masing merupakan pelaksana kegiatan yang tercakup di dalam Program Pembangunan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut.



*LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024*

Adapun susunan dan rumusan tentang indikator kinerja program (IKP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Sedangkan penjelasan lebih lanjut tentang daftar Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk setiap kegiatan di yang termasuk ke dalam program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perhubungan Laut.



Gambar II.1.1 Peta Strategi Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024



## 1) Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020 - 2024

Tabel II.1.1. Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020 - 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUSAN
TP Meningkatkan kinerja penyelenggaraan transportasi laut	SP1 Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP1 Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	Jumlah pelabuhan yang telah dilayati angkutan laut (tahun n0) ditambah dengan Jumlah Penambahan rute pelayaran atau pelabuhan yg disinggahi angkutan laut (tahun n) dibandingkan dengan jumlah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan laut. <b>Keterangan:</b> jumlah lokasi pelabuhan laut yang digunakan angkutan laut sesuai dengan Sub Lampiran A1 dalam KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) dan dapat berubah jika terdapat Reviu RIPN.
		IKP2 Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk <i>loop</i> secara teratur	%	Jumlah trayek pelayaran yang membentuk <i>loop</i> dibandingkan dengan jumlah trayek pelayaran dengan trayek tetap dan teratur (liner)
	SP2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3 Persentase On Time Performance Pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	Persentase pelabuhan utama dan pengumpul yang telah mencapai target kinerja yang ditetapkan (WT, AT, ET/BT)
	SP3 Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4 Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	Rasio	Jumlah kejadian kecelakaan transportasi laut per tahun dibandingkan jumlah SPB yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Laut dikali dengan 10.000 pelayaran
		IKP5 Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	Rasio	Persentase penurunan kejadian gangguan keamanan transportasi laut (di atas kapal dan di pelabuhan, terhadap wilayah pelabuhan, kapal, penumpang, barang) per tahun dibandingkan <i>baseline</i> 2019 dikali dengan 100.000 pelayaran



*LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024*

		IKP6 Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	Rerata Tingkat kehandalan SBNP ditambah dengan tingkatkehandalan Telkompel
	SP4 Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP7 Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)	Rasio	Jumlah sertifikat IAPP yang diterbitkan setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah kapal yang kapasitasnya lebih dari 400 GT
		IKP8 Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	Persentase kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal yang berhasil ditanggulangi

Sumber : Renstra 2020-2024 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut





## 2) Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024

Tabel II.1.2. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024

NO	Tujuan Kementerian Perhubungan	Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Indikator Tujuan	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Satuan	Target				
							2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya konektivitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan transportasi laut	Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0,89	0,89	0,90	0,91	0,92
					Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk <i>loop</i> secara teratur	%	24	25	27	27	27
2	Meningkatnya kinerja layanan transportasi		Persentase On Time Performance Pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	Persentase On Time Performance Pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	81	82	83	84	85
3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi		Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	Rasio	1,23 per 10000 pelayaran	1,21 per 10000 pelayaran	1,09 per 10000 pelayaran	0,97 per 10000 pelayaran	0,85 per 10000 pelayaran
					Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	Rasio	0,30 per 10000 pelayaran	0,29 per 100000 pelayaran	0,28 per 100000 pelayaran	0,27 per 100000 pelayaran	0,26 per 10000 pelayaran
					Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	96,5	97,25	97,75	98,25	99

Sumber : Renstra 2020-2024 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



## 2. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Muatan tentang arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional untuk periode 2020-2024 yang disampaikan pada bagian ini disadur dari RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2020.

### a. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional 2020-2024

Arahan kebijakan umum pembangunan nasional untuk ke-7 agenda pembangunan nasional, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2020-2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020) dirangkum pada berikut :

**Tabel II.1.3. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024**

No	Agenda pembangunan	Arah kebijakan	Strategi Implementasi
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata	Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang.	Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui: 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah; 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; 3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah; 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah	Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing



*LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024*

4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 2) Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 3) Memperkuat moderasi beragama; dan 4) Meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional	1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim	Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta Pembangunan Rendah Karbon.
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara	1) Reformasi birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Sumber: RPJMN 2020-2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020)



**b. Target Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024**

**Tabel II.1.4. Target Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024**

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut								Rp10.956.672,747	Rp12.177.169,217	Rp13.587.856,481	Rp13.691.338,202	Rp13.814.963,353	
	SP1 Meningkatnya konektivitas transportasi laut												
	IKP1 Rasio konektivitas transportasi laut nasional		0,89	0,89	0,90	0,91	0,92						Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
	IKP2 Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk <i>loop</i> secara teratur		24	25	27	27	27						Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
	SP2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut												
	IKP 3 Persentase On Time Performance Pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul		81%	82%	83%	84%	85%						Direktorat Kepelabuhanan
	SP3 Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut												
	IKP4 Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut		1,23 per 10.00	1.21 per 10.000	1.09 per 10.000	0.97 per 10.000	0.85 per 10.000						Dit. KPLP



*LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024*

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
			0 pelayaran	pelayaran	pelayaran	pelayaran	pelayaran							
	IKP5 Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut		0,30 per 100.000 pelayaran	0,29 per 100.000 pelayaran	0,28 per 100.000 pelayaran	0,27 per 100.000 pelayaran	0,26 per 100.000 pelayaran							Dit. KPLP
	IKP 6 Tingkat kehandalan Kenavigasian		96,5%	97,25 %	97,75 %	98,25 %	99%							Dit. Kenavigasian
	SP4 Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut													
	IKP 7 Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)		0,2	0,4	0,6	0,8	1							Dit.Kappel
	IKP8 Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan		100%	100%	100%	100%	100%							Dit. KPLP

Sumber : Renstra 2020-2024 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



**c. Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Program Transportasi Laut 2020-2024**

Secara keseluruhan untuk setiap kegiatan yang tercakup di dalam program penyelenggaraan transportasi laut tersebut diperlukan total pendanaan sekitar Rp 64.228.000.000,00 untuk 5 tahun dari Tahun 2020-2024, tercakup di dalamnya untuk jenis belanja modal maupun belanja barang, serta berbagai sumber pendanaan, baik Rupiah Murni, PHLN, SBSN, KPBU maupun swasta murni.

Sebagaimana diketahui bahwa pada periode Tahun 2024 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan Program Penyelenggaraan Transportasi Laut yang terdiri dari 6 (enam) jenis kegiatan yang mencakup:

- 1) Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
- 2) Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Kepelabuhanan;
- 3) Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Perkapalan dan Kelautan;
- 4) Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Kenavigasian;
- 5) Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai;
- 6) Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Dukungan Manajemen dan Teknis.

Secara terperinci 6 (enam) kegiatan tersebut dalam Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dokumen penganggaran dibagi menjadi Output dan Sub output.

Pada periode Tahun 2021-2024 terdapat Restrukturisasi Program dalam Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan Program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Infrastruktur Konektivitas;
  - i. Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut;
  - ii. Kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut;
  - iii. Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Laut;
  - iv. Kegiatan Pelayanan Transportasi Laut.
- 2) Program Dukungan Manajemen;
  - i. Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Laut;



*LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024*

- ii. Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Laut;
- iii. Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Laut;
- iv. Kegiatan Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut;
- v. Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut;
- vi. Kegiatan Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Transportasi Laut.



d. Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Program Transportasi Laut 2020-2024

Tabel II.1.5. Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Program Transportasi Laut 2020-2024

No	Kegiatan/Program	Kebutuhan Pendanaan Per Tahun (dalam Juta)						Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	Total	
1	Kegiatan Pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Rp1.702.151,446	Rp2.220.5420,904	Rp2.805.738,123	Rp2.901.487,108	Rp3.108.440,099	Rp12.723.237,68	
2	Kegiatan Pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Kepelabuhanan	Rp4.154.641,670	Rp3.583.020,673	Rp4.169.467,299	Rp3.314.8714,334	Rp2.854.041,059	Rp17.909.885,035	
3	Kegiatan Pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Perkapalan dan Kepelautan	Rp53.162,035	Rp196.843,838	Rp158.638,538	Rp163.038,909	Rp167.561,994	Rp739.245,314	
4	Kegiatan Pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Kenavigasian	Rp493.728,073	Rp1.247.016,155	Rp1.074.683,076	Rp1.578.216,389	Rp1.705.355,953	Rp6.098.999,646	
5	Kegiatan Pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai	Rp286.810,522	Rp437.468,238	Rp654.159,138	Rp823.951,611	Rp706.072,545	Rp.2.908.462,054	
6	Kegiatan Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Teknis Program Penyelenggaraan Transportasi Laut	Rp4.2566.179,001	Rp4.507.399,409	Rp4.725.170,307	Rp5.098.950,816	Rp5.273.491,703	Rp23.848.170,271	
<b>TOTAL</b>		<b>Rp10.956.672,747</b>	<b>Rp12.177.169,217</b>	<b>Rp13.587.856,481</b>	<b>Rp13.691.338,202</b>	<b>Rp13.814.963,353</b>	<b>Rp64.228.000,000</b>	

Sumber : Renstra 2020-2024 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut





**3. Pengembangan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu (*Integrated Port Network*)  
(Major Project RPJMN No. 22)**

- a. Pengembangan jaringan pelabuhan utama terpadu atau sering disebut sebagai *Integrated Port Network* (IPN) merupakan upaya dasar untuk mengurangi biaya logistik laut (khususnya untuk distribusi barang dalam negeri).
- b. Dengan standarisasi teknis dan standarisasi pelayanan pada sejumlah pelabuhan utama (untuk periode 2020-2024 ini difokuskan pada 7 pelabuhan: Kuala Tanjung, Kijing, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Bitung, Sorong) diharapkan rute utama antar pulau melalui pelabuhan-pelabuhan tersebut dapat dilayani dengan kapal-kapal besar melalui rute loop yang lebih efisien. Pengembangan IPN ini juga mendukung highlight Program Prioritas berdasarkan Kepulauan 2020-2024.



c. Deskripsi umum mengenai MP 22 Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu (IPN) sebagaimana tertuang di dalam table berikut ini :

Tabel II.1.6. Deskripsi Major Project (MP) 22 Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu (Integrated Port Network)

Lokasi	Pelabuhan: Kuala Tanjung, Kijing, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Bitung, Sorong					
Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Biaya Logistik Indonesia tertinggi dibandingkan sejumlah negara, termasuk India, Malaysia, Tiongkok, Thailand, dan Vietnam</li><li>• 28 pelabuhan utama dalam rencana induk pelabuhan belum terkonsolidasi</li><li>• 77% Rute pelayaran di Indonesia didominasi <i>port to port</i>, sedangkan rute <i>loop</i> hanya 23%</li><li>• Belum adanya standardisasi pelabuhan utama (panjang dermaga, kedalaman dan area penumpukan), untuk dijadikan pelabuhan utama <i>transshipment</i> domestik.</li></ul>					
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan kinerja pelabuhan dengan adanya standardisasi pelabuhan utama (nilai <i>turn round time</i> maksimum 24 jam)</li><li>• Meningkatkan efisiensi rute pelayaran domestik dengan membentuk loop secara teratur menjadi 27%</li><li>• Sebagai penunjang Kawasan ekonomi yang terintegrasi dengan pelabuhan</li></ul>					
Durasi	Tahun 2020-2024 (5 tahun)					
Indikasi Target dan Pendanaan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Indikasi Pendanaan
	1 pelabuhan utama	2 pelabuhan utama	4 pelabuhan utama	6 pelabuhan utama	7 pelabuhan utama	Rp 113 Triliun (BUMN/Swasta)
Pelaksana	Kementerian Perhubungan, BUMN, Swasta					
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standardisasi infrastruktur dan suprastruktur pelabuhan utama (pengembangan dermaga dan terminal peti kemas)</li><li>2. Pengerukan kolam pelabuhan dan alur pelayaran, dan pembangunan breakwater</li><li>3. Pengadaan kapal besar kapasitas 3000-5000 TEUs</li><li>4. Pengembangan Kawasan Industri</li></ol>					

Sumber: RPJMN 2020-2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020)



**d. Indikasi Target dan Pendanaan Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2020-2024**

Pada Lampiran III RPJMN 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020) disampaikan target pembangunan dan pendanaan Prioritas Nasional (PN) di bidang transportasi laut untuk periode 2020-2024. Adapun detail dari usulan proyek/kegiatan strategis lainnya di bidang Perhubungan Laut yang diusulkan di dalam Renstra Ditjen Perhubungan Laut 2020-2024 disampaikan di

**Tabel II.1.7 Indikasi Target dan Pendanaan Prioritas Nasional  
Bidang Transportasi Laut dalam RPJMN 2020-2024**

No	Program/Kegiatan/Proyek Strategis	Satuan	Target Tahunan					Total Target	Indikasi Belanja Non Operasional 2020-2024 (Rp Milyar)
			2020	2021	2022	2023	2024		
<b>1</b>	<b>Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Kenavigasian</b>								<b>2.570,8</b>
	Penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP)	Unit	67	70	73	75	77	362	1.118,2
	Penyediaan kapal navigasi	Unit	10	14	18	22	25	89	1.000,0
	Penyediaan vessel traffic services terintegrasi (VTS)	Unit	15	20	25	30	35	125	452,6
<b>2</b>	<b>Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut</b>								<b>10.267,4</b>
	Subsidi Tol Laut	Trayek	21	22	23	24	25	25	2.398,0
	Subsidi Angkutan Laut Perintis	Trayek	113	113	113	113	113	113	6.498,9
	Pengembangan sistem Inaportnet dan sistem pelayanan terpadu	Lokasi	20	22	24	19	20	105	1.332,0
	Penyediaan Moda Kapal Ternak di Belu	Rute	1	1	1	1	1	5	38,5
<b>3</b>	<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan</b>								<b>12.482,7</b>
	Pembangunan pelabuhan (Selesai)	Lokasi	-	-	1	1	3	5	5.072,2
	Pengembangan pelabuhan (Selesai)	Lokasi	10	9	2	15	21	57	3.034,6
	Rekonstruksi pelabuhan (Selesai)	Lokasi	-	-	3	-	-	3	1.044,0
	Pengadaan peralatan bongkar muat	Lokasi	8	8	8	8	8	40	2.000,0
	Penyelenggaraan pengerukan alur pelayaran	Lokasi	20	22	24	19	20	105	1.332,0

Sumber: RPJMN 2020-2024 (Perpres 18 Tahun 2020)



## **B. PERJANJIAN KINERJA**

Dalam rangka mengoperasionalkan Rencana Strategis, setiap tahunnya Perencanaan Strategik dituangkan dalam suatu Perjanjian Kinerja Tahunan (*Performance Contract*). Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan stratejik, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicators*) yang relevan. Indikator dimaksud meliputi indikator-indikator pencapaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tercantum di dalam Rencana Strategis Ditjen Hubla telah dirumuskan tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2020 - 2024. Dengan mengacu kepada sasaran dan tujuan, tugas pokok dan fungsi serta Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, maka setiap tahun dilaksanakan beberapa kegiatan pembangunan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta beberapa kegiatan yang strategis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Secara lebih rinci, Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2024 (yang sudah ditandatangani antara Menteri Perhubungan dengan Direktur Jenderal Perhubungan Laut) dapat dilihat pada tabel Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024 disusun setelah DIPA Tahun 2024 ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Menteri Perhubungan dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang memuat Pernyataan Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Adapun rincian Target Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:



## 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Tabel II.2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
<b>Program : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut</b>					
SP.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Laut	IKP 1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,95
		IKP 2	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk <i>Loop</i> Secara Teratur	%	27
SP.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Laut	IKP 3	Persentase <i>On Time Performance</i> Pada Pelabuhan Utama Dan Pengumpul	%	85
SP.3	Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Laut	IKP 4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	0,80
		IKP 5	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/100.000 Pelayaran	0,26
		IKP 6	Tingkat Keandalan Kenavigasian	%	97,25
SP.4	Meningkatnya Kinerja Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Laut	IKP 7	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)	Rasio	1
		IKP 8	Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan	%	100

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024



## 2. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Tabel II.2.2. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
<b>Program : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut</b>					
SP.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Laut	IKP 1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,95
		IKP 2	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk <i>Loop</i> Secara Teratur	%	27
SP.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Laut	IKP 3	Persentase <i>On Time Performance</i> Pada Pelabuhan Utama Dan Pengumpul	%	94
SP.3	Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Laut	IKP 4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	0,80
		IKP 5	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/100.000 Pelayaran	0,26
		IKP 6	Tingkat Keandalan Kenavigasian	%	97,25
SP.4	Meningkatnya Kinerja Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Laut	IKP 7	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)	Rasio	1
		IKP 8	Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan	%	100

Sumber : Dokumen Reviu Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024



# BAB III

## Akuntabilitas Kinerja

### Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024

#### A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampaknya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Untuk melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja, yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai atau berfungsi.

Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak dari target yang ditetapkan di dalam dokumen Perencanaan Kinerja.

Pengukuran kinerja ini mencakup:

1. **Perencanaan Kinerja** adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan dalam Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.



2. **Perjanjian Kinerja** adalah Lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
3. **Pengelolaan Data Kinerja** adalah kegiatan pencatatan, pengolahan, penyimpanan dan pelaporan data kinerja.
4. **Pengukuran Kinerja** adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan / atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, tujuan, program, kebijakan, anggaran dan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target sebagaimana indikator kinerja yang telah ditetapkan.
5. **Kinerja Kegiatan** yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
6. **Tingkat Pencapaian Sasaran** yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Dalam rangka penyempurnaan RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2020 - 2024 Kementerian Perhubungan telah menetapkan Indikator Kinerja Program di lingkungan Kementerian Perhubungan yang meliputi Indikator Kinerja Program yang terdapat pada seluruh Unit Kerja Tingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024 dilakukan dengan cara melakukan analisis dan evaluasi terhadap pencapaian antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Adapun rumus dari pengukuran capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Jika makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

- b. Jika makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$





Selanjutnya dilakukan juga analisis dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja beberapa tahun sebelumnya serta terhadap target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat pada Tinjau Ulang draft RENSTRA Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 - 2024.

Target capaian kinerja yang telah diukur berdasarkan Indikator Kinerja Program di dalam perencanaan kinerja yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja atau dokumen PK, di dalam dokumen PK menetapkan target Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai dasar penyusunan dokumen Laporan Kinerja. Adapun rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :





1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target PK Tahun 2024 dan Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Indikator Kegiatan Program Tahun 2024

Tabel III.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

NO (1)	SASARAN PROGRAM (2)	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM (3)		SATUAN (4)	TARGET 2024 (5)	REALISASI KINERJA TAHUN 2024					CAPAIAN KINERJA (%)
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
SP.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Laut	IKP 1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	100
		IKP 2	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur	%	27	30	27	27	27	27	100
SP.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Laut	IKP 3	Persentase <i>On Time Performance</i> Pada Pelabuhan Utama Dan Pengumpul	%	94	96	94,7	94,6	94,1	94,1	100,1
SP.3	Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Laut	IKP 4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	0,80	0,87	0,68	0,94	0,85	0,85	93,75
		IKP 5	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/100.000 Pelayaran	0,26	0	0	0,1	0,1	0,1	187,50



		IKP 6	Tingkat Kehandalan Kenavigasian	%	97,25	97,03	95,24	95,25	95,22	95,22	97,91
SP.4	Meningkatnya Kinerja Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Laut	IKP 7	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)	Rasio	1	0,964	0,993	0,998	1	1	100
		IKP 8	Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan	%	100	100	100	100	100	100	100





**a. SASARAN PROGRAM ( 1 )**

Sasaran Program **Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Transportasi Laut** dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Indikator Kinerja Program (IKP) Kesatu (1) adalah **“Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional”**

- a) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target PK Revisi Tahun 2024 Pada Indikator Kinerja Program Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional (IKP 1) Kesatu (1) :**

**Tabel III.1.2. Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional**

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2024					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	100

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Adapun target Rasio Konektivitas Transportasi Laut pada Tahun 2024 sebesar 0,95. Jumlah pelabuhan yang penggunaannya untuk angkutan laut, sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No. KP. 432 Tahun 2017 tentang RIPN sebanyak 636 pelabuhan.

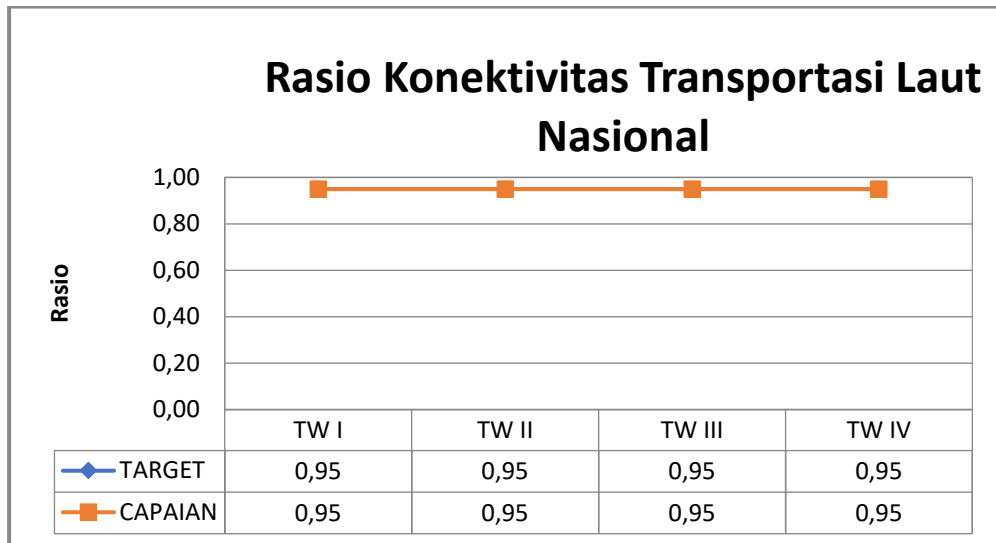
Pada Triwulan I tahun 2024 terdapat penambahan pelabuhan yang terlayani angkutan laut sebanyak 8 pelabuhan. Pada bulan Januari 2024 terdapat tambahan 7 pelabuhan, meliputi Teluk Sigintung (Seruyan), Pota, Pangandaran (Bojongsalawe), Mansinam, Mempawah, Moru, Palipi. Bulan Februari terdapat tambahan 1 pelabuhan yaitu Kotabunan. Bulan Maret tidak terdapat tambahan pelabuhan. Secara keseluruhan realisasi jumlah pelabuhan yang dilayani selama Januari s/d September 2024 menjadi 603 pelabuhan dari target 636 pelabuhan. Rasio konektivitas transportasi laut nasional pada Januari sampai dengan Maret Tahun 2024 sebesar 0,95 dari target 0,95. Dengan demikian capaian kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional mencapai 100%.

Pada triwulan II Rasio konektivitas transportasi laut nasional pada April sampai dengan Juni Tahun 2024 sebesar 0,95 dari target 0,95. Dengan demikian capaian kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional mencapai 100%.

Pada triwulan III Rasio konektivitas transportasi laut nasional pada Juli sampai dengan September Tahun 2024 sebesar 0,95 dari target 0,95. Dengan demikian capaian kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional mencapai 100%. Capaian pada triwulan III berlanjut sampai dengan triwulan IV.



Grafik III.1.1. Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional



Rasio konektivitas transportasi laut nasional diukur dengan menghitung jumlah pelabuhan yang telah dilayani angkutan laut dibandingkan dengan jumlah pelabuhan laut yang diperuntukkan sebagai layanan angkutan laut, atau dengan rumus:

$$\text{Rasio konektivitas transportasi laut nasional} = \frac{\sum \text{jumlah pelabuhan yang telah dilayani angkutan laut}}{\sum \text{jumlah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan laut}}$$

$$\text{Rasio konektivitas transportasi laut nasional} = \frac{603 \text{ trayek}}{636 \text{ trayek}} = 0,95$$

Secara keseluruhan Rasio Konektivitas Transportasi Laut Tahun 2024 pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar 0,95. Terlampir daftar pelabuhan yang sudah dan belum terlayani oleh kapal angkutan laut.

b) **Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Program Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional (IKP 1) Kesatu (1) :**

Adapun realisasi kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional setiap tahun telah mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian terhadap target setiap tahunnya didukung peran aktif dari pemerintah pusat dan daerah dalam mempromosikan keunggulan komoditas serta para pemilik barang yang masih mengandalkan angkutan laut dalam mendistribusikan barang.



**Tabel III.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020  
Sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP 1) Kesatu (1)**

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	KRITERIA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	Target	0,89	0,89	0,90	0,94	0,95
		Realisasi	0,89	0,898	0,91	0,94	0,95
		Kinerja (%)	100	100,87	101	100	100

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

- c) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional (IKP 1) Kesatu (1) :**

Adapun berdasarkan Reviu Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 pada Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional untuk target tidak terdapat perubahan dan realisasinya terdapat peningkatan setiap tahun, sehingga jumlah pelabuhan yang telah dilayani angkutan laut meningkat.

**Tabel III.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kesatu (1)**

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	Target	0,89	0,89	0,90	0,91	0,92
		Realisasi	0,89	0,898	0,91	0,94	0,95
		Kinerja (%)	100	100,87	101	103	103,26

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



2) Indikator Kinerja Program (IKP) Kedua (2) adalah “**Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur**”.

a) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target PK Revisi Tahun 2024 Pada Indikator Kinerja Program Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur (IKP 2) Kedua (2):**

Tabel III.1.5. Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2024					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.2	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk <i>Loop</i> Secara Teratur	%	27	30	27	27	27	27	100

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Adapun target Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk *Loop* Secara Teratur Tahun 2024 sebesar 27% atau sebanyak 41 trayek dari 138 trayek tetap dan teratur. Pada triwulan I tahun 2024 telah diinventarisasi sebanyak 41 trayek tetap dan teratur angkutan peti kemas membentuk *loop service*. Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk *Loop* Secara Teratur sebesar triwulan I tahun 2024 sebesar 30%. Dengan demikian kinerja indikator Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk *Loop* Secara Teratur mencapai 111,11%.

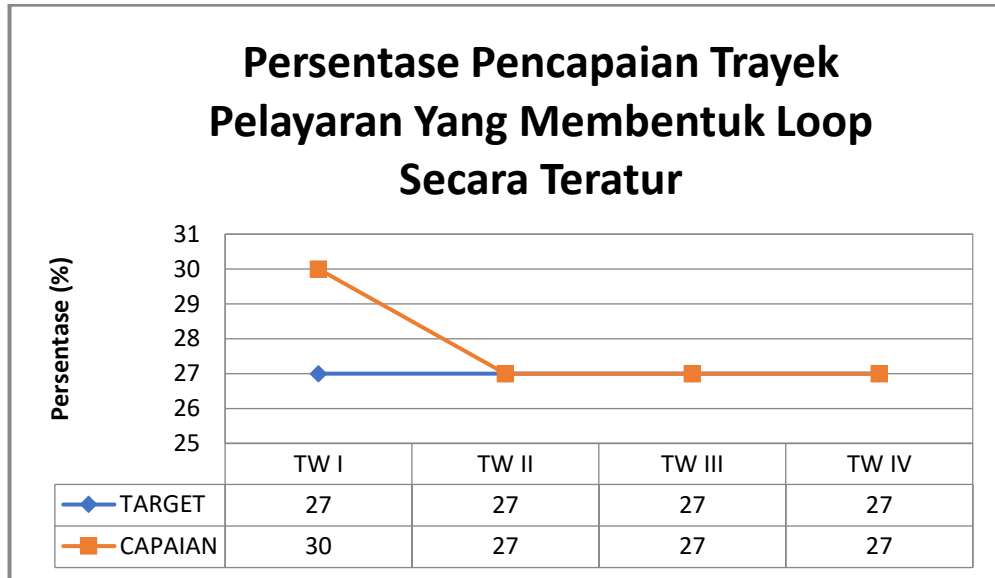
Pada triwulan II dan Triwulan III tahun 2024 telah diinventarisasi sebanyak 37 trayek tetap dan teratur angkutan peti kemas membentuk *loop service*. Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk *Loop* Secara Teratur sebesar triwulan II tahun 2024 sebesar 27%. Dengan demikian kinerja indikator Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk *Loop* Secara Teratur menacapai 100%. Kondisi ini terus berlanjut hingga triwulan III dan IV tahun 2024.

Untuk Triwulan I melebihi target karena terdapat 41 trayek yang angkutan petikemas yang melayani secara *loop*. Sejak triwulan II sampai dengan Triwulan IV jumlah trayek *loop* berubah menjadi 37 trayek Dimana sebanyak 4 trayek kapal petikemas swasta kembali berlayar secara *trampe* ( tidak teratur dan tidak terjadwal tetap).

Perubahan jumlah trayek ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 528 Tahun 2024 tanggal 22 Agustus 2024. Kedua trayek tersebut pada awalnya disiapkan situasional untuk mengakomodir surplus beras dari Merauke. Trayek tersebut akan dioperasikan apabila terdapat permintaan muatan. Sejak tahun 2023 sampai dengan semester I tahun 2024 tidak terdapat permintaan muatan, sehingga 2 trayek tersebut ditiadakan.



**Grafik III.1.2. Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur**



Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur diukur dengan menghitung jumlah trayek pelayaran yang membentuk loop dibandingkan dengan jumlah trayek pelayaran dengan trayek tetap dan teratur (liner), atau dengan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop} = \frac{\sum \text{jumlah trayek pelayaran yang membentuk loop}}{\sum \text{jumlah trayek pelayaran dengan trayek tetap dan teratur (liner)}} \times 100\%$$

x = Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop secara Teratur

$$\% \text{ pencapaian trayek loop} = \frac{37 \text{ trayek}}{138 \text{ trayek}} = 27\%$$



**Tabel III.1.6. Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur Tahun 2024**

NO.	JARINGAN TRAYEK
1	Bitung-Ulu Siau/Tagulandang-Tahuna-Lirung/Melonguane-Bitung
2	Makassar-Bungku-Kolonedale-Makassar
3	Merauke (Kelapa Lima) - Kimaam - Moor - Bade (Mapi)- Getentiri (Bovendigul) - Merauke
4	Tanjung Perak-Anggrek-Tanjung Perak
5	Tanjung Perak-Badas-Bima-Tanjung Perak
6	Tanjung Perak-Fak Fak-Kaimana-Elat-Dobo-Tanjung Perak
7	Tanjung Perak-Kisar-Leti-Moa-Mahaleta-Tanjung Perak
8	Tanjung Perak-Larantuka-Lembata-Kalabahi-Tanjung Perak
9	Tanjung Perak-Namlea-Tanjung Perak
10	Tanjung Perak-Nunukan-Tanjung Perak
11	Tanjung Perak-Pulau Obi-Piru-Bula-Larat-Tepa-Tanjung Perak
12	Tanjung Perak-Reo-Tanjung Perak
13	Tanjung Perak-Saumlaki-Dobo-Tanjung Perak
14	Tanjung Perak-Sorong-Tanjung Perak





15	Tanjung Perak-Tarakan-Tanjung Perak
16	Tanjung Perak-VVanci-Nam role (Leksula)-Tanjung Perak
17	Tanjung Perak-Wasior-Nabire-Serui-Tanjung Perak
18	Tanjung Perak-Wayaloar-Malbuta-Babang-Saketa-Gimea/Tapeleo-Tanjung Perak
19	Tanjung Priok-Pulau Baai-Tanjung Priok
20	Tanjung Priok-Teluk Bayur-Tanjung Priok
21	Makassar - Ereke - Raha - Sikeli - Selayar- Makassar
22	Tanjung Perak - Tarakan - Nunukan - Tanjung Perak
23	Tanjung Perak - Kupang - Tanjung Perak
24	Tanjung Perak - Lembata (Lewoleba) -Tabilota/ Larantuka - Tanjung Perak
25	Tanjung Perak - Makassar - Jailolo - Morotai (Daruba) - Tanjung Perak
26	Tanjung Perak - Merauke - Agats - Timika (Pomako) - Tanjung Perak
27	Tg Perak - Iiwaki-Kisar - Leti - Kaiwatu - Moa - Lelang/P. Sermata - Tepa - Larat - Tg Perak
28	Tanjung Perak - Wetar - Kisar - Leti - Moa - Sermata
29	Tanjung Perak - Bau-Bau/Murhum-Kendari /Bungkutoko-Tanjung Perak
30	Tanjung Perak - Makassar - Jailolo - Daruba-Galela-Tanjung Perak
31	Tanjung Perak - Makassar - Tahuna - Tanjung Perak
32	Tanjung Perak - Rote - Sabu-Tanjung Perak
33	Tanjung Perak-Soasio-Galela-Daruba- Galela - Buli - Maba Pura- Weda - Tanjung Perak
34	Tanjung Priok - Wanci - Namrole - Pulau Obi - Tanjung Perak
35	Tanjung Priok- Lhokseumawe - Malahayati - Sabang - Tanjung Priok
36	Tanjung Priok - Tanjung Perak - Tanjung Priok
37	Tg Priok - Kijang- Letung -Tarempa-Pulau Laut -Selat Lampa- Subi - Serasan-Midai-Tg Priok

	= Jaringan Trayek Kapal Peti Kemas Tol Laut
	= Jaringan Trayek Kapal Peti Kemas Swasta

Adapun capaian kinerja ini didukung oleh trayek tol laut sebanyak 20 trayek (54%) sedangkan kapal swasta mencapai 17 trayek (46%). Hal ini menggambarkan bahwa jaringan trayek dengan model *loop service* pelayaran nasional swasta didominasi oleh kapal-kapal tol laut. Untuk lebih meningkatkan peranan pelayaran nasional swasta, Direktorat Jenderal Perhubungan laut telah melakukan upaya – upaya sebagai berikut :

- i. Menghimbau kepada perusahaan pelayaran swasta melalui surat edaran kepada DPP INSA untuk meningkatkan jadwal pelayaran kapal-kapal petikemas secara lebih teratur;
  - ii. Melakukan evaluasi pada saat rapat koordinasi nasional penyelenggaraan angkutan barang tol laut dalam rangka meningkatkan persentase pencapaian indikator trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur.
- b) **Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Program Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur (IKP 2) kedua (2) :**



Adapun realisasi kinerja Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk *Loop* Secara Teratur setiap tahun mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk lebih meningkatkan peranan pelayaran nasional swasta setiap tahunnya Direktorat Jenderal Perhubungan laut telah melakukan himbuan kepada perusahaan pelayaran swasta melalui surat edaran kepada DPP INSA serta melakukan evaluasi rapat koordinasi nasional penyelenggaraan angkutan barang tol laut.

**Tabel III.1.7. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedua (2)**

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	KRITERIA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk <i>Loop</i> Secara Teratur	%	Target	24	25	27	27	27
		Realisasi	24	25	27	30	27
		Kinerja (%)	100	100	100	111,11	100

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

- c) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk *Loop* Secara Teratur (IKP 2) Kedua (2) :**

Adapun berdasarkan Reviu Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 pada Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk *Loop* Secara Teratur untuk target tidak terdapat perubahan dan realisasinya sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga meningkatkan jaringan trayek dengan model *Loop Service* terhadap Pelayaran Nasional.



Tabel III.1.8. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedua (2)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur	%	Target	24	25	27	27	27
		Realisasi	24	25	27	30	27
		Kinerja (%)	100	100	100	111,1	100

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

**b. SASARAN PROGRAM ( 2 )**

Sasaran Program **Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Laut** terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Program dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

3) Indikator Kinerja Program (IKP) Ketiga (3) adalah **“Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul”**

a) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target PK Revisi Tahun 2024 Pada Indikator Kinerja Program Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul (IKP 3) :**

Tabel III.1.9. Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2024					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.3 Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	94	96	94,7	94,6	94,1	94,1	100,1

Sumber data : Direktorat Kepelabuhanan dan Aplikasi SIRANI, Ditjen. Perhubungan Laut.



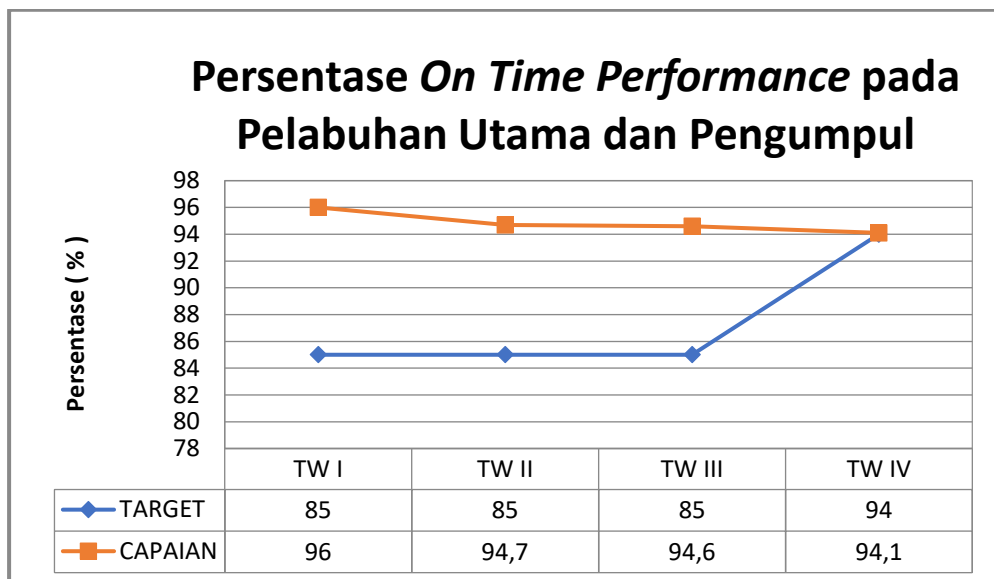
Adapun target *On Time Performance* pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul Tahun 2024 sebesar 94%. Pencapaian pada Triwulan I sebesar 96%, sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 94%.

Sedangkan pada pencapaian Triwulan II sebesar 94,7%, sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 111,4%.

Pada Pencapaian pada Triwulan III sebesar 94,6%, sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 111,3%.

Pada pencapaian pada Triwulan IV sebesar 94,1%, sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 100,1%. Pada Triwulan IV terdapat Reviu Perjanjian Kinerja terhadap target kinerja yang semula 85% menjadi 94% dengan justifikasi terhadap realisasi di atas target dari bulan Januari hingga September dan adanya penambahan anggaran.

Grafik III.1.3. Persentase *On Time Performance* pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul



Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan merupakan nilai rata-rata dari pencapaian *Waiting Time* (WT), *Approach Time* (AT), *Effective Time:Berth Time* (BT) terhadap standar yang ditetapkan pada pelabuhan utama yang diusahakan secara komersial di pelabuhan. Pencapaian kinerja di pelabuhan terdiri dari pencapaian kinerja pelayanan kapal (pencapaian *Waiting Time* (WT) dan pencapaian *Approach Time* (AT)) serta pencapaian kinerja di terminal (pencapaian *Effective Time : Berthing Time* (ET:BT)).

Kinerja di pelabuhan terdiri atas kinerja pelayanan kapal (*Waiting Time* (WT) dan *Approach Time* (AT)), untuk kinerja pelayanan di terminal berupa *Effective Time :Berthing Time* (ET:BT).

- i. Kinerja pelayanan kapal terdiri dari :



- **Waiting Time (WT)** merupakan selisih waktu antara waktu penetapan kapal masuk di area lego jangkar dengan waktu saat pandu naik ke atas kapal (*Pilot on Board/POB*) pada pelayanan kapal masuk ke pelabuhan. *Waiting Time (WT)* disajikan dalam satuan Jam.
  - **Approach Time (AT)** merupakan waktu perjalanan untuk kapal masuk dan/atau kapal keluar dari dan/atau ke pelabuhan. Untuk kapal masuk ke pelabuhan dihitung saat kapal mulai bergerak dari lokasi lego jangkar sampai saat ikat tali di tambatan (*first line*), sedangkan untuk kapal keluar dari pelabuhan dihitung mulai lepas tali (*last line*) sampai kapal mencapai area ambang luar (keluar dari area lego jangkar). *Approach Time (AT)* disajikan dalam satuan Jam.
- ii. Kinerja pelayanan di terminal berupa *Effective Time : Berthing Time (ET:BT)*
- **Effective Time :Berthing Time (ET:BT)** atau rasio waktu kerja kapal di tambatan merupakan perbandingan waktu kapal berkerja efektif di dermaga (terminal) dengan waktu kapal selama di tambatan dermaga (terminal). *Effective Time :Berthing Time (ET:BT)* disajikan dalam satuan Persentase (%).

Pencapaian kinerja di pelabuhan yang terdiri dari pencapaian *Waiting Time (WT)*, *Approach (AT)*, dan *Effective Time :Berthing Time (ET:BT)*, merupakan perbandingan capaian kinerja di pelabuhan dengan standar yang telah ditentukan. Adapun rumus untuk masing-masing unsur pencapaian kinerja sebagai berikut:

i. Pencapaian *Waiting Time (WT)*

$$\text{Pencapaian } WT \text{ Pelabuhan} = \frac{\text{Capaian } WT \text{ pada terminal/pelabuhan}}{\text{Standar } WT \text{ pada terminal/pelabuhan}} \times 100\%$$

enc

capaian *Approach Time (AT)*

$$\text{Pencapaian } AT \text{ Pelabuhan} = \frac{\text{Capaian } AT \text{ pada terminal/pelabuhan}}{\text{Standar } AT \text{ pada terminal/pelabuhan}} \times 100\%$$

iii. Pencapaian *Effective Time : Berthing Time (ET:BT)*

$$\text{Pencapaian } (ET:BT) = \frac{\text{Capaian } (ET:BT) \text{ pada terminal/pelabuhan}}{\text{Standar } (ET:BT) \text{ pada terminal/pelabuhan}} \times 100\%$$



Dengan demikian, **Rumus Perhitungan Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan** merupakan rata-rata dari Capaian atas

*Waiting Time (WT) + Approach Time (AT) + Effective Time : Berthing Time (ET:BT)*

Nilai WT dan AT diperoleh dari realisasi pelayanan pemanduan di pelabuhan. Ketersediaan Tenaga Pandu dan kondisi geografis alur pelayaran mempengaruhi tingkat pelayanan pandu. Permintaan pemanduan secara bersamaan namun tidak didukung oleh ketersediaan tenaga pandu akan menghambat capaian WT, sedangkan kondisi alur pelayaran yang berkelok serta arus pasang surut juga dapat menghambat capaian AT. Nilai ET: BT merupakan perbandingan waktu kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal (ET) dengan waktu kapal tambat di dermaga (BT). Pencapaian ET:BT sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca dan tenaga kerja di pelabuhan. Saat terjadi hujan, maka aktifitas kegiatan bongkar muat akan dihentikan sementara. Penggunaan tenaga kerja di pelabuhan masih dominan, sehingga aktifitas bongkar muat di pelabuhan terhambat dengan menurunnya produktivitas Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan. Realisasi Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan terdiri dari:

$$\text{Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan} = \frac{\text{Pencapaian WT} + \text{Pencapaian AT} + \text{Pencapaian (ET:BT)}}{3}$$

Realisasi Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan Per Bulan (OTP) terdiri dari:

$$\text{Pencapaian AT Pelabuhan} = \frac{92,2\%}{94\%} \times 100\% = 98,1\%$$

$$\text{Pencapaian WT Pelabuhan} = \frac{99,2\%}{94\%} \times 100\% = 105,5\%$$

$$\text{Pencapaian (ET:BT) Pelabuhan} = \frac{91,0\%}{94\%} \times 100\% = 96,8\%$$

Sehingga diperoleh:

$$\text{OTP Transportasi Laut} = \frac{\frac{95,2\% + 93,4\% + 100\% + 93,3\%}{4} + \frac{93\% + 93,3\% + 95\% + 93,9\%}{4}}{\frac{94,1\% + 92,7\% + 93,2\% + 92,3\%}{4}} = 94,1\%$$

$$\text{Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan} = \frac{98,1\% + 105,5\% + 96,8\%}{3} = 100,1\%$$

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah melakukan upaya - upaya dalam rangka meningkatkan Persentase Pencapaian Kinerja Pelayanan Pelabuhan dimasa mendatang sebagai berikut :



- i. Kegiatan Bimbingan Teknis Standar Kinerja Operasional Pelabuhan untuk meningkatkan angka realisasi yang tercatat;
- ii. Menghimbau UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk menerbitkan/merubah standar kinerja yang disesuaikan kondisi operasional pelabuhan;
- iii. Data diambil dari Aplikasi Sirani posisi 3 Januari 2025;
- iv. Melakukan penyesuaian terkait standarisasi layanan antar pelabuhan yang diberikan oleh pihak operator pelabuhan.

**b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Program Persentase *On Time Performance* pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul (IKP 3) Ketiga (3) :**

Adapun realisasi kinerja Persentase *On Time Performance* pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 belum mencapai target yang telah ditetapkan karena *recovery* dari kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada pelayanan masing-masing terminal di pelabuhan yang menyebabkan adanya perubahan layanan yang diberikan. Untuk lebih meningkatkan Persentase Pencapaian Kinerja Pelayanan Pelabuhan setiap tahunnya Direktorat Jenderal Perhubungan laut telah melakukan himbauan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk menerbitkan/merubah standar kinerja yang disesuaikan kondisi operasional pelabuhan.

**Tabel III.1.10. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketiga (3)**

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	KRITERIA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase <i>On Time Performance</i> pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	Target	81	82	83	84	94
		Realisasi	97,22	104,19	79	83	94,1
		Kinerja (%)	120,02	127,06	95,18	98,80	100,1

Sumber data : Direktorat Kepelabuhanan, Ditjen. Perhubungan Laut.



c) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Persentase *On Time Performance* pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul (IKP 3) Ketiga (3) :**

Adapun berdasarkan Reviu Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 pada Persentase *On Time Performance* pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 belum mencapai target yang telah ditetapkan karena *recovery* dari kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada pelayanan masing-masing terminal di pelabuhan.

**Tabel III.1.11. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketiga (3)**

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase <i>On Time Performance</i> pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	Target	81	82	83	84	85
		Realisasi	97,22	104,19	79	83	94,1
		Kinerja (%)	120,02	127,06	95,18	98,80	110,70

Sumber data : Direktorat Kepelabuhanan, Ditjen. Perhubungan Laut

Berdasarkan data Performa Penanganan Kargo dan Kapal untuk muatan curah kering selama Kuartal I tahun 2024, Indonesia mencatatkan capaian sebagai berikut:

1. Kegiatan muat sebesar 17,7 Ton/menit (meningkat 2,9% dari capaian Tahun 2022), nilai rerata capaian Dunia untuk kegiatan muat sebesar 15,8 Ton/menit (meningkat 5,4% dari capaian Tahun 2022);
2. Kegiatan bongkar sebesar 11,3 Ton/menit (meningkat 1% dari capaian Tahun 2022), nilai rerata capaian Dunia untuk kegiatan muat sebesar 11,7 Ton/menit (meningkat 2,8% dari capaian Tahun 2022);
3. Rata rata waktu tunggu untuk muat (*waiting time to load*) selama 76,2 jam (lebih lambat 5,5% dari capaian Tahun 2022), nilai rerata capaian di seluruh dunia selama 69,3 jam (lebih lambat 8,1% dari capaian Tahun 2022);





4. Rata rata waktu tunggu untuk bongkar (*waiting time to discharge*) selama 54,2 jam (lebih cepat 22,8% dari capaian Tahun 2022), nilai rerata capaian di seluruh dunia selama 52,5 jam (lebih lambat 18% dari capaian Tahun 2022).

### c. SASARAN PROGRAM ( 3 )

Sasaran Program **Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Laut** terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Program dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

- 4) Indikator Kinerja Program (IKP) Keempat (4) adalah “**Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut**”

- a) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target PK Revisi Tahun 2024 Pada Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut (IKP 4) :**

Tabel III.1.12. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut

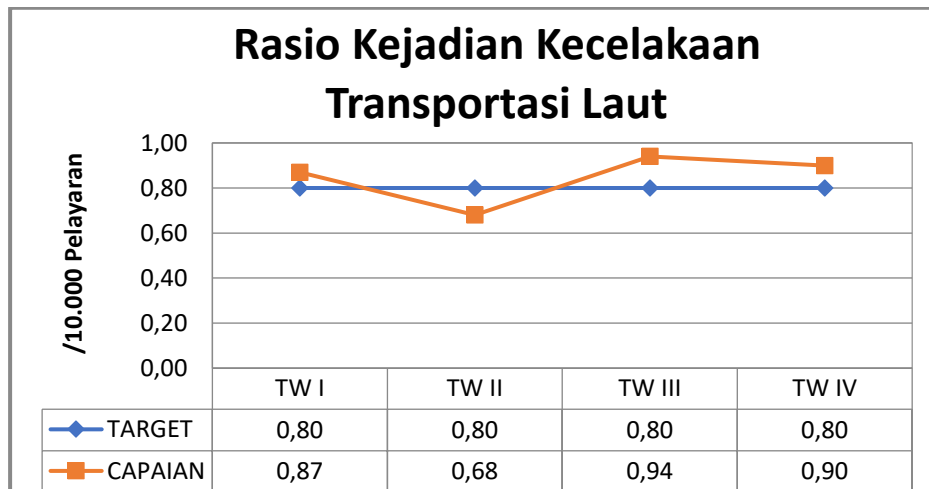
INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2024					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	0,80	0,87	0,68	0,94	0,90	0,90	87,5

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun target Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut target tahun 2024 sebesar 0,80/10.000 Pelayaran. Terlihat realisasi pada Triwulan I sebesar 0,87 dengan persentase pencapaian terhadap target sebesar 91,25%, sedangkan pada triwulan II terdapat realisasi sebesar 0,68 sehingga prosentase sebesar 115,15%. Pada triwulan III terdapat realisasi sebesar 0.94 dengan persentase pencapaian terhadap target sebesar 82.50%. Pada triwulan IV terdapat realisasi sebesar 0,90 dengan persentase pencapaian terhadap target sebesar 87,50%.



Grafik III.1.4. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut



Realisasi capaian rasio kejadian kecelakaan ini dihitung berdasarkan perhitungan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut} = \frac{\Sigma \text{Kejadian Kecelakaan}}{\Sigma \text{SPB yang diterbitkan}} \times 10.000 \text{ Pelayaran}$$

$$\begin{aligned} \text{Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut} &= \frac{128}{1.428.955} \times 10.000 \\ &= 0,90 \end{aligned}$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(0,80 - (0,90 - 0,80))}{0,80} \times 100\% = 97,50$$

Pada tahun 2024 jumlah total Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan pada Triwulan I sebanyak **376.436** dokumen dengan jumlah kejadian kecelakaan kapal disebabkan oleh alam sebesar 22 kejadian, manusia sebesar 3 kejadian dan teknis 8 kejadian, yang berarti setiap penerbitan 10.000 SPB maka jumlah Rasio Kejadian Kecelakaan yang terjadi sebanyak 0,87 Kecelakaan/ 10.000 *freight* (pelayaran) sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar 91,25;

Pada Triwulan II sebanyak **374.865** dokumen dengan jumlah kejadian kecelakaan kapal disebabkan oleh alam sebesar 7 kejadian, manusia sebesar 0 kejadian dan teknis 11 kejadian, yang berarti setiap penerbitan 10.000 SPB maka jumlah Rasio Kejadian Kecelakaan yang terjadi sebanyak 0,68 Kecelakaan/ 10.000 *freight* (pelayaran) sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar 115.15%;



Pada Triwulan III sebanyak **287.690** dokumen dengan jumlah kejadian kecelakaan kapal disebabkan oleh alam sebesar 19 kejadian, manusia sebesar 3 kejadian dan teknis 25 kejadian, yang berarti setiap penerbitan 10.000 SPB maka jumlah Rasio Kejadian Kecelakaan yang terjadi sebanyak 0,95 Kecelakaan/ 10.000 *freight* (pelayaran) sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar 81,25%;

Pada Triwulan IV sebanyak **273.584** dokumen dengan jumlah kejadian kecelakaan kapal disebabkan oleh alam sebesar 11 kejadian, manusia sebesar 3 kejadian dan teknis 16 kejadian, yang berarti setiap penerbitan 10.000 SPB maka jumlah Rasio Kejadian Kecelakaan yang terjadi sebanyak 0,90 Kecelakaan/ 10.000 *freight* (pelayaran) sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar 87,5%.

Dalam rangka mengurangi rasio kejadian kecelakaan transportasi laut, sub sektor perhubungan laut telah melakukan beberapa program/ kegiatan antara lain sebagai berikut:

- i. Penerbitan maklumat pelayaran tentang peringatan cuaca *extrim* secara berkala;
- ii. Pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawasan keselamatan pelayaran secara berkala;
- iii. Evaluasi Monitoring Perwira Jaga Dalam Penerbitan SPB;
- iv. Asistensi pemeriksaan kecelakaan kapal secara bertahap ke UPT Ditjen Hubla;
- v. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pemeriksaan kecelakaan kapal ke UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- vi. Pelaksanaan Kegiatan Uji Petik Pemeriksaan Kapal menjelang Lebaran, Natal dan Tahun Baru;
- vii. Peningkatan pelayanan kapal terhadap kapal-kapal penumpang tradisional dengan meningkatkan standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan di wilayah unit pelaksana teknis;
- viii. Sosialisasi Keselamatan Pelayaran ke beberapa UPT yang banyak melayani Kapal Pelayaran rakyat.

**Tabel III.1.13. Jumlah Kejadian Kecelakaan Dan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Tahun 2024**

NO	BULAN	FAKTOR PENYEBAB			TRIWULANAN	JUMLAH SPB 2024	
		ALAM	MANUSIA	TEKNIS		BULANAN	TRIWULANAN
1	Januari	10	2	2	33	128.849	<b>376.436</b>
2	Februari	2	0	2		125.664	
3	Maret	10	1	4		121.923	
4	April	0	0	5	18	150.347	<b>374.865</b>
5	Mei	3	0	1		113.989	
6	Juni	4	0	5		110.529	
7	Juli	4	0	5	47	119.511	<b>287.690</b>
8	Agustus	9	2	11		118.341	
9	September	6	1	9		49.838	
10	Oktober	2	1	3	30	120.722	<b>389.964</b>
11	November	1	0	2		104.705	
12	Desember	8	2	11		164.537	
<b>TOTAL</b>		<b>59</b>	<b>9</b>	<b>60</b>	<b>128</b>		<b>1.428.955</b>

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut.



Tabel III.1.14. Jumlah Kejadian Kecelakaan Tahun 2024

No	Lokasi Kecelakaan Kapal	Jumlah Kecelakaan	Penyebab	Tanggal Kejadian
1	Ksop Kelas I Samarinda	1	Alam	Januari
2	Upp Kelas II Pemenang	1	Teknis	Januari
3	Upp Kelas II Benete	1	Alam	Januari
4	Ksop Kelas I Tanjung Balai Karimun	3	Alam	Januari
5	Ksop Utama Belawan	1	Manusia	Januari
6	Upp Kelas III Wonreli	1	Alam	Januari
7	Ksop Kelas II Pekanbaru	1	Alam	Januari
8	Ksop Utama Makassar	1	Alam	Januari
9	Upp Kelas III Sapeken	1	Alam	Januari
10	Ksop Kelas I Bitung	1	Teknis	Januari
11	Ksop Kelas I Samarinda	1	Teknis	Januari
12	Ksop Kelas I Samarinda	1	Alam	Januari
13	Ksop Khusus Batam	1	Alam	Februari
14	Ksop Kelas III Labuhan Bajo	1	Teknis	Februari
15	Ksop Kelas I Bitung	1	Teknis	Februari
16	Ksop Utama Tanjung Perak	1	Alam	Februari
17	Upp Kelas II Tanjung Selor	1	Alam	Maret
18	Ksop Kelas I Pontianak	1	Alam	Maret
19	Upp Kelas III Bawean	1	Alam	Maret
20	Upp Kelas III Labuhan	1	Alam	Maret
21	Upp Kelas III Labuhan	1	Teknis	Maret
22	Ksop Kelas III Kupang	1	Alam	Maret
23	Ksop Utama Tanjung Perak	1	Teknis	Maret
24	Upp Kelas III Pelabuhan Ratu	1	Alam	Maret
25	Ksop Kelas I Sorong	1	Alam	Maret
26	Upp Kelas II Benete	1	Alam	Maret
27	Ksop Kelas III Sunda Kelapa	1	Teknis	Maret
28	Ksop Kelas IV Pangkalbalam	1	Teknis	Maret
29	Upp Kelas II Luwuk	1	Alam	Maret
30	Upp Kelas II Tanjung Beringin	1	Alam	Maret
31	Ksop Kelas II Gresik	1	Manusia	Maret
32	Ksop Kelas II Marunda	1	Teknis	April
33	Upp Kelas II Nusa Penida	1	Teknis	April
34	Upp Kelas I Tanjung Uban	1	Teknis	April
35	Ksop Kelas III Kupang	1	Teknis	April
36	Upp Kelas III Sapeken	1	Teknis	April
37	Upp Kelas I Tobelo	1	Alam	Mei
38	Ksop Kelas II Kotabaru	1	Alam	Mei
39	Ksop Kelas IV Tembilahan	1	Teknis	Mei
40	Upp Kelas II Laiwui	1	Alam	Mei



LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024

41	Ksop Kelas IV Selatpanjang	1	Alam	Juni
42	Upp Kelas II Saumlaki	1	Teknis	Juni
43	Ksop Utama Makassar	1	Teknis	Juni
44	Upp Kelas II Bintuni	1	Alam	Juni
45	Upp Kelas II Nusa Penida	1	Teknis	Juni
46	Ksop Kelas II Tanjung Balai Karimun	1	Teknis	Juni
47	Upp Kelas III Masalembu	1	Alam	Juni
48	Ksop Kelas IV Kumai	1	Teknis	Juni
49	Ksop Kelas IV Kep Seribu	1	Alam	Juni
50	Ksop Kelas III Ranggailung	1	Teknis	Juli
51	Ksop Kelas I Balikpapan	1	Alam	Juli
52	Ksop Kelas IV Pangkalbalam	1	Teknis	Juli
53	Upp Kelas II Tual	1	Teknis	Juli
54	Upp Kelas II Luwuk	1	Alam	Juli
55	Upp Kelas II Buli	1	Alam	Juli
56	Ksop Kelas II Ternate	1	Teknis	Juli
57	Ksop Kelas II Patimban	1	Alam	Juli
58	Ksop Kelas I Balikpapan	1	Teknis	Juli
59	Ksop Kelas IV Kuala Tungkal	1	Teknis	Agustus
60	Ksop Kelas IV Kumai	1	Teknis	Agustus
61	Upp Kelas III Masalembu	1	Alam	Agustus
62	Ksop Kelas I Pontianak	1	Manusia	Agustus
63	Ksop Kelas IV Bakauheni	1	Teknis	Agustus
64	Ksop Kelas I Banjarmasin	1	Teknis	Agustus
65	Ksop Kelas IV Kepulauan Seribu	1	Teknis	Agustus
66	Upp Kelas II Tarempa	1	Alam	Agustus
67	Ksop Kelas I Ambon	1	Manusia	Agustus
68	Ksop Kelas IV Padangbai	1	Teknis	Agustus
69	Ksop Kelas III Labuhan Bajo	1	Alam	Agustus
70	Ksop Kelas IV Waingapu	1	Alam	Agustus
71	Upp Kelas III Indramayu	1	Alam	Agustus
72	Ksop Kelas I Bitung	1	Teknis	Agustus
73	Ksop Kelas I Tanjung Emas	1	Teknis	Agustus
74	Upp Kelas III Labuhan	1	Alam	Agustus
75	Ksop Kelas II Palembang	1	Teknis	Agustus
76	Upp Kelas III Labuhan	1	Alam	Agustus
77	Upp Kelas II Namlea	1	Teknis	Agustus
78	Ksop Kelas IV Muntok	1	Alam	Agustus
79	Upp Kelas II Luwuk	1	Alam	Agustus
80	Ksop Kelas III Labuhan Bajo	1	Teknis	Agustus
81	Ksop Kelas IV Muntok	1	Alam	September
82	Ksop Kelas IV Selat Panjang	1	Teknis	September
83	Ksop Kelas I Pontianak	1	Teknis	September
84	Upp Kelas III Saketa	1	Teknis	September



LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024

85	Upp Kelas II Menggala	1	Teknis	September
86	Upp Kelas II Saumlaki	1	Teknis	September
86	Ksop Kelas II Gresik	1	Manusia	September
87	Ksop Kelas I Balikpapan	1	Alam	September
88	Ksop Utama Tg. Perak	1	Teknis	September
89	Upp Kelas II Branta	1	Alam	September
90	Upp Kelas III Labuhan	1	Alam	September
91	Ksop Kelas IV Bima	1	Alam	September
92	Ksop Khusus Batam	1	Teknis	September
93	Ksop Kelas IV Ende	1	Teknis	September
94	Ksop Kelas II Palembang	1	Alam	September
95	Upp Kelas II Linau Bintuhan	1	Teknis	September
96	Upp Kelas III Labuan Uki	1	Teknis	Oktober
97	Ksop Kelas II Labuan Bajo	1	Teknis	Oktober
99	Upp Kelas II Tanjung Redeb	1	Manusia	Oktober
100	Upp Kelas II Macini Baji	1	Alam	Oktober
101	Ksop Kelas IV Pangkalbalam	1	Teknis	Oktober
102	Upp Kelas III Belang-Belang	1	Alam	Oktober
103	Upp Kelas III Pulau Bunyu	1	Alam	November
104	Ksop Kelas III Sunda Kelapa	1	Teknis	November
105	Ksop Kelas I Palembang	1	Teknis	November
106	Upp Kelas III Labuhan	1	Teknis	Desember
107	Upp Kelas III Selayar	1	Alam	Desember
108	Ksop Kelas I Banjarmasin	1	Teknis	Desember
109	Ksop Kelas I Banjarmasin	1	Teknis	Desember
110	Ksop Kelas III Tanjung Pakis	1	Alam	Desember
111	Upp Kelas II Tulehu	1	Alam	Desember
112	Ksop Kelas IV Panarukan	1	Teknis	Desember
113	Upp Kelas III Masalembu	1	Alam	Desember
114	Upp Kelas III Pelabuhan Ratu	1	Alam	Desember
115	Ksop Kelas I Banten	1	Teknis	Desember
116	Upp Kelas I Tobelo	1	Alam	Desember
117	Upp Kelas II Luwuk	1	Alam	Desember
118	Ksop Kelas III Kupang	1	Teknis	Desember
119	Ksop Kelas III Labuan Bajo	1	Manusia	Desember
120	Upp Kelas III Susoh	1	Alam	Desember
121	Ksop Kelas II Ternate	1	Manusia	Desember
122	Ksop Khusus Batam	1	Teknis	Desember
123	Ksop Kelas II Teluk Bayur	1	Teknis	Desember
124	Upp Kelas III Sapeken	1	Teknis	Desember
125	Upp Kelas III Gilimanuk	1	Teknis	Desember
126	Upp Kelas II Raja Ampat	1	Teknis	Desember
Total		128		

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut.



Faktor Penyebab terjadinya kecelakaan :

- i. Faktor Manusia : Human Error, kesalahan menerapkan standar profesi kepelautan
- ii. Faktor Alam : Cuaca Buruk
- iii. Faktor Teknis : Konsleting kelistrikan, rusaknya kemudi kapal, kerusakan lambung kapal

**b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut (IKP 4) Keempat (4) :**

Adapun realisasi kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut pada Tahun 2024 belum mencapai target yang telah ditetapkan karena terdapat kejadian kecelakaan pada Transportasi Laut yang disebabkan oleh faktor alam, manusia dan teknis. Untuk mengurangi kejadian kecelakaan pada Transportasi Laut setiap tahunnya Direktorat Jenderal Perhubungan laut telah melakukan peningkatan pelayanan kapal terhadap kapal-kapal penumpang tradisional dengan meningkatkan standard keselamatan, keamanan dan pelayanan di setiap wilayah Unit Pelaksana Teknis (UPT).

**Tabel III.1.15. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keempat (4)**

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	KRITERIA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	Target	1,23	1,21	1,09	0,97	0,80
		Realisasi	1,02	1,14	0,99	0,84	0,90
		Kinerja (%)	117,07	105,76	109,17	113,04	87,5

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut

**c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut (IKP 4) Keempat (4)**

Adapun berdasarkan Reviu Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 pada Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut pada Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 belum mencapai target yang telah ditetapkan karena terdapat kejadian kecelakaan pada Transportasi Laut yang disebabkan oleh faktor alam, manusia dan teknis.



**Tabel III.1.16. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keempat (4)**

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	Target	1,23	1,21	1,09	0,97	0,85
		Realisasi	1,02	1,14	0,99	0,84	0,90
		Kinerja (%)	82,92	94,21	90,82	86,59	87,5

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut

- 5) Indikator Kinerja Program (IKP) Kelima (5) adalah **“Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut”**
- a) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target PK Revisi Tahun 2024 Pada Indikator Kinerja Program Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut (IKP 5) Kelima (5) :**

**Tabel III.1.17. Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut**

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2024					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.5	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/100.000 Pelayaran	0,26	0	0	0,1	0,1	0,1	187,50

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut

Adapun target Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut sesuai dengan target tahun 2024 sebesar 0,26/100.000 Pelayaran. Pada Triwulan I dan Triwulan II realisasi gangguan keamanan sebesar 0 kejadian, sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 200% dan sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena belum ada pelaporan dari Ditjen Hubla terkait gangguan keamanan di area pelabuhan ataupun di atas kapal.

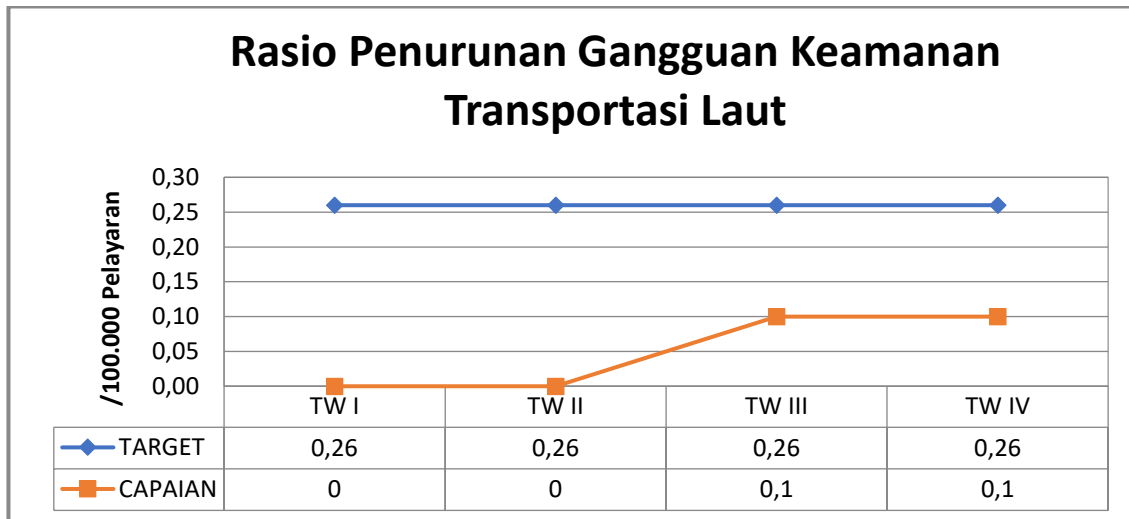




Pada Triwulan III terdapat 1 kejadian Perompakan Kapal TB.Royal TB 17 di Selatan Perairan Tanjung Malatayur Kab. Pulang Pisau sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 187,50%.

Pada Triwulan IV tidak terdapat gangguan keamanan, sehingga prosentase capaian terhadap target sampai dengan Triwulan IV sebesar 187, 50% dikarenakan pada Triwulan III terdapat 1 Kejadian Perompakan Kapal TB.Royal TB 17 di Selatan Perairan Tanjung Malatayur Kab. Pulang Pisau.

Grafik III.1.5. Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut



Pada Triwulan I tidak terjadi gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi laut. dan Surat Perintah Berlayar yang diterbitkan adalah berjumlah 376.436, sehingga realisasi mencapai 200%. Adapun dasar menggunakan perkalian 100.000 SPB dari manual IKP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pada Triwulan II tidak terjadi gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi laut. dan Surat Perintah Berlayar yang diterbitkan adalah berjumlah 751.301 SPB, sehingga realisasi mencapai 200%. Adapun dasar menggunakan perkalian 100.000 SPB dari manual IKP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pada Triwulan III terjadi 1 gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi laut. dan Surat Perintah Berlayar yang diterbitkan adalah berjumlah **1.031.835** SPB, sehingga realisasi mencapai 187.5%. Adapun dasar menggunakan perkalian 100.000 SPB dari manual IKP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pada Triwulan IV tidak terjadi gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi laut. dan Surat Perintah Berlayar yang diterbitkan adalah berjumlah **1.312.575** SPB. Adapun dasar menggunakan perkalian 100.000 SPB dari manual IKP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,



$$\text{Rasio Gangguan Keamanan Transportasi Laut} = \frac{1 \text{ kejadian}}{1.031.835} \times 100.000 \text{ SPB} = 0,1$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(0,26 - (0,10 - 0,26))}{0,26} \times 100\%$$

$$= 187,5$$

Menurut Amandemen *Safety Of Life At Sea (SOLAS)* pada Chapter XI-2 tentang *International Ship And Port Facility Security Code (ISPS Code)*/Keamanan *Maritime* yang termasuk Gangguan Keamanan adalah sebagai berikut :

- i. Perusakan terhadap atau penghancuran terhadap atau penghancuran terhadap kapal atau fasilitas pelabuhan contohnya dengan alat peledak, pembakaran dengan sengaja, tindakan sabotase atau corat coret;
- ii. Pembajakan atau penyitaan kapal atau penyanderaan orang di atas kapal;
- iii. Merusak muatan, peralatan kapal yang perlu atau sistemnya, tempat penyimpanan kapal;
- iv. Keluar masuk secara tidak sah atau menggunakannya termasuk kehadiran penumpang gelap;
- v. Penyelundupan senjata atau peralatannya termasuk senjata pemusnah massal;
- vi. Menggunakan kapal untuk membawa semua yang bermaksud menyebabkan peristiwa keamanan dan atau peralatannya;
- vii. Menggunakan kapal itu sendiri sebagai senjata atau sarana untuk membuat kerusakan atau penghancuran;
- viii. Penyerangan dari arah laut ketika di Dermaga atau di tempat labuh;
- ix. Penyerangan ketika di laut.

Dalam rangka mengurangi gangguan keamanan transportasi laut langkah-langkah yang dilakukan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai yaitu:

- i. Melaksanakan verifikasi manajemen keamanan fasilitas pelabuhan setiap 2.5 tahun sekali;
- ii. Melaksanakan verifikasi keempat (tambahan) manajemen keamanan fasilitas pelabuhan yang dilaksanakan sewaktu-waktu;
- iii. Menginstruksikan UPT untuk melaksanakan inspeksi bulanan sesuai dengan SE Dirjen Hubla No UM. 008/45/15/DJPL-14;
- iv. Menginstruksikan agar faspel melaksanakan training/ sosialisasi keamanan fasilitas pelabuhan sesuai dengan SE Dirjen Hubla No. UM.003/17/14/DJPL-15;
- v. Mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-DJPL 16 tahun 2024 tanggal 13 Mei 2024 Tentang Pengembangan Penilaian Dan Prosedur Keamanan Siber (*Cyber Security*) Pada Manajemen



Keamanan Kapal Dan Fasilitas Pelabuhan Untuk Penanganan Resiko Pada Sistem Jaringan Maya (*Cyber Risk Management*).

- vi. Mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.DJPL 690 Tahun 2023 Tanggal 27 Oktober 2023 Tentang Prosedur Dan Tata Cara Pelaksanaan Training, Drill dan Exercise Sesuai Kode Internasional Keamanan Kapal Dan Fasilitas Pelabuhan (*International Ship And Port Facility Security Code*)

Adapun upaya yang sudah dilakukan Ditjen Perhubungan Laut dalam Pencegahan Gangguan Keamanan Pelayaran sebagai berikut :

- i. Patroli rutin yang dilaksanakan oleh unsur penegakan hukum oleh UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut baik di wilayah pelabuhan maupun perairan;
- ii. Melakukan patroli gabungan dengan unsur penegakan hukum dari Institusi Polri dan TNI;
- iii. Pengadaan senjata api di atas Kapal Patroli;
- iv. *Exercise* penggunaan senjata api patroli;
- v. Pembangunan Kapal Patroli KPLP.

**b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Program Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut (IKP 5) Kelima (5) :**

Adapun realisasi kinerja Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 belum mencapai target yang telah ditetapkan karena adanya gangguan keamanan pada pelayanan Jasa Transportasi Laut.

**Tabel III.1.18. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Program Kelima (5)**

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	KRITERIA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/100.000 Pelayaran	Target	0,3	0,29	0,28	0,27	0,26
		Realisasi	0	0	0	0,18	0,1
		Kinerja (%)	200	200	200	133,33	187,50

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut



- c) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut (IKP 5) Kelima (5) :**

Adapun berdasarkan Reviu Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 pada Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 karena belum mencapai target yang telah ditetapkan karena adanya gangguan keamanan pada pelayanan Jasa Transportasi Laut

**Tabel III.1.19. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kelima (5)**

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/100.000 Pelayaran	Target	0,3	0,29	0,28	0,27	0,26
		Realisasi	0	0	0	0,18	0,1
		Kinerja (%)	200	200	200	133,33	187,50

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut

- 6) Indikator Kinerja Program (IKP) Keenam (6) adalah **“Tingkat Keandalan Kenavigasian”**
- a) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target PK Revisi Tahun 2024 Pada Indikator Kinerja Program Tingkat Keandalan Kenavigasian (IKP 6) Keenam:**

**Tabel III.1.20. Tingkat Keandalan Kenavigasian**

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2024					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.6 Tingkat Keandalan Kenavigasian	%	97,25	97,03	95,24	95,25	95,22	95,22	97,91

Sumber data : Direktorat Kenavigasian, Ditjen. Perhubungan Laut



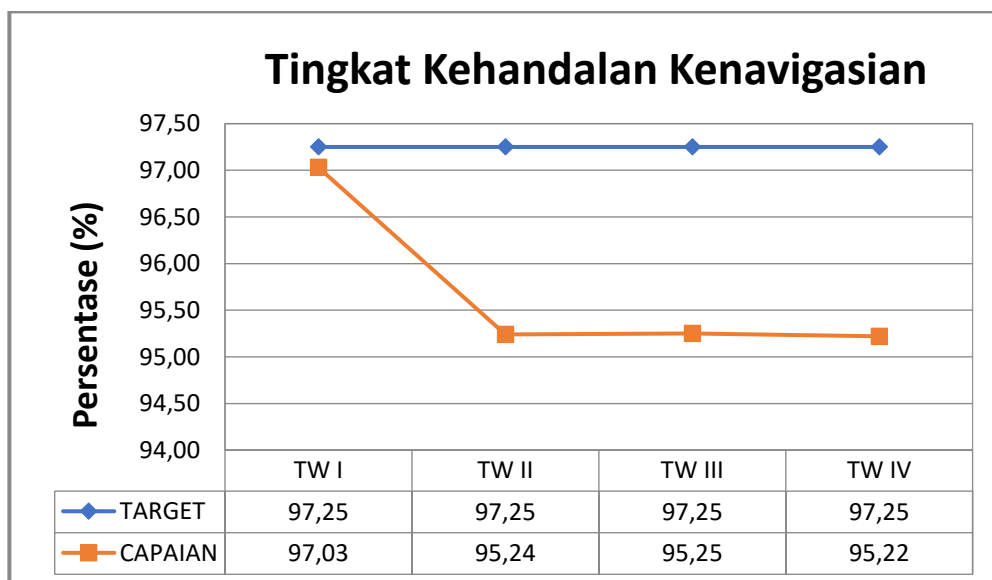
Adapun sesuai dengan target tahun 2024 sebesar 97,25%. Realisasi pada Triwulan I sebesar 96,03%, sehingga prosentase terhadap target sebesar 99,77%.

Realisasi pada Triwulan II sebesar 95,24%, sehingga prosentase terhadap target sebesar 97,94% dan belum memenuhi target yang telah ditetapkan terdapat beberapa kerusakan dari fasilitas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan VTS yang diakibatkan karena adanya kekurangan anggaran untuk biaya pemeliharaan.

Realisasi pada Triwulan III sebesar 95,25%, sehingga prosentase terhadap target sebesar 97,94%. dan belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi pada Triwulan IV sebesar 95,22%, sehingga prosentase terhadap target sebesar 97,91% dan belum memenuhi target yang telah ditetapkan karena terdapat beberapa kerusakan dari fasilitas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan VTS yang diakibatkan karena adanya kekurangan anggaran untuk biaya pemeliharaan.

Grafik III.1.6. Tingkat Kehandalan Kenavigasian



Tingkat Kehandalan Kenavigasian dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Tingkat Kehandalan Kenavigasian

$$= \frac{\text{Tingkat Kehandalan SBNP} + \text{Tingkat Kehandalan Telkompel}}{2}$$

$$= \frac{92,60 \% + 97,83\%}{2}$$

$$= 95,22 \%$$



Tingkat Keandalan SROP dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{hari SROP yang berfungsi dalam 1 tahun}}{\sum \text{SROP eksisting} \times 365 \text{ hari}}$$

$$\text{Tingkat Keandalan SROP} = \frac{28.938}{159 \times 366} \times 100\% = \frac{58.194}{58.194} = 100\%$$

Tingkat Keandalan VTS dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{\sum \text{hari VTS berfungsi dalam 1 Tahun}}{\sum \text{VTS eksisting} \times 365 \text{ hari}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Keandalan VTS} = \frac{8.052}{23 \times 366} \times 100\% = \frac{8.050}{8.418} = 95,65\%$$

Adapun sesuai dengan target tahun 2024 sebesar 97,25%. Realisasi pada Triwulan I sebesar 96,33% sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 99,77% dan belum memenuhi target yang ditetapkan karena terdapat beberapa kerusakan dari fasilitas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan VTS yang diakibatkan karena adanya kekurangan anggaran untuk biaya pemeliharaan. Jumlah SBNP yang bersuar dari triwulan I tahun 2024 sebanyak 5.087 unit, terdiri dari 2.991 milik DJPL dan 2.123 milik non DJPL. Jumlah Hari Kelainan SBNP (hari dimana SBNP tidak dapat beroperasi) milik DJPL = 17.522 hari.

Realisasi pada Triwulan II sebesar 95,24% sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 97,94% dan belum memenuhi target yang ditetapkan karena terdapat beberapa kerusakan dari fasilitas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan VTS yang diakibatkan karena adanya kekurangan anggaran untuk biaya pemeliharaan. Jumlah SBNP yang bersuar dari triwulan II tahun 2024 sebanyak 5.010 unit, terdiri dari 2.986 milik DJPL dan 2.024 milik non DJPL. Jumlah Hari Kelainan SBNP (hari dimana SBNP tidak dapat beroperasi) milik DJPL = 66.914 hari.

Realisasi pada Triwulan III sebesar 95,25% sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 97,94% dan belum memenuhi target yang ditetapkan karena terdapat beberapa kerusakan dari fasilitas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan VTS yang diakibatkan karena adanya kekurangan anggaran untuk biaya pemeliharaan. Jumlah SBNP yang bersuar dari triwulan III tahun 2024 sebanyak 5.312 unit, terdiri dari 3.039 milik DJPL dan 2.273 milik non DJPL. Jumlah Hari Kelainan SBNP (hari dimana SBNP tidak dapat beroperasi) milik DJPL = 168.664 hari.

Realisasi pada Triwulan IV sebesar 95,22% sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 97,91% dan belum memenuhi target yang ditetapkan karena terdapat beberapa kerusakan dari fasilitas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan VTS yang diakibatkan karena adanya kekurangan



anggaran untuk biaya pemeliharaan. Jumlah SBNP yang bersuar dari triwulan IV tahun 2024 sebanyak 5.333 unit, terdiri dari 3.048 milik DJPL dan 2.085 milik non DJPL. Jumlah Hari Kelainan SBNP (hari dimana SBNP tidak dapat beroperasi) milik DJPL = 144.755 hari.

Adapun Persentase kelainan SBNP hingga saat ini sebagai berikut Adapun Persentase kelainan SBNP hingga saat ini sebagai berikut:

$$\frac{\text{Hari Kelainan}}{365 \text{ hari} \times \sum \text{SBNP Bersuar}} \times 100 \% = \frac{144.755}{366 \text{ hari} \times 5.333} \times 100 \% = 7,40\%$$

Sehingga Tingkat Keandalan SBNP adalah  $100\% - 7,40\% = 92,60\%$ .

Sedangkan Tingkat Keandalan Telkompel dapat diperoleh dari rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Keandalan Telkompel} &= \frac{\text{Tingkat Keandalan SROP} + \text{Tingkat Keandalan VTS}}{2} \\ &= \frac{100 \% + 95,65 \%}{2} \\ &= 97,83 \% \end{aligned}$$

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kenavigasian telah melakukan upaya – upaya untuk Peningkatkan Keandalan Kenavigasian sebagai berikut :

- i. Direktorat Kenavigasian telah melakukan kajian teknis terkait kondisi peralatan telekomunikasi pelayaran dan sarana bantu navigasi pelayaran yang mengalami kerusakan untuk menjadi dasar pengusulan anggaran tahun berikutnya berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Peralatan;
- ii. Melakukan Pemeliharaan SBNP dari masing – masing UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan laut yang mengalami kerusakan;
- iii. Mengupayakan dipenuhinya kebutuhan anggaran untuk meningkatkan keandalan baik SBNP maupun Telekomunikasi Pelayaran.

**b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Program Tingkat Keandalan Kenavigasian (IKP 6) Keenam :**

Adapun realisasi kinerja Tingkat Keandalan Kenavigasian pada Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 belum memenuhi target yang telah ditetapkan karena keterbatasan anggaran terdapat



beberapa kerusakan dari fasilitas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan VTS sehingga berdampak pada Tingkat Keandalan Kenavigasian.

**Tabel III.1.21. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keenam (6)**

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	KRITERIA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Keandalan Kenavigasian	%	Target	98	97,25	97,75	97,75	97,25
		Realisasi	98,18	97,95	96,33	95,13	95,22
		Kinerja (%)	100,18	100,72	98,55	97,13	97,91

Sumber data : Direktorat Kenavigasian, Ditjen. Perhubungan Laut.

**c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Tingkat Keandalan Kenavigasian (IKP 6) Keenam (6) :**

Adapun realisasi kinerja Tingkat Keandalan Kenavigasian pada Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 belum memenuhi target yang telah ditetapkan karena keterbatasan anggaran untuk biaya pemeliharaan.

**Tabel III.1.22. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keenam (6)**

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
IKP.6	Tingkat Keandalan Kenavigasian	%	Target	96,5	97,25	97,75	98,25	99
			Realisasi	98,18	97,95	96,33	95,13	95,22
			Kinerja (%)	101,74	100,72	98,55	96,82	96,18

Sumber data : Direktorat Kenavigasian Laut, Ditjen. Perhubungan Laut





#### d. SASARAN PROGRAM ( 4 )

Sasaran Program **Meningkatnya Kinerja Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Laut** terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Program dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

7) Indikator Kinerja Program (IKP) Ketujuh (7) adalah **“Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)”**

a) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target PK Revisi Tahun 2024 Pada Indikator Kinerja Program Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M) (IKP 7) Ketujuh:**

Tabel III.1.23. Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2024					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.7	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)	Rasio	1	0,964	0,993	0,998	1	1	100

Sumber data : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen. Perhubungan Laut.

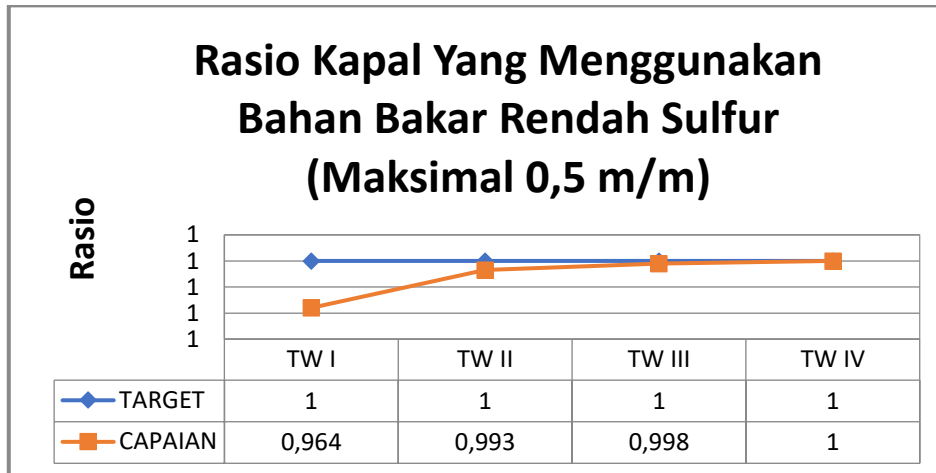
Adapun target Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M) Tahun 2024 Rasio sebesar 1 sedangkan pencapaian Triwulan I sebesar 0,964 rasio. Persentase pencapaian terhadap keseluruhan target saat ini sebesar 96,4%.

Pada Triwulan II tercapat sebesar 0,993 rasio dan kinerja terhadap target sebesar 99,3% dan pada Triwulan III tercapai sebesar 0,998 sehingga prosentase capaian kinerja terhadap target sebesar 99,8% Capaian tersebut belum memenuhi target tahunan yang ditetapkan karena penerbitan sertifikat pencegahan pencemaran dilakukan sepanjang tahun 2024, hal ini sejalan dengan banyaknya kapal yang melakukan pembaruan sertifikat pencegahan pencemaran dikarenakan habisnya masa berlaku sertifikat, sehingga adanya sertifikat yang baru harus memenuhi ketentuan yang saat ini berlaku.

Untuk Triwulan IV indikator telah tercapai sebesar 1 dan memiliki persentase terhadap target sebesar 100%. Realisasi tersebut telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan catatan terdapat 4 pengajuan sertifikat pencegahan pencemaran yang terbit pada awal bulan berikutnya.



Grafik III.1.7. Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)



Rumus perhitungan:

Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)

$$= \frac{\text{Jumlah sertifikat pencegahan pencemaran (IAPP dan SNPP)}}{\text{Jumlah kapal berbendera Indonesia > 400GT yang terdaftar}}$$

Tabel III.1.24. Jumlah Sertifikat Yang Diterbitkan dan Jumlah Kapal > 400 GT Terdaftar

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nop	Des	TOTAL
<b>Jumlah Sertifikat yang diterbitkan</b>	14.362	14.563	14.724	14.896	15.037	15.214	15.271	15.319	15.361	15.390	15.411	15.442	15.442
<b>Jumlah kapal &gt;400GT terdaftar</b>	15.234	15.249	15.269	15.291	15.303	15.322	15.340	15.363	15.389	15.408	15.424	15.442	15.442

Sumber data : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dan Aplikasi *kapal.dephub.go.id*, Ditjen. Perhubungan Laut. (pertanggal 31 Desember 2024)

Note : Sertifikat pencegahan pencemaran merupakan bukti bahwa kapal yang bersangkutan memenuhi kriteria diantaranya menggunakan bahan bakar rendah sulfur.



Penerbitan sertifikat Pencegahan Pencemaran dilaporkan setiap bulan dengan memaparkan jumlah penerbitan sertifikat jenis Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP) yang diperuntukkan bagi kapal-kapal berbendera Indonesia berukuran >7 GT yang memiliki daerah pelayaran dalam negeri dan/atau Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Udara (*International Air Pollution Prevention/IAPP*) untuk kapal berbendera Indonesia berukuran >400GT yang berlayar secara internasional. Dalam sertifikat tersebut terdapat klausul yang menyatakan kadar kandungan sulfur pada bahan bakar yang dipakai oleh sebuah kapal. Persyaratan penerbitan sertifikat ini adalah sebagai berikut:

- i. Surat Permohonan;
- ii. *Copy* Sertifikat IAPP/SNPP Sementara/Sebelumnya (untuk renewal);
- iii. Buku Laporan Pemeriksaan *Marine Inspector*;
- iv. *Copy* Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal;
- v. *Copy* Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Surat Laut atau Pas Besar).

Informasi kadar sulfur diperoleh pada saat *Marine Inspector* melakukan pemeriksaan teknis kapal dibuktikan dengan nota kualitas BBM yang diperoleh dari suplier BBM saat pengisian. Apabila dirasa terdapat bias, *Marine Inspector* di lapangan dapat melakukan pengecekan langsung menggunakan alat *portable sulfur in fuel oil analyzer*. Setelah hal tersebut memenuhi persyaratan yang berlaku sertifikat dapat diproses lebih lanjut. Pengecekan teknis lapangan dapat dibantu oleh *Marine Inspector* dari Unit Pelaksana Teknis DJPL di wilayah kapal tersebut bersandar dengan hasil berupa penerbitan sertifikat sementara, untuk selanjutnya perlu dilakukan penerbitan sertifikat permanen di Kantor Pusat DJPL (c.q. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan).

Selain dari sertifikat pencegahan pencemaran yang diterbitkan mulai tahun 2020, sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/93/14/DJPL-18 tentang Batasan Kandungan Sulfur pada Bahan Bakar dan Kewajiban Penyampaian Konsumsi Bahan Bakar di Kapal menyatakan bahwa semua pemilik/operator kapal yang memiliki/mengoperasikan kapal yang berukuran GT 5000 atau lebih wajib mengumpulkan data pemakaian bahan bakar kapalnya selama satu tahun melalui aplikasi [dcs-ditkapel.dephub.go.id](https://dcs-ditkapel.dephub.go.id).

Kendala tim teknis pada saat melakukan penerbitan sertifikat adalah sebagai berikut:

- i. Kurangnya jumlah tenaga fungsional teknis (*Marine Inspector*) pada Subdirektorat yang menangani. Banyaknya permohonan yang masuk sehingga *load* pekerjaan meningkat selain itu juga terdapat beberapa pegawai yang mengalami promosi jabatan dan belum memiliki pelaksana pengganti;
- ii. Pemanfaatan teknologi informasi untuk menyampaikan permohonan sekaligus pemrosesan penerbitan sertifikat masih perlu dikembangkan dengan menambah fitur-fitur yang memudahkan pengguna juga petugas dalam mengolah data. Proses penerbitan sertifikat pencegahan



pencemaran saat ini belum sepenuhnya dilakukan secara *online* dikarenakan output sertifikat masih menggunakan blanko cetak sehingga masih memerlukan kontak fisik dengan pengguna jasa untuk pengambilan sertifikat yang telah diterbitkan.

**b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Program Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M) (IKP 7) Ketujuh (7) :**

Adapun realisasi kinerja Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M) telah memenuhi target yang telah ditetapkan karena terdapat 4 (empat) pengajuan sertifikat pencegahan pencemaran yang masih dalam proses penerbitan sehingga dimungkinkan akan terbit pada periode (bulan) berikutnya. Dalam pelaksanaannya Direktorat Jenderal Perhubungan laut dibantu oleh *Marine Inspector* dari Unit Pelaksana Teknis DJPL di wilayah kapal tersebut bersandar dengan hasil berupa penerbitan sertifikat sementara.

**Tabel III.1.25. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketujuh (7)**

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	KRITERIA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)	Rasio	Target	0,2	0,4	0,6	0,9	1
		Realisasi	0,238	0,468	0,715	0,933	1
		Kinerja (%)	119	117	119,2	103,67	100

Sumber data : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen. Perhubungan Laut

**c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M) (IKP 7) Ketujuh (7) :**

Adapun berdasarkan Reviu Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 pada Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M) untuk target tidak terdapat perubahan dan realisasi pada setiap tahunnya telah memenuhi target yang telah ditetapkan karena terdapat 4 (empat) pengajuan sertifikat pencegahan pencemaran yang masih dalam proses penerbitan.



**Tabel III.1.26. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketujuh (7)**

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)	Rasio	Target	0,2	0,4	0,6	0,8	1
		Realisasi	0,238	0,468	0,715	0,933	1
		Kinerja (%)	119	117	119,2	116,62	100

Sumber data : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen. Perhubungan Laut

- 8) Indikator Kinerja Program (IKP) Kedelapan (8) adalah **“Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan”**
- a) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target PK Revisi Tahun 2024 Pada Indikator Kinerja Program Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan (IKP 8) Kedelapan (8):**

**Tabel III.1.27. Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan**

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2024					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.8 Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2024 sebesar 100%. Realisasi pada Triwulan I terdapat 2 (dua) laporan kejadian pencemaran di Dermaga Pelabuhan Belawan dan Daerah Jetty Pelabuhan PT. Petrokimia Gresik yang berhasil ditanggulangi sehingga persentase pencapaiannya sebesar 100%;

Pada Triwulan II tidak ada laporan kejadian pencemaran di UPT Ditjen Hubla sehingga persentase pencapaiannya sebesar 100%.

Pada Triwulan III tidak ada laporan kejadian pencemaran di UPT Ditjen Hubla sehingga persentase pencapaiannya sebesar 100%.



Pada Triwulan IV tidak ada laporan kejadian pencemaran di UPT Ditjen Hubla sehingga persentase pencapaiannya sebesar 100%.

**Grafik III.1.8. Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan**



Dari setiap adanya laporan terjadinya tumpahan minyak telah dilakukan upaya penanggulangan oleh Terminal Khusus (Tersus), Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dengan melakukan koordinasi dari Syahbandar setempat. Hal ini sesuai amanat Perpres 109 Tahun 2006 serta PM.39 Tahun 2021 bahwa Syahbandar mengkoordinasikan aset penanggulangan tumpahan minyak yang dimiliki Tersus, TUKS dan BUP di pelabuhan. Frekuensi kejadian tumpahan minyak telah dilaporkan dapat ditanggulangi, adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \rightarrow \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi = Jumlah kejadian pencemaran yang berhasil ditanggulangi

Target = Jumlah kejadian pencemaran selama periode evaluasi



**Tabel III.1.28 Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Pelayaran (Kapal, Pelabuhan Dan Pekerjaan Bawah Air) Yang Berhasil Di Tanggulangi**

NO	KEJADIAN		NAMA KAPAL	JENIS KAPAL	PENYEBAB	TUMPAHAN MINYAK		TINDAKAN PENANGGULANGAN
	TANGGAL	LOKASI				JENIS	JUMLAH	
1.	11 Januari 2024	Dermaga 203 Ujung Baru Pelabuhan Belawan	SPOB SBHM 1	OIL BARGE (BUNKER)	Terdapat air laut yang masuk ke dalam kapal melalui celah sambungan antara deck dengan tutup tangki. Akibat dari Masuknya air laut ke tangki air tawar tersebut, haluan kapal masuk ke laut dan menyebabkan kapal tenggelam dan mengeluarkan MFO ke perairan sekitar dermaga 203 Ujung Baru, Pelabuhan Belawan	MFO	± Liter	Kantor KSOP Belawan berkoordinasi dengan pihak setempat dalam rangka penanganan tumpahan minyak tersebut: a. PT MMS dalam rangka pemindahan muatan MFO b. PT LEI dalam rangka pemasangan oilboom dan skimmer



2.	3 Januari 2024	Area Jetty I Pelabuhan PT. Petrokimia Gresik	LPG/ C MARIA NNA 28	OIL BARGE (BUNKE R)	Terdapat pergeseran posisi kapal sehingga Emergency Release System (ERS) pada Marine Loading Arm (MLA) aktif, dan sisa gas Ammonia (NH3) pada proses tersebut terlepas ke udara	MFO	Liter	<p>a. KSOP Kelas II Gresik telah berkordinasi dengan TUKS PT. Petrokimia Gresik, Sat. Polairud Polres Gresik dan VTS Surabaya untuk mengevakuasi kapal dan menanggulangi kebocoran gas tersebut</p> <p>b. Kapal Marianna 28 telah mematikan sistem operasi tersebut dengan Emergency Shut Down (ESD) sehingga kondisi telah aman</p> <p>c. Personil TUKS PT Petrokimia Gresik melakukan penutupan Block Valve Header di jalur pipa Ammonia (NH3) untuk memastikan jalur pipa sudah tertutup sempurna</p>
----	----------------	--	---------------------	---------------------	---	-----	-------	--

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

**b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Program Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan (IKP 8) Kedelapan (8):**

Adapun realisasi kinerja Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan setiap tahun telah mencapai target yang ditetapkan. Dari setiap adanya laporan terjadinya tumpahan minyak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah melakukan upaya penanggulangan oleh Terminal Khusus (Tersus), Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dengan melakukan koordinasi dari Syahbandar setempat sehingga ditanggulangi dengan baik.

**Tabel III.1.29. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedelapan (8)**

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan	%	Target	100	100	100	100	100
		Realisasi	100	100	100	100	100
		Kinerja (%)	100	100	100	100	100

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut





- c) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan (IKP 8) Kedelapan :**

Adapun berdasarkan Reviu Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 pada Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk *Loop* Secara Teratur untuk target tidak terdapat perubahan dan realisasinya sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga meningkatkan jaringan trayek dengan model *Loop Service* terhadap Pelayaran Nasional.

**Tabel III.1.30. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kesatu (1)**

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan	%	Target	100	100	100	100	100
		Realisasi	100	100	100	100	100
		Kinerja (%)	100	100	100	100	100

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



## B. KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM DIREKTORATJENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Tabel III.2.1. Kontribusi Terhadap Capaian IKP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET & Realisasi PK			PAGU Rp.	REALISASI		Capaian (%)
			T	R	%		Rp.	Fisik (%)	
1.	Meningkatnya Optimalisasi Pengelola Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, Dan BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Nilai	82	80,82	98,56	14.638.480.234.000	12.334.352.205.282		84,26

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang diakses pada tanggal 31 Desember 2024



### C. REALISASI ANGGARAN

Alokasi Pagu DIPA Awal dan Pagu DIPA-Revisi Tahun 2024 akan disampaikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel III.3.1. Perbandingan Pagu DIPA Akhir dengan Realisasi Ditjen Hubla Tahun 2024**

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI
1	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut	22,688,952,000	29,119,279,000	24,742,208,296
2	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Laut	3,378,786,538,000	3,492,292,190,000	3,324,440,155,101
3	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Laut	23,020,119,000	27,507,962,000	20,347,356,412
4	Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut	7,715,644,000	9,939,170,000	7,488,243,640
5	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut	964,078,761,000	1,692,832,015,000	1,636,824,737,900
6	Pelayanan Transportasi Laut	2,015,903,587,000	2,477,782,501,000	2,359,338,865,121
7	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut	2,523,429,812,000	6,197,752,935,000	5,993,947,221,150
8	Penunjang Teknis Transportasi Laut	614,403,031,000	711,254,182,000	647,865,802,953
<b>TOTAL</b>		<b>9,550,026,444,000</b>	<b>14,638,480,234,000</b>	<b>14,014,994,590,573</b>

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Posisi dan diakses pada tanggal 15 Januari 2025)

Selama tahun 2024 Revisi Anggaran telah dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali sebagai berikut:

A. Revisi 1 (pengesahan Nomor S--54/AG/AG.3/2024 tanggal 25 Januari 2024)

Revisi anggaran berupa pencantuman catatan halaman IVA DIPA/blokir dalam rangka memenuhi kewajiban *Automatic Adjustment* sebesar Rp 477.010.075.000,00.

B. Revisi 2 (pengesahan Nomor S--131/AG/AG.3/2024 tanggal 31 Januari 2024)

Revisi anggaran berupa :



1. Penambahan anggaran/percepatan penarikan PLN JICA kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Patimban sebesar Rp1.351.505,155.000,00 terdiri dari Phase I-1 (*Loan Agreement* IP-577) sebesar Rp 314.575.599.000,00 dan Phase I-2 (*Loan Agreement* IP-583) sebesar Rp 1.036.929.556.000,00;
2. Pergeseran/relokasi anggaran antar satker sumber Rupiah Murni (RM) guna penyelenggaraan angkutan laut perintis sebesar Rp 41.568.313.000,00;
3. Penghapusan Catatan Halaman IV A DIPA (buka blokir) kegiatan dibidang dukungan keperintisan angkutan laut sebesar Rp 2.000.000.000,00.

C. Revisi 3 (pengesahan S--183/AG/AG.3/2024 tanggal 20 Februari 2024)

Revisi anggaran berupa:

1. Pergeseran/relokasi anggaran antar satker dalam rangka reorganisasi di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut sumber dana SBSN sebesar Rp 60.000.000.000,00;
2. Lanjutan/luncuran pelaksanaan kegiatan/proyek SBSN Tahun Anggaran sebelumnya (TA 2023) yang dilanjutkan ke TA 2024 sebesar Rp 47.724.400.000,00;
3. Penambahan anggaran/percepatan penarikan PLN ADB Loan No.3792-INO:EARR pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pelabuhan Teluk Palu, sebesar Rp 206.488.109.000,00;
4. Revisi administratif, berupa ralat kode nomor register SBSN kegiatan Pembangunan Menara Suar Karang Singa, semula S0220423 menjadi M0220423;
5. Penghapusan Catatan Halaman IV.A DIPA (buka blokir) pada satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat sebesar Rp 28.181.289.000,00.

D. Revisi 4 (pengesahan S -224/AG/AG.3/2024 tanggal 16 Maret 2024)

Revisi anggaran berupa pergeseran anggaran antar unit Eselon I dari Ditjen Perhubungan Laut ke Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk memenuhi anggaran fasilitas sewa rumah perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri sebesar sebesar Rp 3.132.256.000,00 telah disahkan dan pangkalan data RKA-K/L DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbaharui.

E. Revisi 5 (pengesahan S --245/AG/AG.3/2024 tanggal 23 Maret 2024)

Revisi anggaran berupa:

1. Penghapusan catatan halaman IV A DIPA (buka blokir) kegiatan Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Dawelor sebesar Rp 6,620.000.000,00;
2. Penambahan pagu penggunaan PNPB Ditjen Perhubungan Laut guna pemenuhan kebutuhan kegiatan prioritas Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp 868.976.096.000,00;



3. Realokasi/pergeseran anggaran antar satker dalam rangka pengalokasian anggaran UPT baru dan pemenuhan kebutuhan kegiatan prioritas Ditjen Hubla sebesar Rp 56.415.267.000,00, terdiri dari sumber dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 9.808.059.000,00 dan sumber dana PNBPNP sebesar Rp 46.607.208.000,00.

F. Revisi 6 (pengesahan S-366/AG/AG.3/2024 tanggal 7 Juni 2024)

Revisi anggaran berupa:

1. Penghapusan catatan halaman IV B DIPA satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat sebesar Rp9,800.000.000,00;
2. Realokasi/pergeseran anggaran antar unit eselon I dalam satu program yang sama dari Ditjen Hubla ke Itjen Kemenhub sebesar Rp1.500.000.000,00;
3. Penambahan pagu penggunaan PNBPNP guna pemenuhan kebutuhan kegiatan prioritas Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp54.073.342.000,00;
4. Realokasi/pergeseran anggaran antar satker dalam rangka pemenuhan kebutuhan kegiatan prioritas Ditjen Hubla sebesar Rp185.909.507.000,00, terdiri dari sumber dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp31.654.546.000,00 dan sumber dana PNBPNP sebesar Rp154.254.961.000,00.

A. Revisi 7 (pengesahan S-390/AG/AG.3/2024 tanggal 24 Juni 2024)

Revisi anggaran berupa:

1. Penambahan anggaran/percepatan penarikan PLN JICA Loan Agreement IP-577 dan *Loan Agreement* IP-583, kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Patimban sebesar Rp800.000.000.000,00;
2. Realokasi/pergeseran anggaran dalam satu satker yang sama bersumber dana PNBPNP pada satker Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemenang, sebesar Rp705.037.000,00;
3. Realokasi/pergeseran anggaran antar satker bersumber dana PNBPNP dalam rangka pemenuhan kebutuhan kegiatan prioritas Ditjen Hubla sebesar Rp16.956.663.000,00;

B. Revisi 8, 9 dan 10 (pengesahan S-513/AG/AG.3/2024 tanggal 22 Agustus 2024)

Revisi anggaran berupa:

1. Relaksasi (buka blokir) *Automatic Adjustment* (AA) dalam rangka pemenuhan belanja pegawai dan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang di Laut Mekanisme Penugasan sebesar Rp217.941.383.000,00;
2. Penambahan pagu penggunaan PNBPNP Fungsional TA 2024 dalam rangka kegiatan Penyelenggaraan angkutan laut keperintisan dan prioritas lainnya sebesar Rp250.983.463.000,00;



3. Penambahan pagu penggunaan PNBP atas pengelolaan BMN dalam rangka peningkatan kualitas layanan melalui pengembangan aplikasi inaportnet sebesar Rp17.966.954.000,00;
4. Pergeseran/realokasi anggaran antar satker dalam Program yang sama dalam rangka memenuhi kekurangan Belanja Pegawai Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp4.469.402.000,00;
5. Pergeseran/realokasi anggaran antar satker, terdiri dari sumber dana RM dan PNBP dalam rangka pemenuhan kegiatan prioritas Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp47.240.417.000,00, dan;
6. Pergeseran/realokasi anggaran dalam satu satker yang sama dalam rangka pemanfaatan sisa anggaran kontraktual/swakelola guna membiayai kegiatan prioritas Ditjen Perhubungan Laut tersebar di 6 (satker) satker/UPT sebesar Rp7.383.868.000,00.

C. Revisi 11 (pengesahan S- 572/AG/AG.3/2024 tanggal 13 September 2024)

Revisi anggaran berupa penambahan anggaran/percepatan pelaksanaan kegiatan pinjaman/PLN JICA Loan Agreement IP-577 Proyek Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Patimban sebesar Rp1.217.261.163.000,00 telah disahkan dan pangkalan data RKA-K/L DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbaharui.

D. Revisi 12 (pengesahan S- 601/AG/AG.3/2024 tanggal 25 September 2024)

Revisi anggaran berupa:

1. Penambahan pagu penggunaan PNBP Fungsional dalam rangka membiayai kegiatan prioritas Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp119.289.966.000,00;
2. Penambahan pagu penggunaan PNBP Pengelolaan BMN dalam rangka membiayai kegiatan peningkatan kualitas layanan melalui pengembangan aplikasi inaportnet sebesar Rp849.725.000,00;
3. Pergeseran/realokasi anggaran antar satker, terdiri dari sumber dana RM dan PNBP dalam rangka pemenuhan kegiatan prioritas Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp32.161.953.000,00;
4. Pergeseran/realokasi anggaran dalam satu satker yang sama, terdiri dari sumber dana RM dan PNBP dalam rangka pemenuhan kegiatan prioritas sebesar Rp1.428.273.000,00;
5. Pergeseran/realokasi anggaran Belanja Pegawai antar unit eselon I dari Ditjen Perhubungan Darat ke Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp929.838.000,00;

E. Revisi 13 (pengesahan S- 731/AG/AG.3/2024 tanggal 3 November 2024)

Revisi anggaran berupa:

1. Pergeseran/realokasi anggaran antar unit eselon I dalam program yang sama, guna membiayai kegiatan prioritas Ditjen sebesar Rp1.300.000.000,00 dan kekurangan belanja pegawai Ditjen



Kemenhub sebesar Rp3.000.000.000,00 yang anggarannya diperoleh dari Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp4.300.000.000,00,

2. Penambahan pagu penggunaan PNBPN Fungsional dalam rangka membiayai kegiatan prioritas Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp103.538.825.000,00, dan perubahan target pendapatan PNBPN, semula Rp4.834.257.294.000,00, menjadi Rp5.341.168.720.000,00,
3. Pergeseran/relokasi anggaran antar satker, terdiri dari sumber dana RM dan PNBPN dalam rangka pemenuhan kegiatan prioritas Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp77.919.355.000,00,
4. Pergeseran/relokasi anggaran antar satker dalam rangka pemenuhan belanja pegawai sebesar Rp11.710.420.000,00
5. Pergeseran/relokasi anggaran antar satker dalam rangka optimalisasi sisa anggaran sumber dana SBSN sebesar Rp27.000.000.000,00. Revisi administratif berupa penghapusan catatan halaman IV.B DIPA sebesar Rp36.562.357.000,00;

F. Revisi 14 (pengesahan S- 793/AG/AG.3/2024 tanggal 29 November 2024)

Revisi anggaran berupa:

1. Pengurangan alokasi anggaran sumber dana PLN kegiatan/proyek Rehabilitation and *Reconstruction* Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Donggala dan Pelabuhan Wani sebesar Rp2.939.401.000,00,
2. Pergeseran/relokasi anggaran antar satker, sumber dana PNBPN dalam rangka pemenuhan kegiatan prioritas Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp22.410.664.000,00,
3. Pergeseran/relokasi anggaran antar satker dalam rangka pemenuhan belanja pegawai sebesar Rp7.807.463.000,00,

G. Revisi 15 (pengesahan S- 518/PB.2/2024 tanggal 2 Desember 2024)

Revisi anggaran berupa realokasi/pergeseran anggaran antar Satker antar wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam rangka monitoring pelaksanaan Nataru dan kegiatan prioritas lainnya di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut TA. 2024 sebesar Rp 1.213.000.000,- (sumber dana RM).



Tabel III.3.2. Realisasi Belanja Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

NO.	Indikator Kegiatan Program	Target	PAGU DIPA (Rp)	PAGU EFEKTIF (Rp)	REALISASI (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	Jumlah Realisasi Belanja Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	97,70%	14,638,480,234,000	14,356,571,525,000	14,014,994,590,573	97,62%	97,62%

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Posisi 15 Januari 2025 )







Tabel III.3.3 Realisasi Belanja Per Program

NO	Kode		Pagu Awal	Pagu Revisi	Real	%	Sisa
1.	022.04.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	6,148,219,787,000	11,118,680,082,000	10.670.207.079.060	95,96%	448.373.002.940
1.	022.04.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	3,401,806,657,000	3,519,800,152,000	3,344,787,511,513	95,02%	175.112.640.487
<b>TOTAL</b>			<b>9.550.026.444.000</b>	<b>14,638,480,234,000</b>	<b>14,014,994,590,573</b>	<b>97,62%</b>	<b>623.485.643.427</b>

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Posisi 15 Januari 2025)



Tabel III.3.4. Pengukuran dan Nilai Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							
SP.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Laut	IKP1	Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,95	0,95	Layanan angkutan rede (16 layanan)	<b>Pagu Awal:</b> 28.949.351.000 <b>Pagu Revisi :</b> 24.449.351.000. <b>Pagu revisi</b> 45.151.801.000 <b>Pagu revisi:</b> 52.410.233.000	40.371.945.507	22,97	1. Volume output tercapai 100%. 2. Layanan telah terlaksana namun pelaksana layanan belum mengajukan permintaan pembayaran .
							Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (PEN) (30 layanan)	<b>Pagu Awal :</b> 538.231.358.000. <b>Pagu Revisi :</b> 390.775.496.000. <b>Pagu revisi</b> 421.753.136.000 <b>Pagu revisi</b> 441.608.149.000	340.428.674.256	22,91	1. Volume output tercapai 100%. 2. Layanan telah terlaksana namun pelaksana layanan belum mengajukan permintaan pembayaran.
							Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (77 layanan)	<b>Pagu awal</b> 987.327.237.477 <b>Pagu revisi</b> 978.656.161.347	917.490.151.263	6,25	1. Volume output tercapai 100%. 2. Layanan telah terlaksana namun pelaksana layanan belum



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)						
										mengajukan permintaan pembayaran.
						Layanan angkutan tol laut prioritas nasional (37 layanan)	<b>Pagu Awal :</b> 764.410.315.000. <b>Pagu Revisi :</b> 586.546.743.000 <b>Pagu revisi</b> 649.932.301.000 <b>Pagu revisi</b> 757.677.465.000 <b>Pagu revisi</b> 754.677.465.000 Terjadi perubahan jumlah trayek, semula 39 menjadi 37	455.855.754.227	39,60	1. Volume output tercapai 100%. 2. Layanan telah terlaksana namun pelaksana layanan belum mengajukan permintaan pembayaran.
						Layanan angkutan ternak prioritas nasional (6 layanan)	<b>Pagu :</b> 88.163.805.000. <b>Pagu revisi</b> 80.940.124.000	56.043.405.904	30.76	1. Volume output tercapai 100%. 2. Layanan telah terlaksana namun pelaksana layanan belum mengajukan permintaan pembayaran.
		IKP2	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang	%	27	27	-	-	-	-



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							
			Membentuk Loop Secara Teratur								
SP.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Laut	IKP3	Persentase <i>On Time Performance</i> pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	94	94,1	Monitoring Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan  Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	<b>Pagu Awal</b> 433.741.000  <b>Pagu Revisi</b> 733.741.000	729.737.000  362.392.000	0,55  7,4	Output kegiatan sudah dilaksanakan 100%  Output kegiatan sudah dilaksanakan 100%
						Studi Penyusunan Pedoman Teknis Perhitungan, Penetapan dan, Pelaporan Capaian Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	<b>Pagu Awal :</b> 604.031.000  <b>Pagu Revisi</b> 0	-	-	Direlokasi di bulan Agustus Tahun 2024	



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET 2024	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)						
SP.3	Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Laut	IKP4	Rasio kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	0,80	0,85	Sosialisasi keselamatan pelayaran	<b>Pagu Awal :</b> 904.160.000 <b>Pagu Revisi :</b> 1,157,138,000	1,157,138,000	0	Sudah dilaksanakan di Pelabuhan Marunda, Pelabuhan Malili, Pelabuhan Tg Perak, Pelabuhan Ratu, Mauluku, Pelabuhan Tg Wangi dan Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Juwana dan Pelabuhan Dumai
							Bimbingan Teknis Periksa Kecelakaan Kapal dan Periksa Kelailautan dan Keamanan Kapal Asing	0	0	0	
							Bimbingan Teknis Tata Cara Penanganan Barang Berbahaya Padat di Pelabuhan	<b>Pagu Awal :</b> 153.970.000 <b>Pagu Revisi :</b> 142,580,000	142,579,500	0	Sudah terealisasi
							Bimbingan Teknis Tata Cara	<b>Pagu Awal :</b> 153.970.000	143.835.600	0	Sudah terealisasi



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							
						Penanganan Barang Curah Padat di Pelabuhan	<b>Pagu revisi :</b> 143,836,000				
						Pengukuhan Pejabat Pemeriksa Kecelakaan Kapal	<b>Pagu Awal :</b> 429.360.000 <b>Pagu Revisi :</b> 190,116,000	190,105,300	0	Sudah terealisasi	
						Pengukuhan Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing	<b>Pagu Awal :</b> 429.360.000 <b>Pagu Revisi :</b> 228.160.000	227.315.000	0,37	Selesai	
						Asistensi Monitoring Evaluasi dan Investigasi Bidang kecelakaan Kapal dan Pemeriksa Kapal	<b>Pagu Awal :</b> 403.200.000 <b>Pagu Revisi :</b> 353.200.000	353.200.000	0	Sudah dilaksanakan Januari - Desember	
						Monitoring , dan Evaluasi Bidang Kesyahbandaran, Barang berbahaya dan Curah Padat	<b>Pagu Awal :</b> 190.500.000 <b>Pagu Revisi :</b> 138,540,000	138,540,000	0	Sudah dilaksanakan Januari - Desember	



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							
		IKP5	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,26	0	Pengadaan Perizinan dan distribusi Amunisi dan Lemari Senjata Api	<b>Pagu Awal</b> 3.740.320.000 <b>Pagu revisi :</b> 3,285,497,000	3.285.497.000	0	3 unit senjata HMG September-Desember
							Peningkatan keterampilan ISPS CODE	<b>Pagu Awal :</b> 150.500.000	149,824,200	0,44	Selesai
							Pengukuhan Auditor ISPS Code	<b>Pagu Awal</b> 153.650.000 <b>Pagu Revisi :</b> 128.826.000	128.436.500	0,30	Selesai
							Verifikasi ke IV ISPS Code Untuk Pemenuhan Uji Kepatuhan ISPS Code pada Fasilitas Pelabuhan	<b>Pagu Awal</b> 100.000.000	97.972.000	2,02	Selesai
		IKP6	Tingkat Kehandalan Kenavigasian	%	97,25	95,22	Pengadaan Sarana Pendukung Maritime Coordinator Center (MCC)	<b>Pagu Awal</b> 1.477.004.000	1.475.003.520	0,14	Telah selesai dilaksanakan



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)						
						Pengembangan Sistem Informasi Telekomunikasi pelayanan Terintegrasi	<b>Pagu Awal</b> 3.490.950.000	3.490.950.000	0	Telah selesai dilaksanakan
						Monitoring Pembangunan dan Pengoperasian SBNP dan Bengkel Kenavigasian	<b>Pagu Awal</b> 550.000.000 <b>Pagu Revisi</b> 1.147.995.000	1.140.974.000	0,61	Telah selesai dilaksanakan
						Monitoring Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengoperasian Sarana dan Prasarana Telekomunikasi Pelayanan	<b>Pagu Awal</b> 1.200.000.000 <b>Pagu Revisi</b> 2.070.442.000	2.069.169.000	0,06	Telah selesai dilaksanakan
						Development and Improvement of Indonesian Aids to Navigation (ATON) Project	<b>Pagu Awal</b> 13.350.000.000 <b>Pagu Revisi</b> 26.751.686.000	26.751.685.989	0	Telah selesai dilaksanakan
						Pemeliharaan Maritime Coordinator Center (MCC)	<b>Pagu Awal</b> 300.000.000	291.898.920	2,70	Telah selesai dilaksanakan

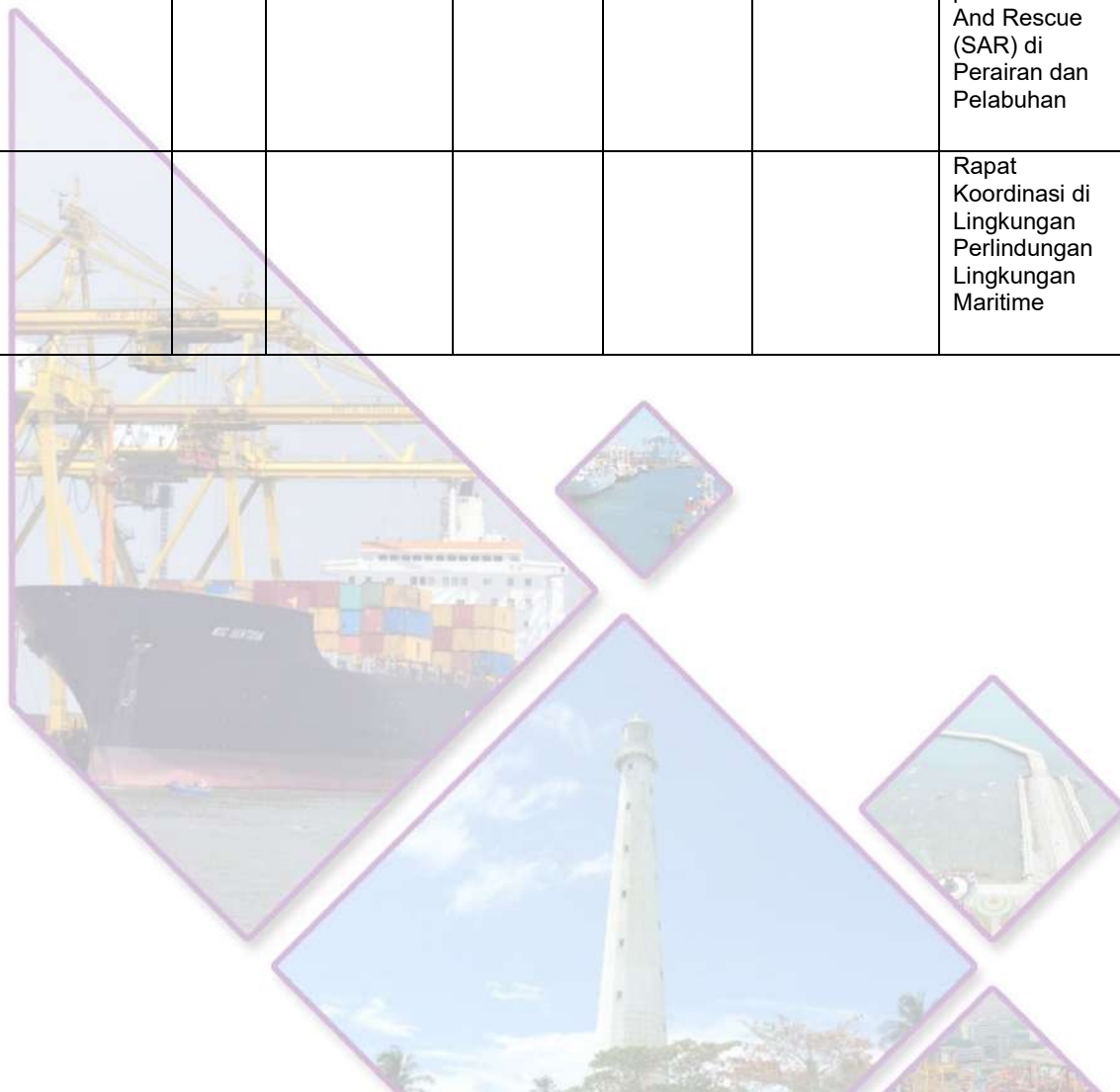




NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)						
SP.4	Meningkatnya Kinerja Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Laut	IKP7	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)	Rasio	1	1	Penerbitan Sertifikat pencegahan pencemaran	-	-	-
							Monitoring aplikasi pelaporan konsumsi bahan bakar kapal	-	-	-
		IKP8	Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan	%	100	100	Latihan Pra Exercise Regional Marine Pollution Exercise (Pra-Regional Marpollex) dan (Regional Marpollex) in Philippine	<b>Pagu Awal :</b> 2.750.940.000 <b>Pagu Revisi :</b> 1.692.740.000	1.670.158.352	1,33
						Pembekalan Personil Penanggulangan Pencemaran Tingkat Operator	<b>Pagu Awal :</b> 215.655.000 <b>Pagu Revisi :</b> 238.671.000	238.660.500	0,004	Sudah dilaksanakan bulan Agustus menunggu proses pencairan



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)						
						Pembekalan personil Search And Rescue (SAR) di Perairan dan Pelabuhan	<b>Pagu Awal :</b> 337.404.000 <b>Pagu Revisi :</b> 235.760.000	234.788.425	0	Sudah selesai
						Rapat Koordinasi di Lingkungan Perlindungan Lingkungan Maritime	-	-	-	





## D.CAPAIAN LAINNYA

Benchmark internasional untuk *On Time Performance* dengan menggunakan data Jurnal *Review Of Maritime Transport 2024* yang dipublish oleh UNCTAD sebagai berikut:

Peringkat Kinerja Pelabuhan Indonesia dalam *Container Port Performance Index (CPPI)* 2023:

### Top 25 ports in Container Port Performance Index

Port	2023 rank	Index points	2022 rank	Change in rank 2023 compared to 2022
Yangshan, China	1	177.9	1	0
Salalah, Oman	2	164.7	2	0
Tanger-Mediterranean, Morocco	3	159.6	5	2
Tanjung Pelepas, Malaysia	4	158.3	6	2
Chiwan, China	5	158.2	23	18
Cartagena, Colombia	6	158.0	4	-2
Guangzhou, China	7	153.7	9	2
Cai Mep, Viet Nam	8	150.8	13	5
Yokohama, Japan	9	150.5	12	3
Hamad Port, Qatar	10	149.8	8	-2
Ningbo, China	11	145.4	7	-4
Algeciras, Spain	12	142.3	18	6
Mawan, China	13	142.2	15	2
Dalian, China	14	139.0	44	30
Hong Kong, China	15	134.1	10	-5
Port Said, Egypt	16	131.2	11	-5
Yeosu, Republic of Korea	17	130.7	21	4
Visakhapatnam, India	18	129.6	112	94
Singapore, Singapore	19	127.9	19	0
Tanjung Priok, Indonesia	20	127.3	282	262
Lianyungang, China	21	126.5	77	56
Mundra, India	22	124.8	50	28
Kaohsiung, Taiwan Province of China	23	123.1	26	3
Yantian, China	24	121.6	51	27
Shekou, China	25	121.1	14	-11

Source: UNCTAD calculations, based on data provided by World Bank and S and P Global Port Performance Programme.

Note: Index points correspond to administrative approach.

Sumber: *Review Of Maritime Transport 2024 (UNCTAD)*



*Container Port Performance Index* (CPPI) mengukur efisiensi pelabuhan dalam menangani bongkar muat kontainer, berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk memproses kapal container. Pada Tahun 2023 Pelabuhan Tanjung Priok, Indonesia berada pada ranking 20 dari daftar 25 pelabuhan terbaik berdasarkan *Container Port Performance Index* (CPPI). Pelabuhan Tanjung Priok mengalami peningkatan performa yang signifikan dari tahun sebelumnya yang masih berada di ranking 282 dari daftar pelabuhan dunia.

Waktu Rata-rata Pemindahan Kontainer :

Time taken to move a container per port call by call size, top 25 economies, 2023

(Minutes)

Economy	<500	501–1000	1001–1500	1501–2000	2001–2500	2501–3000	3001–4000	4001–6000	>6000
China	3.4	1.8	1.2	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4
United States	4.2	2.4	1.8	1.6	1.6	1.5	1.3	1.1	0.9
Republic of Korea	2.7	1.7	1.2	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5
Singapore	3.3	1.7	1.2	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4
Malaysia	3.0	1.9	1.2	0.9	0.8	0.6	0.6	0.4	0.3
Brazil	4.3	2.4	1.8	1.6	1.3	1.2	1.3	0.9	0.0
Spain	3.9	2.0	1.3	0.9	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6
Germany	5.8	2.2	1.6	1.3	1.2	1.0	0.9	0.8	0.7
United Arab Emirates	5.0	2.1	1.5	1.0	0.9	0.8	0.6	0.6	0.5
Japan	2.5	1.3	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	-	-
Belgium	4.9	2.4	1.5	1.2	1.1	1.1	0.9	0.8	0.6
Hong Kong, China	2.6	1.5	1.0	0.9	0.8	0.6	0.5	0.6	-
United Kingdom	4.3	2.2	1.4	1.2	1.2	1.1	0.8	0.8	0.7
Panama	5.3	2.3	1.5	1.3	1.0	0.9	0.7	1.1	0.7
Kingdom of the Netherlands	7.8	2.6	1.7	1.3	1.0	0.9	0.8	0.7	0.5
Taiwan Province of China	2.7	1.5	1.1	1.1	0.8	0.9	0.6	0.5	-
Türkiye	5.4	3.4	2.7	1.9	1.9	1.9	1.5	1.1	-
Viet Nam	2.7	1.5	1.1	1.0	0.8	0.6	0.5	0.6	0.4
India	3.7	2.4	1.2	0.9	0.8	0.8	0.7	0.5	0.4
Italy	4.9	2.8	2.0	1.6	1.5	1.4	1.2	1.4	1.9
Australia	6.4	3.1	2.3	1.8	1.5	1.4	1.2	1.1	-
France	4.7	2.9	2.1	1.8	1.7	1.5	1.4	0.9	0.6
Thailand	3.2	2.7	1.3	1.1	0.9	0.9	0.7	0.7	0.6
Indonesia	3.7	2.2	1.7	1.3	1.0	0.9	0.8	0.7	-
Philippines	4.5	3.2	2.5	1.9	1.4	2.2	-	-	-
Average	4.2	2.2	1.6	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.6

Source: S and P Global Port Performance Programme.

Note: Nine call-size categories based on total number of containers moved during a port call, regardless of container size, ranging from <500 moves (first category) to >6,000 moves (last category).

Sumber: *Review Of Maritime Transport 2024* (UNCTAD)

Waktu rata-rata pemindahan kontainer (dalam menit) berdasarkan *call size* (jumlah kontainer yang dimuat dan dibongkar selama satu kunjungan kapal di pelabuhan) pada pelabuhan di Indonesia adalah sebagai berikut:

Untuk *Call size* <500 membutuhkan waktu 4,5 menit per kontainer, untuk *Call size* 500-1.000 membutuhkan waktu 3,2 menit per kontainer, untuk *Call size* 1.001-1.500 membutuhkan waktu 2,0 menit per kontainer, untuk *Call size* 1.501-2.000 membutuhkan waktu 1,5 menit per kontainer, untuk *Call size* 2.001-2.500 membutuhkan waktu 1,1 menit per kontainer, dan untuk *Call size* >6.000 membutuhkan waktu 0,6 menit per *container*.



# BAB IV

## Penutup

### Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 Tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, berikut dapat disimpulkan sebagai berikut :

##### 1. Rasio Konektivitas Transportasi Laut

Realisasi kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional setiap tahun telah mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian terhadap target setiap tahunnya didukung peran aktif dari pemerintah pusat dan daerah dalam mempromosikan keunggulan komoditas serta para pemilik barang yang masih mengandalkan angkutan laut dalam mendistribusikan barang, sehingga dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 persentase kinerja terhadap target mencapai 100%.

##### 2. Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur

Realisasi kinerja Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk *Loop* Secara Teratur setiap tahun mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk lebih meningkatkan peranan pelayaran nasional swasta setiap tahunnya Direktorat Jenderal Perhubungan laut telah melakukan himbauan kepada perusahaan pelayaran swasta melalui surat edaran kepada DPP INSA serta melakukan evaluasi rapat koordinasi nasional penyelenggaraan angkutan barang tol laut.

##### 3. Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul

Realisasi kinerja Persentase *On Time Performance* pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 belum mencapai target yang telah ditetapkan karena *recovery* dari kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada pelayanan masing-masing terminal di pelabuhan yang menyebabkan adanya perubahan layanan yang diberikan. Sehingga pada Tahun



2022 Realisasi Capaian Kinerja hanya mencapai 95,18% dan pada Tahun 2023 Realisasi Capaian Kinerja mencapai 99%. Untuk lebih meningkatkan Persentase Pencapaian Kinerja Pelayanan Pelabuhan setiap tahunnya Direktorat Jenderal Perhubungan laut telah melakukan himbauan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk menerbitkan/merubah standar kinerja yang disesuaikan kondisi operasional pelabuhan.

#### **4. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut**

Adapun realisasi kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut pada Tahun 2024 belum mencapai target yang telah ditetapkan karena terdapat kejadian kecelakaan pada Transportasi Laut yang disebabkan oleh faktor alam, manusia dan teknis. Untuk mengurangi kejadian kecelakaan pada Transportasi Laut setiap tahunnya Direktorat Jenderal Perhubungan laut telah melakukan peningkatan pelayanan kapal terhadap kapal-kapal penumpang tradisional dengan meningkatkan standard keselamatan, keamanan dan pelayanan di setiap wilayah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Untuk mengurangi kejadian kecelakaan pada Transportasi Laut setiap tahunnya Direktorat Jenderal Perhubungan laut telah melakukan peningkatan pelayanan kapal terhadap kapal-kapal penumpang tradisional dengan meningkatkan standard keselamatan, keamanan dan pelayanan di setiap wilayah Unit Pelaksana Teknis (UPT)

#### **5. Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut**

Adapun realisasi kinerja Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 belum mencapai target yang telah ditetapkan karena adanya gangguan keamanan pada pelayanan Jasa Transportasi Laut. Pada Tahun 2023 terdapat 2 laporan gangguan keamanan (pencurian barang di dalam kontainer di perairan karimun kecil pada bulan Oktober 2023 dan pencurian di atas kapal di perairan Pelabuhan Dumai pada bulan Desember 2023). Terkait 2 kejadian tersebut dari Direktur KPLP sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan Instansi terkait mengenai Pengawasan, Keamanan dan Keselamatan Pelayaran arahan dari Direktur KPLP agar UPT terkait apabila ada kejadian pencurian dan sebagainya untuk mengirim surat sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dan pihak KSOP terkait dapat membuat SOP terkait kejadian tersebut agar tidak terulang kembali dan juga menyampaikan bahwa ada beberapa opsi yang dapat dilakukan seperti meminta kepada Owner agar memasang CCTV di Kapal, memberikan laporan kepada Kepala Kantor KSOP terkait. Permasalahan ini akan dirapatkan secara nasional ke Instansi terkait serta dapat dilakukan patroli bersama disesuaikan di titik-titik yang rawan. Pada Tahun 2024 terdapat 1 kejadian Perompakan Kapal TB.Royal TB 17 di Selatan Perairan Tanjung Malatayur Kab. Pulang Pisau dan dapat tertangani dengan baik.



## 6. Tingkat Keandalan Kenavigasian

Realisasi kinerja Tingkat Keandalan Kenavigasian pada Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 belum memenuhi target yang telah ditetapkan karena terdapat beberapa kerusakan dari fasilitas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan VTS. Pada Tahun 2022 belum memenuhi target yang ditetapkan karena terdapat beberapa kerusakan dari fasilitas SBNP dan Telekomunikasi Pelayaran yang diakibatkan karena adanya penghematan / automatic adjustment anggaran untuk biaya pemeliharaan. Pada Tahun 2023 belum memenuhi target yang telah ditetapkan karena terdapat beberapa kerusakan dari fasilitas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan VTS yang diakibatkan karena adanya kekurangan anggaran untuk biaya pemeliharaan. Jumlah SBNP yang bersuar pada tahun 2023 sebanyak 5.134 unit, terdiri dari 3.014 milik DJPL dan 2.120 milik non DJPL. Jumlah Hari Kelainan SBNP (hari dimana SBNP tidak dapat beroperasi) milik DJPL = 104,993 hari. Pada Tahun 2024 belum memenuhi target yang ditetapkan karena terdapat beberapa kerusakan dari fasilitas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan VTS yang diakibatkan karena adanya kekurangan anggaran untuk biaya pemeliharaan. Jumlah SBNP yang bersuar dari triwulan IV tahun 2024 sebanyak 5.333 unit, terdiri dari 3.048 milik DJPL dan 2.085 milik non DJPL. Jumlah Hari Kelainan SBNP (hari dimana SBNP tidak dapat beroperasi) milik DJPL = 144.755 hari.

## 7. Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)

Realisasi kinerja Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M) telah memenuhi target yang telah ditetapkan karena terdapat 4 (empat) pengajuan sertifikat pencegahan pencemaran yang masih dalam proses penerbitan sehingga dimungkinkan akan terbit pada periode (bulan) berikutnya. Dalam pelaksanaannya Direktorat Jenderal Perhubungan laut dibantu oleh *Marine Inspector* dari Unit Pelaksana Teknis DJPL di wilayah kapal tersebut bersandar dengan hasil berupa penerbitan sertifikat sementara.

## 8. Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan

Realisasi kinerja Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan setiap tahun telah mencapai target yang ditetapkan. Dari setiap adanya laporan terjadinya tumpahan minyak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah melakukan upaya penanggulangan oleh Terminal Khusus (Tersus), Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dengan melakukan koordinasi dari Syahbandar setempat sehingga ditanggulangi dengan baik.



## **B. Langkah ke depan**

Keberhasilan pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Tahun Anggaran 2024 sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perhubungan tentunya tidak terlepas dari peran serta seluruh jajaran unit kerja Tingkat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Adapun Langkah-langkah dan upaya dalam penyempurnaan perencanaan kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai berikut :

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut wajib menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban perencanaan dan penganggaran. Laporan Kinerja dijadikan tolak ukur evaluasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran sedangkan Indikator kinerja harus selaras dengan indikator kinerja di atasnya serta penggunaan sistem pelaporan kinerja secara elektronik;
2. Pelaksanaan penyempurnaan e-performance pada Tahun 2024 melalui kegiatan bimtek untuk memudahkan unit kerja yang mengoperasikan, dan implementasinya unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Melakukan himbauan kepada unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi pada aplikasi e-performance yang secara rutin melakukan input data pengukuran kinerja dan upload dokumen SAKIP pada aplikasi e-sakip reviu;
4. Perlu adanya komitmen dari Pimpinan unit kerja atas pelaksanaan SAKIP pada unit kerja masing-masing dan secara berkesinambungan terus diupayakan penciptaan inovasi guna mendukung perbaikan kinerja di masa mendatang;
5. Melaksanakan percepatan pelaksanaan anggaran.



**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

**BULAN :** Januari **TAHUN :** 2024

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan		Januari		Realisasi Bulan		Januari		% Capaian Bulan		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab		
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja		Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja					Capaian Anggaran	
								Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%				Volume	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
SP.1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP1	Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0,95	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															Dir. Lala	
						1	Layanan angkutan rede (16 layanan)	Jumlah kapal rede yang beroperasi	16	16	100	2.037.445.917	8,33	16	0	100	0	1. Volume output tercapai 100%. 2. Layanan telah terlaksana namun pelaksana layanan belum mengajukan permintaan pembayaran. 3. Pagu kebutuhan Rp 45.151.800.356. 4. Pagu awal Rp 28.949.351.000. 5. Pagu revisi Rp 24.449.351.000. 6. Terjadi pengurangan anggaran Rp 4.500.000.000 yang dialokasikan untuk kegiatan Mudik Gratis. 7. Di sisi lain subaidi angkutan rede terdapat kekurangan anggaran Rp 20.702.449.356.	Monitor Lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri		
						2	Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (PEN) (30 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis (PEN)	30	30	100	207.473.618	0,12	30	0	100	0	1. Volume output tercapai 100%. 2. Layanan telah terlaksana namun pelaksana layanan belum mengajukan permintaan pembayaran.	Monitor Lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri		
						3	Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (77 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis prioritas nasional	77	77	100	84.263.700.447	8,0	77	0	100	0	1. Volume output tercapai 100%. 2. Layanan telah terlaksana namun pelaksana layanan belum mengajukan permintaan pembayaran. 3. Pagu kebutuhan Rp 1.111.217.848.883. 4. Pagu awal Rp 1.011.164.405.358. 5. Terjadi pengurangan anggaran Rp 147.455.862.000. 6. Di sisi lain subaidi angkutan perintis swasta terdapat kekurangan anggaran Rp 100.053.443.525.	Monitor Lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri		
						4	Layanan angkutan tol laut prioritas nasional (39 layanan)	Jumlah trayek tol laut	39	39	100	436.838.435	0,12	39	0	100	0	1. Volume output tercapai 100%. 2. Layanan telah terlaksana namun pelaksana	Monitor Lanjut	Subdit Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait		
		5	Layanan angkutan ternak prioritas nasional (6 layanan)	Jumlah trayek angkutan ternak	6	6	100	77.132.002	0,12	6	0	100	0	1. Volume output tercapai 100%. 2. Layanan telah terlaksana namun pelaksana	Monitor Lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri						
IKP2	Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	%	27	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																Dir. Lala		
				Rekapitulasi laporan pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	Jumlah trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	37	37	100	-	-	41	-	111	-	Volume output tercapai 100%	Monitor Lanjut	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri dan Subdit Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait					
SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	85	Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															Dir. Kepelabuhanan	
						1	Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	Jumlah Peralatan	9	2	22%	31.000.000	7%	2	0	100%	0%	belum ada realisasi anggaran	Percepatan proses pertanggungjawaban kegiatan monitoring	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan		
						2	Bimbingan Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	Jumlah	1	0	0%	-	0%	0	0	100%	100%			Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan		
						3	Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan	Laporan	1	0	0%	0	0%	0	0	100%	100%			Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan		
SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	0,80	Menunjuk Dir. KPPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															Dir. KPPLP	
						1.	Sosialisasi keselamatan pelayaran	Laporan	8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar	
						2.	Bimbingan Teknis Pemeriksa Kecelakaan Kapal dan Pemeriksa Kotalaut dan Keamanan Kapal Asing	Laporan	35	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar
						3.	Bimbingan Teknis Tata Cara Penanganan Barang Berbahaya Padat di Pelabuhan	Laporan	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar
						4.	Bimbingan Teknis Tata Cara Penanganan Barang Curah Padat di Pelabuhan	Laporan	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar
						5.	Penguohan Pejabat Pemeriksa Kecelakaan Kapal dan Pejabat Pemeriksa Kelalautan dan Keamanan Kapal Asing	Laporan	70	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar
						6.	Asistensi Monitoring Evaluasi dan Investigasi Bidang kecelakaan Kapal dan Pemeriksa Kapal	Laporan	21	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar
						7.	Monitoring n, dan Evaluasi Bidang Kesyahbandaran, Barang berbahaya dan Curah Padat	Laporan	10	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan		Januari		Realisasi Bulan		Januari		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab																			
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja		Realisasi Anggaran																							
								Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%																						
SP.4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP5 Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,26	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Dir. KPLP																		
					1. Pengadaan Perizinan dan distribusi Amunisi dan Lemari Senjata Api	Sertifikat	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Patroli dan Pengamanan														
					2. Peningkatan keterampilan ISPS CODE	Sertifikat	30	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Patroli dan Pengamanan													
					3. Pengukuhan Auditor ISPS Code	Sertifikat	30	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Patroli dan Pengamanan													
					4. Verifikasi ke IV ISPS Code Untuk Pemenuhan Uji Kepatuhan ISPS Code	Sertifikat	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Patroli dan Pengamanan													
		IKP6 Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	97,25	Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																Dir. Kenavigasian																
					1. Pengadaan Sarana Pendukung Maritime Coordinator Center (MCC)	Peralatan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Telekomunikasi Pelayaran													
					2. Pengembangan Sistem Informasi Telekomunikasi pelayanan Terintegrasi	Peralatan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Telekomunikasi Pelayaran													
					3. Monitoring Pembangunan dan Pengoperasian SBNP dan Bengkel Kenavigasian	Laporan	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Perambuan dan Perbengkelan												
					4. Monitoring Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengoperasian Sarana dan Prasarana Telekomunikasi Pelayaran	Laporan	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Telekomunikasi Pelayaran												
					5. Development and Improvement of Indonesian Aids to Navigation (ATON) Project	Paket	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Perambuan dan Perbengkelan												
					6. Pemeliharaan Maritime Coordinator Center (MCC)	Peralatan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Telekomunikasi Pelayaran												
					IKP7 Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)	Rasio	1	Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																Dir. Kappel													
								1. Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	Jumlah	1	1	100														Subdit Pencegahan Pencemaran dan manajemen keselamatan Kapal dan Perlindungan di Perairan											
								2. Monitor Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal Melalui Data Collecting System (DCS)	Laporan	1	1	100														Subdit Pencegahan Pencemaran dan manajemen keselamatan Kapal dan Perlindungan di Perairan											
IKP8 Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	100	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-																Dir. KPLP																		
			1. Latihan Pra Exercise Regional Marine Pollution Exercise (Pra-Regional Marpolex) dan (Regional Marpolex) in Phillipine	Laporan	1	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air															
			2. Pembekalan Personil Penanggulangan Pencemaran Tingkat Opearator	Sertifikat	30	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air														
			3. Pembekalan personil Search And Rescue (SAR) di Perairan dan Pelabuhan	Sertifikat	30	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air														
																			4. Rapat Koordinasi di Lingkungan Perlindungan Lingkungan Maritime	Laporan	1	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

**BULAN :** Februari **TAHUN :** 2024

(1)	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan		Februari		Realisasi Bulan		Februari		% Capaian Bulan		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab																																																								
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja		Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja					Capaian Anggaran																																																							
								Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%				Volume	%																																																						
SP.1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP1	Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0,9	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:	(8)																																																																					
																						Jumlah kapal rede yang beroperasi	16	16	100	4.074.891.834	16,66	16	0	100	0	1. Volume output tercapai 100%. 2. Layanan telah terlaksana namun pelaksanaan layanan belum mengajukan permintaan pembayaran. 3. Pagu kebutuhan Rp 45.151.900.356. 4. Pagu awal Rp 28.949.351.000. 5. Pagu revisi Rp 24.449.351.000. 6. Terjadi pengurangan anggaran Rp 4.500.000.000 yang dialokasikan untuk kegiatan Mudik Gratis. 7. Di sisi lain subsidi angkutan rede terdapat kekurangan anggaran Rp 20.702.449.356.																																												
																																	Jumlah trayek angkutan laut perintis (PEN)	30	30	100	207.473.618	0,12	30	0	100	0	1. Volume output tercapai 100%. 2. Layanan telah terlaksana namun pelaksanaan layanan belum mengajukan permintaan pembayaran.																																	
																																												Jumlah trayek angkutan laut perintis prioritas nasional	77	77	100	84.263.700.447	8,0	77	0	100	0	1. Volume output tercapai 100%. 2. Layanan telah terlaksana namun pelaksanaan layanan belum mengajukan permintaan pembayaran. 3. Pagu kebutuhan Rp 1.111.217.848.883. 4. Pagu awal Rp 1.011.164.405.358. 5. Terjadi pengurangan anggaran Rp 147.655.862.000. 6. Di sisi lain subsidi angkutan perintis swasta terdapat kekurangan anggaran Rp 100.053.443.525.																						
																																																							Jumlah trayek tol laut	39	39	100	436.838.435	0,12	39	0	100	0	1. Volume output tercapai 100%. 2. Layanan telah terlaksana namun pelaksanaan											
		Jumlah trayek angkutan ternak nasional (6 layanan)	6	6	100	77.132.002	0,12	6	0	100	0	1. Volume output tercapai 100%. 2. Layanan telah terlaksana namun pelaksanaan																																																																
													Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:	(8)																																																														
																															Rekapitulasi laporan pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	37	37	100	-	-	41	-	100	-	Volume output tercapai 100%																																			
																																										Jumlah trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	37	37	100	-	-	41	-	100	-	Volume output tercapai 100%																								
																																																					Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																							
Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	Jumlah Peralatan	9	1	11%	30.000.000	7%	1	0	100%	0%	Percepatan Realisasi Anggaran	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan																																																																
													Bimbingan Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	Jumlah	1	0	0%	-	0%	0	0	100%	100%	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan																																																				
																									Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan	Laporan	1	0	0%	-	0%	0	0	100%	100%	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan																																								
																																					IKP4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,09	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																																			
																																																					1. Sosialisasi keselamatan pelayaran	Laporan	8	2	0,25	237.380.000	26,254203	2	237.380.000	100	100	Kegiatan telah dilaksanakan dua kali	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar										
2. Bimbingan Teknis Pemeriksa Kecelakaan Kapal dan Pemeriksa Kelalautan dan Keamanan Kapal Asing	Laporan	35	0	0	-	0	0	0	100	100	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut																																																							Subdit Tertib Berlayar									
													3. Bimbingan Teknis Tata Cara Penanganan Barang Berbahaya Padat di Pelabuhan	Laporan	35	0	0	-	0	0	0	100	100	kegiatan telah dilaksanakan																																												monitor lanjut						Subdit Tertib Berlayar		
																									4. Bimbingan Teknis Tata Cara Penanganan Barang Barung Curah Padat di Pelabuhan	Laporan	35	35	100	-	0	35	0	100	100	kegiatan telah dilaksanakan																																							monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar
																																					6. Asiateml Monitoring Evaluasi dan Investigasi Bidang kecelakaan Kapal dan Pemeriksa Kapal	Laporan	21	0	0	-	0	0	0	100	100	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar																										
																																																			7. Monitoring n. dan Evaluasi Bidang Kesyahbandaran, Barang berbahaya dan Curah Padat	Laporan	10	3	0	-	0	3	0	100	100	kegiatan telah dilaksanakan tiga kali	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar												
IKP5	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,28	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																																																																								
													1. Pengadaan Perizinan dan distribusi Amunisi dan Lemari Serjata Api	Sertifikat	0	0	0	-	0	0	0	100	100	kegiatan belum dilaksanakan																																												monitor lanjut					Subdit Patroli dan Pemoaman			
2. Peningkatan keterampilan ISPS CODE	Sertifikat	30	0	0	-	0	0	0	100	100	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut													Subdit Patroli dan Pemoaman																																																			

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan		Februari		Realisasi Bulan	Februari	% Capaian Bulan	Februari	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab			
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran						
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%						
SP.4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penganggulangan pencemaran laut	IKP6	Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	97,75	3. Pengukuhan Auditor ISPS Code	Sertifikat	30	0	0	-	0	0	0	100	100	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Pengamanan Patroli dan		
						4. Verifikasi ke IV ISPS Code Untuk Pemenuhan Uji Kepatuhan ISPS Code	Sertifikat	0	0	0	-	0	0	0	100	100	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Pengamanan Patroli dan		
						Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															
						1. Pengadaan Sarana Pendukung Maritime Coordinator Center (MCC)	Peralatan	1	0	0	-	0	0	0	-	-	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Telekomunikasi Pelayaran		
						2. Pengembangan Sistem Informasi Telekomunikasi pelayanan Terintegrasi	Peralatan	1	0	0	-	0	0	0	-	-	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Telekomunikasi Pelayaran		
						3. Monitoring Pembangunan dan Pengoperasian SBNP dan Bengkel Kenavigasian	Laporan	1	1	100	120.000.000	21,82	1	117.824.000	100	98	kegiatan dalam proses pelaksanaan	monitor lanjut	Subdit Perambuan dan Perbengkelan		
		4. Monitoring Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengoperasian Sarana dan Prasarana Telekomunikasi Pelayaran	Laporan	1	1	100	150.000.000	12,50	1	148.892.000	100	99	kegiatan dalam proses pelaksanaan	monitor lanjut	Subdit Telekomunikasi Pelayaran						
		5. Development and Improvement of Indonesian Aids to Navigation (ATON) Project	Paket	1	0	0	-	0	0	0	-	-	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Perambuan dan Perbengkelan						
		6. Pemeliharaan Maritime Coordinator Center (MCC)	Peralatan	1	0	0	-	0	0	0	-	-	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Telekomunikasi Pelayaran						
		Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																			
		1. Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	Jumlah	1	1	100	-	-	1	-	100	-	Telah terlaksana sesuai dengan target	Monitor lanjut	Subdit Pencegahan Pencemaran dan manajemen keselamatan Kapal dan Perlindungan di Perairan						
		2. Monitor Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal Melalui Data Collecting System (DCS)	Laporan	1	1	100	-	-	1	-	100	-	Telah terlaksana sesuai dengan target	Monitor lanjut	Subdit Pencegahan Pencemaran dan manajemen keselamatan Kapal dan Perlindungan di Perairan						
IKP8	Persentase keberhasilan penganggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	100	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal																	
1. Latihan Pra Exercise Regional Marine Pollution Exercise (Pra-Regional Marpolex) dan (Regional Marpolex) in Philippine	Laporan	1	0	0	-	0	0	0	100	100	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air								
2. Pembekalan Personil Penanggulangan Pencemaran Tingkat Opearator	Sertifikat	30	0	0	-	0	0	0	100	100	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air								
3. Pembekalan personil Search And Rescue (SAR) di Perairan dan Pelabuhan	Sertifikat	30	0	0	-	0	0	0	100	100	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air								
4. Rapat Koordinasi di Lingkungan Perlindungan Lingkungan Maritim	Laporan	1	0	0	-	0	0	0	100	100	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air								

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

**BULAN :** Maret      **TAHUN :** 2024

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan		Maret		Realisasi Bulan		Maret		% Capaian Bulan		Maret	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab		
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja		Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja						Capaian Anggaran	
								Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%					Volume	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)					
SP.1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0,9	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																		
					1. Layanan angkutan rede (16 layanan)	Jumlah kapal rede yang beroperasi	16	16	100	6.112.337.751	25,0	16	0	100	0	1. Volume output tercapai 100%. 2. Layanan telah terlaksana namun pelaksana layanan belum mengajukan permintaan pembayaran. 3. Pagu kebutuhan Rp 45.151.800.356. 4. Pagu awal Rp 28.949.351.000. 5. Pagu revisi Rp 24.449.351.000. 6. Terjadi pengurangan anggaran Rp 4.500.000.000 yang dialokasikan untuk kegiatan Modu Gratis. 7. Di sisi lain subsidi angkutan rede terdapat kekurangan anggaran Rp 20.702.449.356.	Monitor Lanjut	Kasubdi Angkutan Laut Dalam Negeri					
					2. Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (PEN) (30 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis (PEN)	30	30	100	207.473.618	0,12	30	0	100	0	1. Volume output tercapai 100%. 2. Layanan telah terlaksana namun pelaksana layanan belum mengajukan permintaan pembayaran.	Monitor Lanjut	Kasubdi Angkutan Laut Dalam Negeri					
					3. Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (77 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis prioritas nasional	77	77	100	84.263.700.447	8,0	77	0	100	0	1. Volume output tercapai 100%. 2. Layanan telah terlaksana namun pelaksana layanan belum mengajukan permintaan pembayaran. 3. Pagu kebutuhan Rp 1.111.217.848.883. 4. Pagu awal Rp 1.011.164.405.358. 5. Terjadi pengurangan anggaran Rp 147.455.862.000. 6. Di sisi lain subsidi angkutan perintis swasta terdapat kekurangan anggaran Rp 100.053.443.525.	Monitor Lanjut	Kasubdi Angkutan Laut Dalam Negeri					
					4. Layanan angkutan tol laut prioritas nasional (39 layanan)	Jumlah trayek tol laut	39	39	100	436.838.435	0,12	39	0	100	0	1. Volume output tercapai 100%. 2. Layanan telah terlaksana namun pelaksana layanan belum mengajukan permintaan pembayaran.	Monitor Lanjut	Kasubdi Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait					
					5. Layanan angkutan ternak prioritas nasional (6 layanan)	Jumlah trayek angkutan ternak	6	6	100	77.132.002	0,12	6	0	100	0	1. Volume output tercapai 100%. 2. Layanan telah terlaksana namun pelaksana	Monitor Lanjut	Kasubdi Angkutan Laut Dalam Negeri					
SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pungmut	%	27	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																		
					Rekapitulasi laporan pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	Jumlah trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	37	37	100	-	-	41	-	110,81	-	Jumlah trayek tetap dan teratur = 138 trayek. Target jumlah trayek 2024 = 37 trayek. Realisasi s/d Maret 2024 = 41 trayek. Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur = 41 trayek / 138 trayek x 100% = 29,7%	Monitor Lanjut	Kasubdi Angkutan Laut Dalam Negeri dan Kasubdi Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait					
SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pungmut	%	83,00	Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																		
					1. Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	Jumlah Peralatan	9	2	22%	330.000.000	76%	2	364.357.000	100%	110%		Subdi Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan						
					2. Bimbingan Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	Jumlah	1	0	0%	-	0%	0	-	100%	100%		Subdi Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan						
SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,09	Menunjuk Dir. KPPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																		
					1. Sosialisasi keselamatan pelayaran	Laporan	8	3	0,38	272.956.000	30,1889	3	272.956.000	100	100	Kegiatan telah dilaksanakan dua kali	monitor lanjut	Subdi Tertib Berlayar					
					2. Bimbingan Teknis Pemeriksa Kecelakaan Kapal dan Pemeriksa Kelalautan dan Keamanan Kapal Asing	Laporan	35	0	0	-	0	0	0	100	100	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdi Tertib Berlayar					
					3. Bimbingan Teknis Tata Cara Penanganan Barang Berbahaya Padat di Pelabuhan	Laporan	35	0	0	-	0	0	0	100	100	kegiatan telah dilaksanakan	monitor lanjut	Subdi Tertib Berlayar					
					4. Bimbingan Teknis Tata Cara Penanganan Barang Curah Padat di Pelabuhan	Laporan	35	35	100	-	0	35	0	100	100	kegiatan telah dilaksanakan	monitor lanjut	Subdi Tertib Berlayar					
					5. Pengukuhan Pejabat Pemeriksa Kecelakaan Kapal dan Pejabat Pemeriksa Kelalautan dan Keamanan Kapal Asing	Laporan	70	0	0	-	0	0	0	100	100	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdi Tertib Berlayar					
SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,09	Asistensi Monitoring Evaluasi dan Investigasi Bidang kecelakaan Kapal dan Pemeriksa Kapal	Laporan	21	0	0	-	0	0	0	100	100	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdi Tertib Berlayar					

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan		Maret		Realisasi Bulan	Maret	% Capaian Bulan	Maret	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab	
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%				
					7	Monitoring n. dan Evaluasi Bidang Kesyahbandaran, Barang berbahaya dan Cegah Padat	Laporan	10	3	0	-	0	3	0	100	100	kegiatan telah dilaksanakan tiga kali	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar
		IKP5	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,28	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:												Dir. KPLP	
					1.	Pengadaan Perizinan dan distribusi Amunisi dan Lemari Senjata Api	Sertifikat	0	0	0	-	0	0	0	100	100	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Patroli dan Pengamanan
					2.	Peningkatan keterampilan ISPS CODE	Sertifikat	30	0	0	-	0	0	0	100	100	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Patroli dan Pengamanan
					3.	Pengkukuhan Auditor ISPS Code	Sertifikat	30	0	0	-	0	0	0	100	100	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Patroli dan Pengamanan
					4.	Verifikasi ke IV ISPS Code Untuk Pemenuhan Uj Kebutuhan ISPS Code	Sertifikat	0	0	0	-	0	0	0	100	100	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Patroli dan Pengamanan
		IKP6	Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	97,75	Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													
					1.	Pengadaan Sarana Pendukung Maritime Coordinator Center (MCC)	Peralatan	1	0	0	-	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Telekomunikasi Pelayaran
					2.	Pengembangan Sistem Informasi Telekomunikasi pelayaran Terintegrasi	Peralatan	1	0	0	-	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Telekomunikasi Pelayaran
					3.	Monitoring Pembangunan dan Pengoperasian SBNP dan Bengkel Kenavigasian	Laporan	1	1	100	380.000.000	69,09	1	361.774.000	100	95,20	kegiatan dalam proses pelaksanaan	monitor lanjut	Subdit Perambuan dan Perbengkelan
					4.	Monitoring Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengoperasian Sarana dan Prasarana Telekomunikasi Pelayaran	Laporan	1	1	100	150.000.000	12,50	1	148.892.000	100	99,26	kegiatan dalam proses pelaksanaan	monitor lanjut	Subdit Telekomunikasi Pelayaran
					5.	Development and Improvement of Indonesian Aids to Navigation (ATON) Project	Paket	1	0	0	12.500.000.000	0	0	12.038.258.695	100	96,31	kegiatan dalam proses pelaksanaan	monitor lanjut	Subdit Perambuan dan Perbengkelan
					6.	Pemeliharaan Maritime Coordinator Center (MCC)	Peralatan	1	0	0	-	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Telekomunikasi Pelayaran
		IKP7	Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0,6	Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													
					1.	Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	Jumlah	1	1	100	-	-	1	-	100	-	Telah terlaksana sesuai dengan target	Monitor lanjut	Subdit Pencegahan Pencemaran dan manajemen keselamatan Kapal dan Perlindungan di Perairan
					2.	Monitor Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal Melalui Data Collecting System (DCS)	Laporan	1	1	100	-	-	1	-	100	-	Telah terlaksana sesuai dengan target	Monitor lanjut	Subdit Pencegahan Pencemaran dan manajemen keselamatan Kapal dan Perlindungan di Perairan
		IKP8	Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	100	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal													
					1.	Lathan Pra Exercise Regional Marine Pollution Exercise (Pra-Regional Marpoxex) dan (Regional Marpoxex) in Philippine	Laporan	1	0	0	-	0	0	0	100	100	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air
					2.	Pembekalan Personil Penanggulangan Pencemaran Tingkat Opearator	Sertifikat	30	0	0	-	0	0	0	100	100	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air
					3.	Pembekalan personil Search And Rescue (SAR) di Perairan dan Pelabuhan	Sertifikat	30	0	0	-	0	0	0	100	100	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air
					4.	Rapat Koordinasi di Lingkungan Perlindungan Lingkungan Maritime	Laporan	1	0	0	-	0	0	0	100	100	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

**BULAN :** April **TAHUN :** 2024

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan		April		Realisasi Bulan		April		% Capaian Bulan		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab		
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja		Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja					Capaian Anggaran	
								Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%				Volume	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
SP.1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	KP1	Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0,9	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																
						1	Layanan angkutan rede (16 layanan)	Jumlah kapal rede yang beroperasi	16	16	100	8.149.783.668	33,0	16	0	100	0	1. Volume output tercapai 100%. 2. Layanan telah terlaksana namun pelaksana layanan belum mengajukan permintaan pembayaran. 3. Pagu kebutuhan Rp 45.151.800.356. 4. Pagu awal Rp 28.949.351.000. 5. Pagu revisi Rp 24.449.351.000. 6. Terjadi pengurangan anggaran Rp 4.500.000.000 yang dialokasikan untuk kegiatan Modu Gratis. 7. Di sisi lain subsidi angkutan rede terdapat kekurangan anggaran Rp 20.702.449.356.	Monitor Lanjut	Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri		
						2	Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (PEN) (30 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis (PEN)	30	30	100	207.473.618	0,12	30	0	100	0	1. Volume output tercapai 100%. 2. Layanan telah terlaksana namun pelaksana layanan belum mengajukan permintaan pembayaran.	Monitor Lanjut	Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri		
						3	Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (77 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis prioritas nasional	77	77	100	84.263.700.447	8,0	77	0	100	0	1. Volume output tercapai 100%. 2. Layanan telah terlaksana namun pelaksana layanan belum mengajukan permintaan pembayaran. 3. Pagu kebutuhan Rp 1.111.217.848.883. 4. Pagu awal Rp 1011.164.405.358. 5. Terjadi pengurangan anggaran Rp 147.455.862.000. 6. Di sisi lain subsidi angkutan perintis swasta terdapat kekurangan anggaran Rp 100.053.443.525.	Monitor Lanjut	Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri		
						4	Layanan angkutan tol laut prioritas nasional (39 layanan)	Jumlah trayek tol laut	39	39	100	436.838.435	0,12	39	0	100	0	1. Volume output tercapai 100%. 2. Layanan telah terlaksana namun pelaksana layanan belum mengajukan permintaan pembayaran.	Monitor Lanjut	Kasubdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait		
		5	Layanan angkutan ternak prioritas nasional (6 layanan)	Jumlah trayek angkutan ternak	6	6	100	77.132.002	0,12	6	0	100	0	1. Volume output tercapai 100%. 2. Layanan telah terlaksana namun pelaksana	Monitor Lanjut	Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri						
SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	KP2	Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	%	27	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																
						Rekapitulasi laporan pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	Jumlah trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	37	37	100	-	-	37	-	100,00	-	Jumlah trayek tetap dan teratur = 138 trayek. Target jumlah trayek 2024 = 37 trayek. Realisasi s.d April 2024 = 37 trayek. Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur = 37 trayek / 138 trayek x 100% = 26,8%	Monitor Lanjut	Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri dan Kasubdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait			
SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	KP3	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	83,00	Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																
						1	Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	Jumlah Peralatan	9	2	22%	330.000.000	76%	2	364.357.000	100%	110%		Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan			
						2	Bimbingan Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	Jumlah	1	0	0%	-	0%	0	-	100%	100%		Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan			
SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	KP4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,09	Menunjuk Dir. KPPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																
						1.	Sosialisasi keselamatan pelayaran	Laporan	8	3	0,38	272.956.000	30,1889	3	272.956.000	100	100	Kegiatan telah dilaksanakan dua kali	monitor lanjut	Subdit Terbit Berlayar		
						2.	Bimbingan Teknis Pemeriksa Kecelakaan Kapal dan Pemeriksa Kelalautan dan Keamanan Kapal Asing	Laporan	35	0	0	-	0	0	0	100	100	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Terbit Berlayar		
						3.	Bimbingan Teknis Tata Cara Penanganan Barang Berbahaya Padat di Pelabuhan	Laporan	35	0	0	-	0	0	0	100	100	kegiatan telah dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Terbit Berlayar		
						4.	Bimbingan Teknis Tata Cara Penanganan Barang Barung Curah Padat di Pelabuhan	Laporan	35	35	100	-	0	35	0	100	100	kegiatan telah dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Terbit Berlayar		
						5.	Penguksahan Pejabat Pemeriksa Kecelakaan Kapal dan Pejabat Pemeriksa Kelalautan dan Keamanan Kapal Asing	Laporan	70	0	0	-	0	0	0	100	100	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Terbit Berlayar		
6.	Asistensi Monitoring Evaluasi dan Investigasi Bidang kecelakaan Kapal dan Pemeriksa Kapal	Laporan	21	0	0	-	0	0	0	100	100	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Terbit Berlayar								

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan		April		Realisasi Bulan	April	% Capaian Bulan	April	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
					7. Monitoring n. dan Evaluasi Bidang Kesyahbandaran, Barang berbahaya dan Curah Padat	Laporan	10	3	0	-	0	3	0	100	100	kegiatan telah dilaksanakan tiga kali	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar
		KP5 Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,28	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Dir. KPLP
					1. Pengadaan Perizinan dan distribusi Amunisi dan Lemari Senjata Api	Paket	1	0	0	3.740.320.000	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Patroli dan Pengamanan
					2. Peningkatan keterampilan ISPS CODE	Laporan	1	0	0	150.500.000	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Patroli dan Pengamanan
					3. Pengukuhan Auditor ISPS Code	Laporan	1	0	0	153.650.000	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Patroli dan Pengamanan
					4. Verifikasi ke IV ISPS Code Untuk Pemenuhan Uj Keputuhan ISPS Code	Laporan	3	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Patroli dan Pengamanan
		KP6 Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	97,75	Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													
					1. Sosialisasi keselamatan pelayaran	Laporan	8	3	37,5	904.160.000	30,19	3	272.956.000	37,50	30,19	kegiatan telah dilaksanakan 3 kali	monitor lanjut	Subdit Sarpras
					2. Bimbingan Teknis Pemeriksa Kecelakaan Kapal dan Pemeriksa Kelalailautan dan Keamanan Kapal Asing	Laporan	1	0	0	409.560.000	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar
					3. Bimbingan Teknis Tata Cara Penanganan Barang Berbahaya Padat di Pelabuhan	Laporan	1	0	0	153.970.000	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar
					4. Bimbingan Teknis Tata Cara Penanganan Barang Curah Padat di Pelabuhan	Laporan	1	1	1	153.970.000	0	1	0	100	0	kegiatan telah dilaksanakan proses pencairan	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar
					5. Pengukuhan Pejabat Pemeriksa Kecelakaan Kapal dan Pejabat Pemeriksa Kelalailautan dan Keamanan Kapal Asing	Laporan	1	0	0	429.360.000	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar
					6. Asistensi Monitoring Evaluasi dan Investigasi Bidang kecelakaan Kapal dan Pemeriksa Kapal	Laporan	21	8	38,1	403.200.000	24,84	8	100.168.381	38,10	24,84	kegiatan dilaksanakan sepanjang tahun	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar
					7. Monitoring n. dan Evaluasi Bidang Kesyahbandaran, Barang berbahaya dan Curah Padat	Laporan	10	5	50	190.500.000	43,51	3	82890000	50	43,51	kegiatan dilaksanakan sepanjang tahun	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar
		KP7 Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0,6	Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													
					1. Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	Jumlah	1	1	100	-	-	1	-	100	-	Telah terlaksana sesuai dengan target	Monitor lanjut	Subdit Pencegahan Pencemaran dan manajemen keselamatan Kapal dan Perlindungan di Perairan
					2. Monitor Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal Melalui Data Collecting System (DCS)	Laporan	1	1	100	-	-	1	-	100	-	Telah terlaksana sesuai dengan target	Monitor lanjut	Subdit Pencegahan Pencemaran dan manajemen keselamatan Kapal dan Perlindungan di Perairan
		KP8 Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	100	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal													
					1. Lathan Pra Exercise Regional Marine Pollution Exercise (Pra-Regional Marpoxex) dan (Regional Marpoxex) in Philippine	Laporan	1	0	0	2.750.940.000	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air
					2. Pembekalan Personil Penanggulangan Pencemaran Tingkat Opearator	Laporan	1	0	0	367.720.000	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air
					3. Pembekalan personil Search And Rescue (SAR) di Perairan dan Pelabuhan	Laporan	1	0	0	291.100.000	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air
					4. Rapat Koordinasi di Lingkungan Perlindungan Lingkungan Maritime	Laporan	1	0	0	-	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air



**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

BULAN : **Mei**                      TAHUN : **2024**

(1)	NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan		Mei		Realisasi Bulan		Mei		% Capaian Bulan		Mei	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab		
									Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja		Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja						Capaian Anggaran	
									Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%					Volume	%
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)																
SP.1		Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP1	Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0,9	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																	
							1	Layanan angkutan rede (16 layanan)	Jumlah kapal rede yang beroperasi	16	16	100	10.187.229.585	41,3	16	10.455.519.644	100	42,76	1. Pagu awal Rp 28.949.351.000. 2. Pagu revisi Rp 24.449.351.000. 3. Terjadi kekurangan anggaran Rp 4.500.000.000.	Monitor Lanjut	Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri			
							2	Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (PEN) (30 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis (PEN)	30	30	100	162.823.123.333	41,67	30	77.727.166.639	100	19,89	1. Pagu awal Rp 538.231.358.000 2. Pagu revisi Rp 390.775.496.000.	Monitor Lanjut	Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri			
							3	Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (77 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis prioritas nasional	77	77	100	411.386.348.949	41,67	77	290.716.218.161	100	29,44	Pagu awal Rp 987.327.237.477	Monitor Lanjut	Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri			
							4	Layanan angkutan tol laut prioritas nasional (39 layanan)	Jumlah trayek tol laut	39	39	100	244.394.476.250	41,67	39	106.344.060.222	100	18,13	1. Pagu awal Rp 764.410.315.000 2. Pagu revisi Rp 586.546.743.000	Monitor Lanjut	Kasubdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait			
SP.2		Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP2	Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	%	27	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																	
							1	Rekapitulasi laporan pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	Jumlah trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	37	37	100	-	-	37	-	100,00	-	Jumlah trayek tetap dan teratur = 138 trayek. Target jumlah trayek 2024 = 37 trayek. Realisasi s/d Mei 2024 = 37 trayek. Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur = 37 trayek / 138 trayek x 100% = 27,22%	Monitor Lanjut	Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri dan Kasubdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait			
SP.2		Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	83,00	Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																	
							1	Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	Jumlah Peralatan	9	2	22%	330.000.000	76%	2	364.357.000	100%	110%		Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan				
							2	Bimbingan Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	Jumlah	1	0	0%	-	0%	0	-	100%	100%		Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan				
SP.3		Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,09	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																	
							1.	Sosialisasi keselamatan pelayaran	Laporan	8	4	50	1.023.162.000	58,74	4	601.035.087	50,00	58,74	Kegiatan telah dilaksanakan 4 kali	monitor lanjut	Subdit Sarpras			
							2.	Bimbingan Teknis Pemeriksa Kecelakaan Kapal dan Pemeriksa Kelalautan dan Keamanan Kapal Asing	Laporan	1	0	0	409.560.000	0	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar		
SP.3		Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,09	3.	Bimbingan Teknis Tata Cara Penanganan Barang Berbahaya Padat di Pelabuhan	Laporan	1	0	0	153.970.000	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar	

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan		Mei		Realisasi Bulan		Mei		% Capaian Bulan		Mei	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab			
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja		Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja						Capaian Anggaran		
								Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%					Volume	%	
SP.4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP5	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,28	4. Bimbingan Teknis Tata Cara Penanganan Barang Barung Curah Padat di Pelabuhan	Laporan	1	1	1	153.970.000	93,42	1	143.835.600	100	93,42	kegiatan telah dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar					
						5. Pengukuhan Pejabat Pemeriksa Kecelakaan Kapal dan Pejabat Pemeriksa Ketatahutan dan Keamanan Kapal Asing	Laporan	1	0	0	429.360.000	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar					
						6. Asistensi Monitoring Evaluasi dan Investigasi Bidang kecelakaan Kapal dan Pemeriksa Kapal	Laporan	21	8	38,1	403.200.000	24,84	8	100.168.381	38,10	24,84	kegiatan dilaksanakan sepanjang tahun	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar					
						7. Monitoring, dan Evaluasi Bidang Kesyahbandaran, Barang berbahaya dan Curah Padat	Laporan	10	5	50	190.500.000	43,51	3	82.890.000	50	43,51	kegiatan dilaksanakan sepanjang tahun	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar					
		IKP6	Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	97,75	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																		
						1. Pengadaan Perizinan dan distribusi Amunisi dan Lemari Senjata Api	Sertifikat	0	0	0	-	0	0	0	100	100	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Patroli dan Pengamanan					
						2. Peningkatan keterampilan ISPS CODE	Sertifikat	30	0	0	-	0	0	0	100	100	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Patroli dan Pengamanan					
						3. Pengukuhan Auditor ISPS Code	Sertifikat	30	0	0	-	0	0	0	100	100	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Patroli dan Pengamanan					
		IKP7	Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0,6	4. Verifikasi ke IV ISPS Code Untuk Pemenuhan Uji Kepatuhan ISPS Code	Sertifikat	0	0	0	-	0	0	0	0	100	100	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Patroli dan Pengamanan				
						Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																		
						1. Pengadaan Sarana Pendukung Maritime Coordinator Center (MCC)	Peralatan	1	0	0	-	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Telekomunikasi Pelayaran					
						2. Pengembangan Sistem Informasi Telekomunikasi pelayanan Terintegrasi	Peralatan	1	0	0	-	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Telekomunikasi Pelayaran					
						3. Monitoring Pembangunan dan Pengoperasian SBNP dan Bengkel Kenavigasian	Laporan	1	1	100	600.000.000	52	1	590.349.000	100	98,39	kegiatan dalam proses pelaksanaan	monitor lanjut	Subdit Perambuan dan Perbengkelan					
						4. Monitoring Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengoperasian Sarana dan Prasarana Telekomunikasi Pelayanan	Laporan	1	1	100	1.000.000.000	65	1	970.627.000	100	97,06	kegiatan dalam proses pelaksanaan	monitor lanjut	Subdit Telekomunikasi Pelayaran					
						5. Development and Improvement of Indonesian Aids to Navigation (ATON) Project	Paket	1	0	0	12.500.000.000	0	0	12.038.258.695	100	96,31	kegiatan dalam proses pelaksanaan	monitor lanjut	Subdit Perambuan dan Perbengkelan					
						6. Pemeliharaan Maritime Coordinator Center (MCC)	Peralatan	1	0	0	-	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Telekomunikasi Pelayaran					
IKP8	Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	100	Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																				
				1. Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	Jumlah	1	1	100	-	-	1	-	100	-	Telah terlaksana sesuai dengan target	Monitor lanjut	Subdit Pencegahan Pencemaran dan manajemen keselamatan Kapal dan Perlindungan di Perairan							
				2. Monitor Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal Melalui Data Collecting System (DCS)	Laporan	1	1	100	-	-	1	-	100	-	Telah terlaksana sesuai dengan target	Monitor lanjut	Subdit Pencegahan Pencemaran dan manajemen keselamatan Kapal dan Perlindungan di Perairan							
				Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																				
IKP8	Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	100	1. Latihan Pra Exercise Regional Marine Pollution Exercise (Pra-Regional Marpox) dan (Regional Marpox) in Philippine	Laporan	1	0	0	2.107.113.000	0	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air						
				2. Pembekalan Personil Penanggulangan Pencemaran Tingkat Operator	Laporan	1	0	0	367.720.000	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air							
				3. Pembekalan personil Search And Rescue (SAR) di Perairan dan Pelabuhan	Laporan	1	0	0	291.100.000	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air							
				4. Rapat Koordinasi di Lingkungan Perlindungan Lingkungan Maritime	Laporan	1	0	0	-	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air							

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

**BULAN :** Juni                      **TAHUN :** 2024

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan		Juni		Realisasi Bulan		Juni		% Capaian Bulan		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab				
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja		Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja					Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%				Volume	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)						
SP.1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP1	Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0,9	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																		
						1. Layanan angkutan rede (16 layanan)	Jumlah kapal rede yang beroperasi	16	16	100	10.187.229.585	41,3	16	10.455.519.644	100	42,76	1. Pagu awal Rp 28.949.351.000. 2. Pagu revisi Rp 24.449.351.000. 3. Terjadi kekurangan anggaran	Monitor Lanjut	Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri					
						2. Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (PEN) (30 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis (PEN)	30	30	100	115.600.000.000	29,58	30	115.639.375.089	100	29,16	1. Pagu awal Rp 538.231.358.000 2. Pagu revisi Rp 390.775.496.000.	Monitor Lanjut	Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri					
						3. Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (77 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis prioritas nasional	77	77	100	411.386.348.949	41,67	77	290.715.219.161	100	29,44	Pagu awal Rp 987.327.237.477	Monitor Lanjut	Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri					
						4. Layanan angkutan tol laut prioritas nasional (30 layanan)	Jumlah trayek tol laut	39	39	100	122.700.000.000	20,92	39	122.714.781.820	100	20,92	1. Pagu awal Rp 784.410.315.000 2. Pagu revisi Rp 586.546.743.000	Monitor Lanjut	Kasubdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait					
		5. Layanan angkutan ternak prioritas nasional (6 layanan)	Jumlah trayek angkutan ternak	6	6	100	18.100.000.000	20,50	6	18.835.798.486	100	21,33	Pagu awal Rp 88.302.005.000.	Monitor Lanjut	Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri									
SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	27	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															Dr. Lala			
						Rekapitulasi laporan pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	Jumlah trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	37	37	100	-	-	37	-	100,00	-	Jumlah trayek tetap dan teratur = 138 trayek. Target jumlah trayek 2024 = 37 trayek. Realisasi s/d Juni 2024 = 37 trayek. Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur = 37 trayek / 138 trayek x 100% = 27,6	Monitor Lanjut	Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri dan Kasubdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait					
SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,09	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																		
						1. Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional	Jumlah Peralatan	9	2	22%	330.000.000	76%	2	364.357.000	100%	110%								Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan
						2. Bimbingan Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	Jumlah	1	0	0%	-	0%	0	-	100%	100%								
SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,09	3. Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan	Laporan	1	0	0%	-	0%	0	-	100%	100%							Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan	
						1. Sosialisasi keselamatan pelayaran	Laporan	8	4	50	1.023.162.000	58,74	4	601.035.087	50,00	58,74	kegiatan telah dilaksanakan 4 kali	monitor lanjut	Subdit Sarpras					
						2. Bimbingan Teknis Pemeriksa Kecelakaan Kapal dan Pemeriksa Kelalautan dan Keamanan Kapal Asing	Laporan	1	0	0	409.560.000	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Terbit Berlayar					
						3. Bimbingan Teknis Tata Cara Penanganan Barang Berbahaya Padat di Pelabuhan	Laporan	1	0	0	153.970.000	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Terbit Berlayar					
						4. Bimbingan Teknis Tata Cara Penanganan Barang Curah Padat di Pelabuhan	Laporan	1	1	1	153.970.000	93,42	1	143.835.600	100	93,42	kegiatan telah dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Terbit Berlayar					
						5. Pengukuhan Pejabat Pemeriksa Kecelakaan Kapal dan Pejabat Pemeriksa Kelalautan dan Keamanan Kapal Asing	Laporan	1	0	0	429.360.000	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Terbit Berlayar					
						6. Asistensi Monitoring Evaluasi dan Investigasi Bidang kecelakaan Kapal dan Pemeriksa Kapal	Laporan	21	8	38,1	403.200.000	24,84	8	100.168.381	38,10	24,84	kegiatan dilaksanakan sepanjang tahun	monitor lanjut	Subdit Terbit Berlayar					
7. Monitoring n. dan Evaluasi Bidang Kesyahbandaran, Barang berbahaya dan Curah Padat	Laporan	10	5	50	190.500.000	43,51	3	82.890.000	50	43,51	kegiatan dilaksanakan sepanjang tahun	monitor lanjut	Subdit Terbit Berlayar											
SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP5	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,28	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																Dr. KPLP		
						1. Pengadaan Perizinan dan distribusi Amunisi dan Lemas Sejajita Api	Paket	1	0	0	3.740.320.000	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Patroli dan Pengamanan					
						2. Peningkatan keterampilan ISPS CODE	Laporan	1	0	0	150.500.000	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Patroli dan Pengamanan					
						3. Pengukuhan Auditor ISPS Code	Laporan	1	0	0	153.650.000	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Patroli dan Pengamanan					
SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP6	Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	97,75	Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																		
						1. Pengadaan Sarana Pendukung Maritime Coordinator Center (MCC)	Peralatan	1	0	0	-	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Telekomunikasi Pelayaran					
						2. Pengembangan Sistem Informasi Telekomunikasi pelayanan Terintegrasi	Peralatan	1	0	0	-	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Telekomunikasi Pelayaran					
						3. Monitoring Pembangunan dan Pengoperasian SBNP dan Bengket Kenavigasian	Laporan	1	1	100	900.000.000	78	1	889.393.000	100	98,82	kegiatan dalam proses pelaksanaan	monitor lanjut	Subdit Perambuan dan Perbengkelan					

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan		Juni		Realisasi Bulan	Juni	% Capaian Bulan	Juni	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab					
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran								
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%								
SP.4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP7	Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0,6	4	Monitoring Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengoperasian Sarana dan Prasarana Telekomunikasi Pelayaran	Laporan	1	1	100	1.200.000.000	78	1	1.180.330.000	100	98,36	kegiatan dalam proses pelaksanaan	monitor lanjut	Subdit Telekomunikasi Pelayaran			
						5	Development and Improvement of Indonesian Aids to Navigation (ATON) Project	Paket	1	0	0	12.500.000.000	0	0	12.038.258.695	100	96,31	kegiatan dalam proses pelaksanaan	monitor lanjut	Subdit Perambuan dan Perbengkelan			
						6	Pemeliharaan Maritime Coordinator Center (MCC)	Peralatan	1	0	0	-	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Telekomunikasi Pelayaran			
						Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																	
						1.	Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	Jumlah	1	1	100	-	-	1	-	100	-	-	Telah terlaksana sesuai dengan target	Monitor lanjut	Subdit Pencegahan Pencemaran dan manajemen keselamatan Kapal dan Perlindungan di Perairan		
						2.	Monitor Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal Melalui Data Collecting System (DCS)	Laporan	1	1	100	-	-	1	-	100	-	-	Telah terlaksana sesuai dengan target	Monitor lanjut	Subdit Pencegahan Pencemaran dan manajemen keselamatan Kapal dan Perlindungan di Perairan		
		IKP8	Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	100	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal																	
						1	Lathian Pra Exercise Regional Marine Pollution Exercise (Pra-Regional Marpoxex) dan (Regional Marpoxex) in Philippine	Laporan	1	0	0	2.107.113.000	0	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air		
						2	Pembekalan Personil Penanggulangan Pencemaran Tingkat Opearior	Laporan	1	0	0	367.720.000	0	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air		
						3	Pembekalan personil Search And Rescue (SAR) di Perairan dan Pelabuhan	Laporan	1	0	0	291.100.000	0	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air		
4	Rapat Koordinasi di Lingkungan Perlindungan Lingkungan Maritime	Laporan	1	0	0	-	0	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air								

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

**BULAN :** Juli **TAHUN :** 2024

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan				Realisasi Bulan		Juli		% Capaian Bulan		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab		
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja		Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja					Capaian Anggaran	
								Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%				Volume	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
SP.1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP1 Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0,9	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal		16	16	100	17.925.831.592	73,32	16	17.925.831.592	100	73,32	1. Pagu awal Rp 28.949.351.000. 2. Pagu revisi Rp 24.440.351.000. 3. Terjadi kekurangan anggaran Rp 4.500.000.000.	Monitor Lanjut	Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri				
					1 Layanan angkutan rede (16 layanan)	Jumlah kapal rede yang beroperasi	30	30	100	193.137.271.434	49,42	30	193.137.271.434	100	49,42	1. Pagu awal Rp 538.231.358.000 2. Pagu revisi Rp 390.775.496.000.	Monitor Lanjut	Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri				
					2 Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (PEN) (30 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis (PEN)	77	77	100	465.783.617.964	47,59	77	465.783.617.964	100	47,59	1. Pagu awal Rp 987.327.237.477 Pagu revisi Rp 978.656.161.347	Monitor Lanjut	Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri				
					3 Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (77 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis prioritas nasional	39	39	100	189.209.667.890	32,26	39	189.209.667.890	100	32,26	1. Pagu awal Rp 764.410.315.000 2. Pagu revisi Rp 586.546.743.000	Monitor Lanjut	Kasubdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait				
					4 Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (39 layanan)	Jumlah trayek tol laut	6	6	100	29.718.577.605	33,66	6	29.718.577.605	100	33,66	Pagu awal Rp 88.302.005.000.	Monitor Lanjut	Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri				
SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP2	Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	%	27	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal		37	37	100	-	-	37	-	100,00	-	Jumlah trayek tetap dan teratur = 138 trayek. Target jumlah trayek 2024 = 37 trayek. Realisasi s/d Juli 2024 = 37 trayek. Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur = 37 trayek / 138 trayek x 100% = 27 %	Monitor Lanjut	Dir. Lala Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri dan Kasubdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait			
						Rekapitulasi laporan pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	Jumlah trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	9	1	11%	53.846.000	12%	1	53.846.000	100%	100%			Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan			
SP.3	Meningkatnya keselamatan dan pengurangan dan penganggulangan pencemaran laut	IKP4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,09	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal		8	5	63%	1.073.162.000	70,02	5	751.449.927	62,50	70,02	kegiatan telah dilaksanakan 5 kali	monitor lanjut	Subdit Sarpras			
						1. Sosialisasi keselamatan pelayaran	Laporan	1	0	0%	-	0%	0	-	100%	100%			Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan			
						2. Bimbingan Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	Kegiatan	1	0	0%	-	0%	0	-	100%	100%			Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan			
SP.3	Meningkatnya keselamatan dan pengurangan dan penganggulangan pencemaran laut	IKP4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,09	3. Studi Penyusunan Pedoman Teknis Perhitungan, Penetapan dan Pelaporan Capaian Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	Pedoman	1	0	0%	-	0%	0	-	100%	100%			Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan			
						1. Monitoring Standar Kinerja Pelayanan Operasional	Kegiatan	1	0	0%	-	0%	0	-	100%	100%			Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan			
						2. Bimbingan Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	Kegiatan	1	0	0%	-	0%	0	-	100%	100%			Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan			
						3. Studi Penyusunan Pedoman Teknis Perhitungan, Penetapan dan Pelaporan Capaian Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	Pedoman	1	0	0%	-	0%	0	-	100%	100%			Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan			
						1. Sosialisasi keselamatan pelayaran	Laporan	1	1	100	153.970.000	78,88	1	121.445.000	100	78,88	kegiatan telah dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar			
						2. Bimbingan Teknis Tata Cara Penanganan Barang Berbahaya Padat di Pelabuhan	Laporan	1	1	100	153.970.000	93,42	1	143.835.600	100	93,42	kegiatan telah dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar			
						3. Bimbingan Teknis Tata Cara Penanganan Barang Berbahaya Padat di Pelabuhan	Laporan	1	1	100	153.970.000	93,42	1	143.835.600	100	93,42	kegiatan telah dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar			
4. Bimbingan Teknis Tata Cara Penanganan Barang Berbahaya Padat di Pelabuhan	Laporan	1	1	100	153.970.000	93,42	1	143.835.600	100	93,42	kegiatan telah dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar									
5. Penguksahan Pejabat Pemeriksa Kecelakaan Kapal dan Pejabat Pemeriksa Kelalautan dan Keamanan Kapal Asing	Laporan	1	1	1	429.360.000	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar							
6. Asistensi Monitoring Evaluasi dan Investigasi Bidang kecelakaan Kapal dan Pemeriksa Kapal	Laporan	21	10	47,619	403.200.000	46,85	10	188.918.381	47,62	24,84	kegiatan dilaksanakan sepanjang tahun	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar									
7. Monitoring n. dan Evaluasi Bidang Keselamatan dan Keamanan Kapal Asing	Laporan	10	5	50	190.500.000	43,51	3	82.890.000	50	43,51	kegiatan dilaksanakan sepanjang tahun	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar									
SP.3	Meningkatnya keselamatan dan pengurangan dan penganggulangan pencemaran laut	IKP5	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,28	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal		1	0	0	3.740.320.000	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Patroli dan Pengamanan			
						1. Pengadaan Perizinan dan distribusi Amunisi dan Lemam Senjata Api	Paket	1	0	0	150.500.000	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Patroli dan Pengamanan			
						2. Peningkatan keterampilan ISPS CODE	Laporan	1	0	0	153.650.000	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Patroli dan Pengamanan			
						3. Penguksahan Auditor ISPS Code	Laporan	1	0	0	100.000.000	98,0	3	97.972.000	100	98,0	kegiatan sudah dilaksanakan di 3 lokasi	monitor lanjut	Subdit Patroli dan Pengamanan			
SP.4	Meningkatnya kinerja pengurangan dan penganggulangan pencemaran laut	IKP6	Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	97,75	Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk melakukan		1	0	0	-	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Telekomunikasi Pelayaran			
						1. Pengadaan Sarana Pendukung Maritime Coordinator Center (MCC)	Peralatan	1	0	0	-	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Telekomunikasi Pelayaran			
						2. Pengembangan Sistem Informasi Telekomunikasi pelayaran Terintegrasi	Peralatan	1	0	0	-	0	0	0	0	0	kegiatan dalam proses pelaksanaan	monitor lanjut	Subdit Perambuan dan Perbengkelan			
						3. Monitoring Pembangunan dan Pengoperasian SBNP dan Bengkel Kenavigasian	Laporan	1	1	100	1.147.995.000	100	0	1.140.974.000	100	99,39	kegiatan dalam proses pelaksanaan	monitor lanjut	Subdit Telekomunikasi Pelayaran			
						4. Monitoring Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengoperasian Sarana dan Prasarana Telekomunikasi Pelayaran	Laporan	1	1	100	1.360.000.000	88	0	1.353.713.000	100	99,54	kegiatan dalam proses pelaksanaan	monitor lanjut	Subdit Telekomunikasi Pelayaran			
						5. Development and Improvement of Indonesian Aids to Navigation (ATON) Project	Paket	1	0	0	12.500.000.000	0	0	12.038.258.695	100	96,31	kegiatan dalam proses pelaksanaan	monitor lanjut	Subdit Perambuan dan Perbengkelan			
SP.4	Meningkatnya kinerja pengurangan dan penganggulangan pencemaran laut	IKP7	Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0,6	Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan hal-hal		1	1	100	-	-	1	-	100	-	Telah terlaksana sesuai dengan target	Monitor lanjut	Subdit Pencegahan Pencemaran dan manajemen keselamatan Kapal dan Perlindungan di Perairan			
						1. Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	Jumlah	1	1	100	-	-	1	-	100	-	Telah terlaksana sesuai dengan target	Monitor lanjut	Subdit Pencegahan Pencemaran dan manajemen keselamatan Kapal dan Perlindungan di Perairan			
						2. Monitor Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal Melalui Data Collecting System (DCS)	Laporan	1	1	100	-	-	1	-	100	-	Telah terlaksana sesuai dengan target	Monitor lanjut	Subdit Pencegahan Pencemaran dan manajemen keselamatan Kapal dan Perlindungan di Perairan			
						Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan hal-hal		1	1	100	2.107.113.000	62,27	1	1.312.150.052,00	100,00	62,27	selesai	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air			
SP.4	Meningkatnya kinerja pengurangan dan penganggulangan pencemaran laut	IKP8	Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	100	1. Latihan Pra Exercise Regional Marine Pollution Exercise (Pra-Regional Marpolx) dan (Regional Marpolx) in Philippine	Laporan	1	1	100	2.107.113.000	62,27	1	1.312.150.052,00	100,00	62,27	selesai	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air			
						2. Pembekalan Personil Penanggulangan Pencemaran Tingkat Operator	Laporan	1	0	0	367.720.000	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air			
						3. Pembekalan personil Search And Rescue (SAR) di Perairan dan Pelabuhan	Laporan	1	0	0	291.100.000	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air			
						4. Rapat Koordinasi di Lingkungan Perlindungan Lingkungan Maritime	Laporan	1	0	0	-	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air			

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

BULAN : Agustus TAHUN : 2024

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan				Realisasi Bulan				% Capaian Bulan	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja		Realisasi Anggaran					
								Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%				
								(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
SP.1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut nasional	IKP1 Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0.9	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-	Jumlah kapal rede yang beroperasi	16	16	100	30.101.200.667	66,67	16	24.449.351.000	100	54,15	1. Pagu awal Rp 28.849.351.000. 2. Pagu revisi Rp 24.449.351.000. 3. Pagu revisi Rp 45.151.801.000.	Monitor Lanjut	Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri	
								30	100	227.177.353.439	53,87	30	227.177.353.439	100	53,87	1. Pagu awal Rp 538.231.358.000. 2. Pagu revisi Rp 390.775.496.000. 3. Pagu revisi Rp 421.753.136.000	Monitor Lanjut	Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri	
								77	100	465.783.617.964	47,59	77	465.783.617.964	100	47,59	Pagu awal Rp 987.327.237.477 Pagu revisi Rp 978.656.161.347	Monitor Lanjut	Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri	
								39	100	242.099.792.123	37,25	39	242.455.649.313	100	37,30	1. Pagu awal Rp 764.410.315.000 2. Pagu revisi Rp 566.546.743.000 3. Pagu revisi Rp 649.932.301.000	Monitor Lanjut	Kasubdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait	
								6	100	35.045.112.488	39,75	6	35.062.873.622	100	39,77	Pagu awal Rp 88.163.805.000.	Monitor Lanjut	Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri	
SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3 Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pelabuhan	%	83,00	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-	Jumlah trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	37	37	100	-	-	37	-	100,00	-	Jumlah trayek tetap dan teratur = 138 trayek. Target jumlah trayek 2024 = 37 trayek. Realisasi s/d Agustus 2024 = 37 trayek. Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur = 37 trayek / 138 trayek x 100% = 27 %	Monitor Lanjut	Dir. Lala Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri dan Kasubdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait	
								9	22%	73.660.000	17%	2	73.660.000	100%	100%				Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan
SP.3	Meningkatnya keselamatan dan kecekatan transportasi	IKP4 Rasio kejadian kecelakaan transportasi	/10.000 Pelayaran	1,09	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-	Laporan	8	6	75%	1.073.162.000	72,23	6	775.149.927	75,00	72,23	Kegiatan telah dilaksanakan 6 kali	monitor lanjut	Subdit Sarpras	
								1	0%	0	0%	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar	
								1	100	153.970.000	78,88	1	121.445.000	100	78,88	kegiatan telah dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar	
								1	100	153.970.000	93,42	1	143.835.600	100	93,42	kegiatan telah dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar	
								1	1	429.360.000	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar	
								21	10	47.619	403.200.000	46,85	10	188.918.361	47,62	24,84	kegiatan dilaksanakan sepanjang tahun	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar
								10	5	50	190.500.000	43,51	3	82.890.000	50	43,51	kegiatan dilaksanakan sepanjang tahun	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar
SP.4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP5 Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,28	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-	Paket	1	0	0	3.740.320.000	0	0	0	0	0	proses pokja	monitor lanjut	Dir. KPLP Subdit Pengamanan dan Patroli	
								1	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Patroli dan Pengamanan	
								1	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Patroli dan Pengamanan	
								3	100	100.000.000	98,0	3	97.972.000	100	98,0	kegiatan sudah dilaksanakan di 3 lokasi	monitor lanjut	Subdit Patroli dan Pengamanan	
								1	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Telekomunikasi Pelayaran	
SP.4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP6 Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	97,75	Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk	Peralatan	1	0	0	-	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Telekomunikasi Pelayaran		
								1	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Telekomunikasi Pelayaran	
								1	100	1.147.995.000	100	0	1.140.974.000	100	99,39	kegiatan dalam proses pelaksanaan	monitor lanjut	Subdit Perambuan dan Perbengkelan	
								1	100	1.380.000.000	88	0	1.353.713.000	100	99,54	kegiatan dalam proses pelaksanaan	monitor lanjut	Subdit Telekomunikasi Pelayaran	
SP.4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP7 Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 mm)	Rasio	0,6	Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan hal-	Jumlah	1	1	100	-	-	1	-	100	-	Telah terlaksana sesuai dengan target	Monitor lanjut	Subdit Pencegahan Pencemaran dan manajemen keselamatan Kapal dan Perlindungan di Perairan	
								1	100	-	-	1	-	100	-	Telah terlaksana sesuai dengan target	Monitor lanjut	Subdit Pencegahan Pencemaran dan manajemen keselamatan Kapal dan Perlindungan di Perairan	
								1	100	367.720.000	6,41	1	23.578.000,00	0	0	selesai, menunggu proses pencairan	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air	
								1	0	0	291.100.000	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air	
SP.4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP8 Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	100	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-	Laporan	1	1	100	2.107.113.000	79,26	1	1.670.158.352,00	100,00	79,26	selesai	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air	
								1	100	367.720.000	6,41	1	23.578.000,00	0	0	selesai, menunggu proses pencairan	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air	
								1	0	0	291.100.000	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air	
								1	0	0	-	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air	

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

**BULAN :** September **TAHUN :** 2024

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan		September		Realisasi Bulan		September		% Capaian Bulan		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab					
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja		Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja					Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%				Volume	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)							
SP.1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP1 Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0,9	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal	Jumlah kapal rede yang beroperasi	16	16	100	30.101.200.667	66,67	16	29.205.048.314	100	64,68	1. Pagu awal Rp 28.949.351.000. 2. Pagu revisi Rp 24.449.351.000. 3. Pagu revisi Rp 45.151.801.000.	Monitor Lanjut	Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri							
								30	100	268.653.121.707	63,70	30	268.653.121.707	100	63,70	1. Pagu awal Rp 538.231.358.000 2. Pagu revisi Rp 390.775.496.000. 3. Pagu revisi Rp 421.753.136.000	Monitor Lanjut	Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri							
								77	100	733.992.121.010	75,00	77	733.992.121.010	100	75,00	Pagu awal Rp 987.327.237.477 Pagu revisi Rp 978.656.161.347	Monitor Lanjut	Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri							
								39	100	252.559.155.000	38,86	39	286.634.497.816	100	44,10	1. Pagu awal Rp 764.410.315.000 2. Pagu revisi Rp 586.546.743.000 3. Pagu revisi Rp 549.532.301.000 4. Pagu revisi Rp 757.677.465.000	Monitor Lanjut	Kasubdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait							
								6	100	40.775.759.813	46,25	6	40.933.936.553	100	46,43	Pagu awal Rp 98.163.805.000.	Monitor Lanjut	Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri							
IKP2	Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	%	27	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal	Jumlah trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	37	37	100	-	-	37	-	100,00	-	Jumlah trayek tetap dan teratur = 138 trayek. Target jumlah trayek 2024 = 37 trayek. Realisasi s/d September 2024 = 37 trayek. Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur = 37 trayek / 138 trayek x 100% = 27 %	Monitor Lanjut	Dir. Lala Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri dan Kasubdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait								
							9	0%	-	0%	0	-	100%	100%							Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan				
SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3 Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pelabuhan	%	83,00	Menunjuk Dir. Kepeleabuhanan untuk	Kegiatan	1	1	100%	-	0%	1	-	100%	100%					Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan					
								1	0%	-	0%	0	-	100%	100%							Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan			
								1	0%	-	0%	0	-	100%	100%							Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan			
SP.3	Meningkatnya keselamatan dan	IKP4 Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,00	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal	Laporan	10	6	60%	1.458.735.000	53,14	6	775.149.927	60,00	53,14	kegiatan telah dilaksanakan 6 kali	monitor lanjut	Subdit Sarpras							
								1	1	1	409.560.000	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar						
								1	100	153.970.000	78,88	1	121.445.000	100	78,88	selesai	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar							
								1	100	153.970.000	93,42	1	143.835.600	100	93,42	selesai	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar							
								1	100	429.360.000	0	1	0	100	0	selesai, menunggu proses pencairan	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar							
								12	57,143	403.200.000	49,10	12	197.963.381	57,14	49,10	kegiatan dilaksanakan sepanjang tahun	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar							
								5	50	190.500.000	43,51	3	82.890.000	50	43,51	kegiatan dilaksanakan sepanjang tahun	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar							
IKP5	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,28	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal	Paket	1	1	0	3.740.320.000	0	0	0	0	0	proses pokja	monitor lanjut	Dir. KPLP Subdit Patroli dan Pengamanan								
							1	100	150.500.000	0	1	0	100	0	selesai, menunggu proses pencairan	monitor lanjut	Subdit Patroli dan Pengamanan								
							1	100	153.650.000	0	1	0	100	0	selesai, menunggu proses pencairan	monitor lanjut	Subdit Patroli dan Pengamanan								
							3	100	100.000.000	98,0	3	97.972.000	100	98,0	kegiatan sudah dilaksanakan di 3 lokasi	monitor lanjut	Subdit Patroli dan Pengamanan								
							1	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Telekomunikasi Pelayaran								
							1	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Telekomunikasi Pelayaran								
IKP6	Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	97,75	Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk melakukan	Peralatan	1	0	0	-	0	0	0	0	0	kegiatan dalam proses pelaksanaan	monitor lanjut	Subdit Perambuan dan Perbengkelan								
							1	100	1.147.995.000	100	0	1.140.974.000	100	99,39	kegiatan dalam proses pelaksanaan	monitor lanjut	Subdit Telekomunikasi Pelayaran								
							1	100	1.360.000.000	88	0	1.353.713.000	100	99,54	kegiatan dalam proses pelaksanaan	monitor lanjut	Subdit Telekomunikasi Pelayaran								
							1	0	12.500.000.000	0	0	12.038.258.695	100	96,31	kegiatan dalam proses pelaksanaan	monitor lanjut	Subdit Perambuan dan Perbengkelan								
							1	0	100.000.000	0	0	96.793.000	0	95,79	kegiatan dalam proses pelaksanaan	monitor lanjut	Subdit Telekomunikasi Pelayaran								
							1	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan dalam proses pelaksanaan	monitor lanjut	Subdit Telekomunikasi Pelayaran								
SP.4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penganggulangan pencemaran laut	IKP7 Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0,6	Menunjuk Dir. KAPREL untuk melakukan hal-hal	Jumlah	1	1	100	-	-	1	-	100	-	100	100	100	100	100	Telah terlaksana sesuai dengan target	Monitor lanjut	Subdit Pencegahan Pencemaran dan manajemen keselamatan Kapal dan Perlindungan di Perairan		
								1	100	-	-	1	-	100	-	100	-	100	-	100	100	100	Telah terlaksana sesuai dengan target	Monitor lanjut	Subdit Pencegahan Pencemaran dan manajemen keselamatan Kapal dan Perlindungan di Perairan
								1	100	1.692.740.000	98,67	1	1.670.158.352,00	100,00	98,67	selesai	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Muabah dan Pekerjaan Bawah Air							

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan		September		Realisasi Bulan	September	% Capaian Bulan	September	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%				
					2	Pembekalan Personil Penanggulangan Pencemaran Tingkat Opearior	Laporan	1	1	100	367.720.000	6,41	1	13.578.000	100	0	selesai, menunggu proses pencairan	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air
					3	Pembekalan personil Search And Rescue (SAR) di Perairan dan Pesisir	Laporan	1	1	100	291.100.000	0	1	0	100	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air
					4	Rapat Koordinasi di Lingkungan Perlindungan Lingkungan Maritime	Laporan	1	0	0	-	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air





NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan		Oktober		Realisasi Bulan	Oktober	% Capaian Bulan	Oktober	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%				
		IKPS Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	100	2. Monitor Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal Melalui Data Collecting System (DCS)	Laporan	1	1	100	-	-	1	-	100	-	Telah terlaksana sesuai dengan target	Monitor lanjut	Subdit Pencegahan Pencemaran dan manajemen keselamatan Kapal dan Perlindungan di Perairan	
	Menunjuk Dir. KPPLP untuk melakukan hal-hal																		
	1. Latihan Pra Exercise Regional Marine Pollution Exercise (Pra-Regional Marpolex) dan (Regional Marpolex) in Philippine				Laporan	1	1	100	1.670.656.000	99,97	1	1.670.158.352,00	100,00	99,97	selesai	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air		
	2. Pembekalan Personil Penanggulangan Pencemaran Tingkat Opeartor				Laporan	1	1	100	238.671.000	100,00	1	238.660.500	100	100,00	selesai	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air		
	3. Pembekalan personil Search And Rescue (SAR) di Perairan dan Pelabuhan				Laporan	1	1	100	235.760.000	99,59	1	234.788.425	100	99,59	selesai	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air		
					4. Rapat Koordinasi di Lingkungan Perlindungan Lingkungan Maritime	Laporan	1	0	0	-	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air		

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

**BULAN : November TAHUN : 2024**

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan		November		Realisasi Bulan		November		% Capaian Bulan		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab		
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja		Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja					Capaian Anggaran	
								Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%				Volume	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
SP.1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP1	Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0,9	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal		16	16	100	36.250.411.158	69,17	16	36.359.183.009	100	64,37	1. Pagu awal Rp 28.949.351.000. 2. Pagu revisi Rp 24.440.351.000. 3. Pagu revisi Rp 45.151.801.000. 4. Pagu revisi Rp 52.410.233.000	Monitor Lanjut	Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri			
						1 Layanan angkutan rede (16 layanan)	Jumlah kapal rede yang beroperasi	30	30	100	305.445.636.392	69,17	30	306.555.959.821	100	69,42	1. Pagu awal Rp 538.231.358.000. 2. Pagu revisi Rp 390.775.496.000. 3. Pagu revisi Rp 421.753.136.000 4. Pagu revisi Rp 441.698.149.000	Monitor Lanjut	Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri			
						2 Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (PEN) (30 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis (PEN)	77	77	100	897.101.481.235	91,67	77	897.101.481.235	100	91,67	Pagu awal Rp 987.227.237.477 Pagu revisi Rp 978.656.161.347	Monitor Lanjut	Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri			
						3 Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (77 layanan)	Jumlah trayek angkutan laut perintis prioritas nasional	37	37	100	352.182.817.000	46,67	37	356.248.517.302	100	47,21	1. Pagu awal Rp 764.410.315.000 2. Pagu revisi Rp 586.546.743.000 3. Pagu revisi Rp 640.932.301.000 4. Pagu revisi Rp 757.677.465.000 5. Pagu revisi Rp 754.677.465.000 6. Terjadi perubahan jumlah trayek, semula 39 menjadi 37	Monitor Lanjut	Kasubdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait			
						4 Layanan angkutan laut prioritas nasional (37 layanan)	Jumlah trayek tol laut	6	6	100	47.215.072.333	58,33	6	47.744.499.872	100	58,99	Pagu awal Rp 88.163.805.000. Pagu revisi Rp 80.940.124.000	Monitor Lanjut	Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri			
		5 Layanan angkutan ternak prioritas nasional (6 layanan)	Jumlah trayek angkutan ternak																			
		IKP2	Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	%	27	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal		37	37	100	-	-	37	-	-	100,00	-	Jumlah trayek tetap dan teratur = 138 trayek. Target jumlah trayek 2024 = 37 trayek. Realisasi s/d November 2024 = 37 trayek. Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur = 37 trayek / 138 trayek x 100% = 27 %	Monitor Lanjut	Dir. Laut Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri dan Kasubdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait		
SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pelabuhan	%	83,00	Menunjuk Dir. Kebutuhan untuk																
						1 Monitoring Standar Kinerja Pelayanan Operasional	Kegiatan	9	0	0%	-	0%	0	100%	100%							
						2 Bimbingan Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	Kegiatan	1	1	100%	-	0%	1	-	100%	100%						
SP.3	Meningkatnya keselamatan dan	IKP4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,09	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal																
						1 Sosialisasi keselamatan pelayaran	Laporan	10	7	70%	1.073.162.000	81,47	7	874.344.522	70,00	81,47	Kegiatan telah dilaksanakan 7 kali	monitor lanjut	Subdit Sarpras			
						2 Bimbingan Teknis Pemeriksa Kecelakaan Kapal dan Pemeriksa Kelalailautan dan Keselamatan Kapal Asing	Laporan	1	1	1	409.560.000	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Tertib Berlayar			
SP.4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP6	Tingkat kehandalan komunikasi	%	97,75	Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan hal-hal																
						1 Pengembangan Sarana Pendukung Maritime Coordinator Center (MCC)	Peralatan	1	1	100	1.475.003.520	#	1	1.475.003.520	###	100	kegiatan telah dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Telekomunikasi Pelayaran			
						2 Pengembangan Sistem Informasi Telekomunikasi pelayaran Terintegrasi	Peralatan	1	1	100	3.490.950.000	#	1	3.490.950.000	###	100	kegiatan telah dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Telekomunikasi Pelayaran			
						3 Monitoring Pembangunan dan Pengoperasian SBNP dan Bengkel Kenavigasian	Laporan	1	1	100	1.147.995.000	#	1	1.140.974.000	###	99	kegiatan telah dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Perambuan dan Perbengkelan			
						4 Monitoring Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengoperasian Sarana dan Prasarana Telekomunikasi Pelayaran	Laporan	1	1	100	1.870.000.000	#	1	1.843.097.000	###	99	kegiatan telah dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Telekomunikasi Pelayaran			
						5 Development and Improvement of Indonesian Aids to Navigation (ATON) Project	Paket	1	1	100	17.400.000.000	#	1	17.388.595.893	###	100	kegiatan dalam proses pelaksanaan	monitor lanjut	Subdit Perambuan dan Perbengkelan			
						6 Pemeliharaan Maritime Coordinator Center (MCC)	Peralatan	1	1	100	245.000.000	#	1	243.946.920	###	100	kegiatan dalam proses pelaksanaan	monitor lanjut	Subdit Telekomunikasi Pelayaran			
						1 Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	Jumlah	1	1	100	-	-	1	-	100	-	Telah terlaksana sesuai dengan target	Monitor lanjut	Subdit Pencegahan Pencemaran dan manajemen keselamatan Kapal dan Perlindungan di Perairan			

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan		November		Realisasi Bulan	November	% Capaian Bulan	November	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%				
		IKPS Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	100	2. Monitor Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal Melalui Data Collecting System (DCS)	Laporan	1	1	100	-	-	1	-	100	-	Telah terlaksana sesuai dengan target	Monitor lanjut	Subdit Pencegahan Pencemaran dan manajemen keselamatan Kapal dan Perlindungan di Perairan	
	Menunjuk Dir. KPPLP untuk melakukan hal-hal																		
	1. Latihan Pra Exercise Regional Marine Pollution Exercise (Pra-Regional Marpolex) dan (Regional Marpolex) in Philippine				Laporan	1	1	100	1.670.656.000	99,97	1	1.670.158.352,00	100,00	99,97	selesai	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air		
	2. Pembekalan Personil Penanggulangan Pencemaran Tingkat Opeartor				Laporan	1	1	100	238.671.000	100,00	1	238.660.500	100	100,00	selesai	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air		
	3. Pembekalan personil Search And Rescue (SAR) di Perairan dan Pelabuhan				Laporan	1	1	100	235.760.000	99,59	1	234.788.425	100	99,59	selesai	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air		
					4. Rapat Koordinasi di Lingkungan Perlindungan Lingkungan Maritime	Laporan	1	0	0	-	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air	



NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan		Desember		Realisasi Bulan		Desember		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja		Realisasi Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%			
	pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0.5 m/m)		100	1. Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	Jumlah	1	1	100	-	-	1	-	100	-	Telah terlaksana sesuai dengan target	Monitor lanjut	Subdit Pencegahan Pencemaran dan manajemen keselamatan Kapal dan Perlindungan di Perairan
		2. Monitor Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal Melalui Data Collecting System (DCS)			Laporan	1	1	100	-	-	1	-	100	-	Telah terlaksana sesuai dengan target	Monitor lanjut	Subdit Pencegahan Pencemaran dan manajemen keselamatan Kapal dan Perlindungan di Perairan	
		IKPB			Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-													
		Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%		1. Latihan Pra Exercise Regional Marine Pollution Exercise (Pra-Regional Marpoxex) dan (Regional Marpoxex) in Philippine	Laporan	1	1	100	1.670.656.000	99,97	1	1.670.158.352,00	100,00	99,97	selesai	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air
					2. Pembekalan Personil Penanggulangan Pencemaran Tingkat Operator	Laporan	1	1	100	238.671.000	100,00	1	238.660.500	100	100,00	selesai	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air
					3. Pembekalan personil Search And Rescue (SAR) di Perairan dan Pelabuhan	Laporan	1	1	100	235.760.000	99,59	1	234.788.425	100	99,59	selesai	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air
					4. Rapat Koordinasi di Lingkungan Perlindungan Lingkungan Maritime	Laporan	1	0	0	-	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	monitor lanjut	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab			
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
SP.1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP1	Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0,95	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Dir. LALA		
						1 Layanan angkutan rede (16 layanan)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	28.949.351.000	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri
						2 Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (PEN) (30 layanan)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	320.350.544.000	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri
						3 Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional (77 layanan)	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	1.011.164.405.358	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri
						4 Layanan angkutan tol laut prioritas nasional (39 layanan)	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	541.895.601.000	Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait
		5 Layanan angkutan ternak prioritas nasional (6 layanan)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	64.276.670.000	Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri				
		IKP2	Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	%	27	Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															Dir. LALA	
					1 Pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27		Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri dan Subdit Angkutan Laut Khusus Dan Usaha Jasa Terkait			
SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	85%	Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Dir. Kepelabuhanan		
						1 Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	433.741.000	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan		
						2 Bimbingan Standar Kinerja Operasional Pelabuhan				1										523.200.000	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan	
						3 Rekapitulasi laporan capaian standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	Subdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan	
SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	0,8	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Dir. KPLP		
						1 Sosialisasi Keselamatan Pelayaran		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	904.160.000	Subdit Tertib Berlayar		
						2 Bimbingan Teknis Pemeriksa Kecelakaan Kapal dan Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing		1							1					409.560.000	Subdit Tertib Berlayar	
						3 Bimbingan Teknis Tata Cara Penanganan Barang Berbahaya								1						153.970.000	Subdit Tertib Berlayar	
						4 Bimbingan Teknis Tata Cara Penanganan Barang Curah Padat di Pelabuhan									1					153.970.000	Subdit Tertib Berlayar	
						5 Pengukuhan Pejabat Pemeriksa Kecelakaan Kapal dan Pejabat									1					429.360.000	Subdit Tertib Berlayar	
					6 Asistensi Monitoring Evaluasi dan Investigasi Bidang Kecelakaan Kapal dan Pemeriksa Kapal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	403.200.000	Subdit Tertib Berlayar				

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran (Rp)	Penanggung jawab
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					7	Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesyahbandaran, Barang Berbahaya, dan Curah Padat		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	190.500.000	Subdit Tertib Belayar
		IKP5	/100.000 Pelayaran	0,26	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Dir. KPLP
			Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut		1	Pengadaan, Perizinan, dan Distribusi Amunisi dan Lemari Senjata Api					1	1	1	1	1	1	1	3.740.320.000	Subdit Patroli dan Pengamanan
					2	Peningkatan Keterampilan ISPS Code							1					150.500.000	Subdit Patroli dan Pengamanan
					3	Penguikuan Auditor ISPS Code							1					153.650.000	Subdit Patroli dan Pengamanan
					4	Verifikasi Ke IV ISPS Code Untuk Pemenuhan Uji Kepatuhan ISPS Code pada Fasilitas Pelabuhan							1	1	1			100.000.000	Subdit Patroli dan Pengamanan
		IKP6	%	97,25	Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Dir. Kenavigasian
			Tingkat kehandalan Kenavigasian		1	Pengadaan Sarana Pendukung Maritime Coordination Center (MCC)									1	1	1	1.500.000.000	Subdit Telekomunikasi Pelayaran
					2	Pengembangan Sistem Informasi Telekomunikasi Pelayaran Terintegrasi									1	1	1	3.500.000.000	Subdit Telekomunikasi Pelayaran
					3	Monitoring Pembangunan dan Pengoperasian SBNP dan Bengkel Kenavigasian	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	550.000.000	Subdit Perambuan dan Perbengkelan
					4	Monitoring Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengoperasian Sarana dan Prasarana Telekomunikasi Pelayaran	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.200.000.000	Subdit Telekomunikasi Pelayaran
					5	Development and Improvement of Indonesian Aids to Navigation (ATON) Project											1	13.500.000.000	Subdit Perambuan dan Perbengkelan
					6	Pemeliharaan Maritime Coordination Center (MCC)							1	1	1	1	1	300.000.000	Subdit Telekomunikasi Pelayaran
SP.4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP7	Rasio	1	Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Dir. KAPPEL
			Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)		1	Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (1 Tahun)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan
					2	Memonitor Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal melalui Data Collecting System (DCS)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Subdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan
		IKP8	%	100	Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Dir. KPLP
			Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di		1	Latihan Pra Exercise Regional Marine Pollution Exercise (Pra-Regional Marpollex) dan Regional Marine Pollution Exercise (Regional Marpollex) In Philippine					1							2.750.940.000	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air
					2	Pembekalan Personil Penanggulangan Pencemaran Tingkat Operator					1							215.655.000	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air

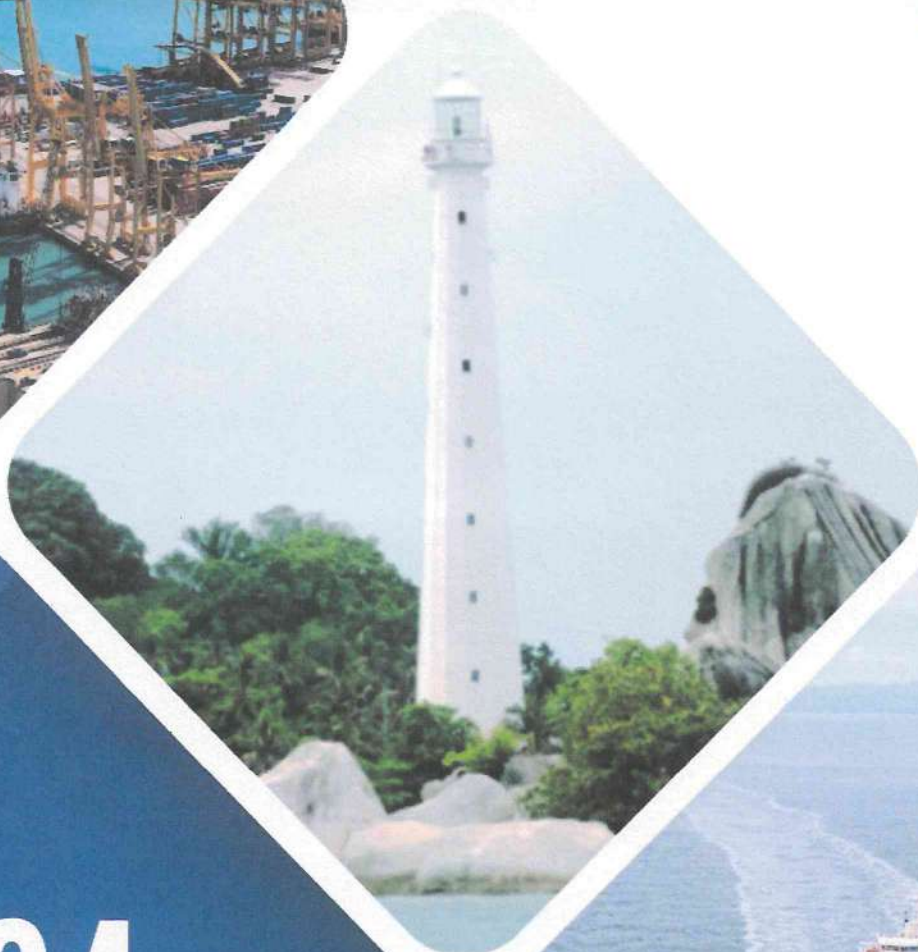


NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		pelabuhan			3	Pembekalan personel Search And Rescue (SAR) di Perairan dan Pelabuhan					1							337.404.000	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air
					4	Rapat Koordinasi di Lingkungan Perlindungan Lingkungan Maritim							1					259.182.000	Subdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air

Jakarta, 2024  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT 



Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc  
NIP. 19730808 199903 1 003



# 2024 PERJANJIAN KINERJA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

 [djpl@dephub.go.id](mailto:djpl@dephub.go.id)

 [@djplkemenhub151](https://www.instagram.com/djplkemenhub151)

 (021)3813269,3842440



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Antoni Arif Priadi  
Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Selanjutnya Disebut Pihak Pertama

Nama : Budi Karya Sumadi  
Jabatan : Menteri Perhubungan

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 19 Januari 2024

Pihak Kedua  
Menteri Perhubungan

Pihak Pertama  
Direktur Jenderal Perhubungan Laut

  
BUDI KARYA SUMADI

  
ANTONI ARIF PRIADI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SP 1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP 1	Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0,95
		IKP 2	Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	%	27
SP 2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP 3	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	85
SP 3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP 4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	0,80
		IKP 5	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,26
		IKP 6	Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	97,25
SP 4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP 7	Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)	Rasio	1
		IKP 8	Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	100

**Kegiatan**

**Anggaran**

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut	Rp. 22.688.952.000,00-
2. Pengelolaan Perencanaan Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Laut	Rp. 3.378.786.538.000,00-
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Laut	Rp. 23.020.119.000,00-
4. Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut	Rp. 7.715.644.000,00-
5. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut	Rp. 964.078.761.000,00-
6. Pelayanan Transportasi Laut	Rp. 2.015.903.587.000,00-
7. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut	Rp. 2.523.429.812.000,00-
8. Penunjang Teknis Transportasi Laut	Rp. 614.403.031.000,00-

Disetujui,  
Menteri Perhubungan

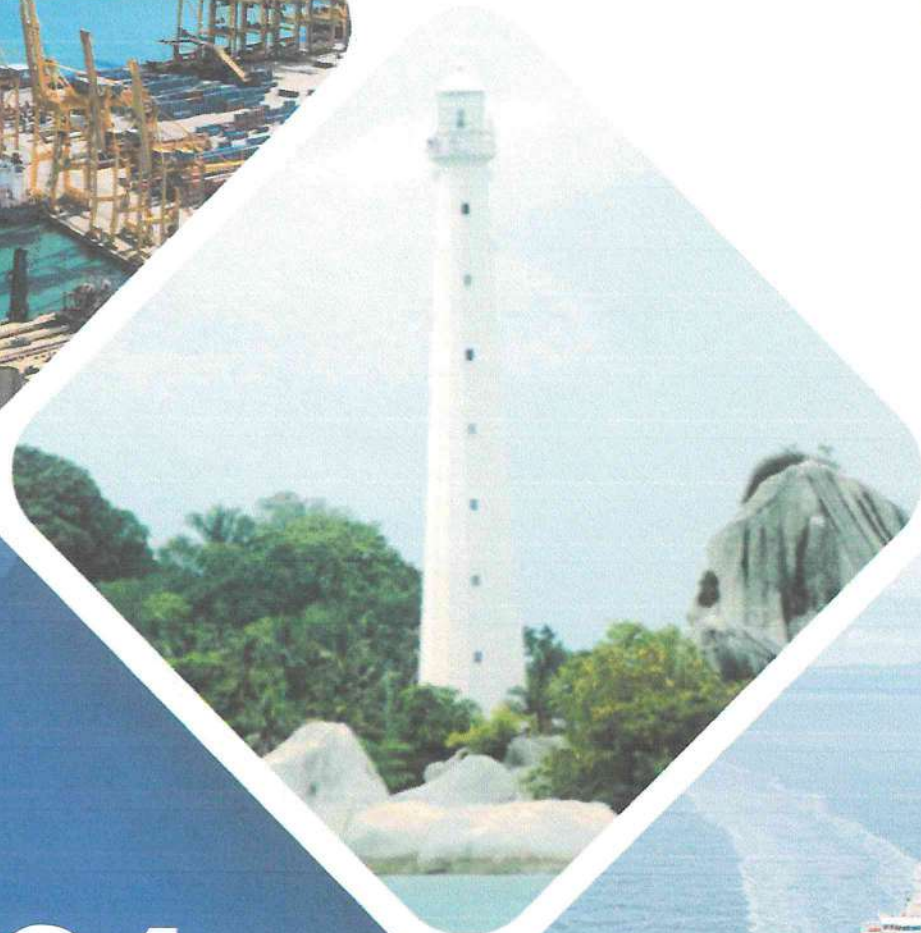


BUDI KARYA SUMADI

Jakarta, 19 Januari 2024  
Direktur Jenderal Perhubungan Laut



ANTONI ARIF PRIADI



# 2024 REVIU PERJANJIAN KINERJA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

## KATA PENGANTAR

Sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, maka disusunlah dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024.

Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024 ini merupakan dokumen pernyataan kesepakatan kinerja antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Menteri Perhubungan untuk mewujudkan target kinerja di tahun 2024. Dokumen ini memuat sasaran strategis, program / kegiatan utama beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja suatu Unit Kerja dapat dilakukan revisi atau penyesuaian dikarenakan terdapat pergantian pimpinan. Sehubungan dengan hal tersebut, Dokumen Reviu Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024 ini disusun.

Diharapkan Reviu Perjanjian Kinerja ini dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan kegiatan program tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Jakarta,







2024

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



ANTONI ARIF PRIADI

NIP. 19730808 199903 1 003

	PERSETUJUAN	TANGGAL	PARAF
1	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT	15 " 24	
2	DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT	6-11-2024	
3	DIREKTUR KEPELABUHANAN	6-11-2024	
4	DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN	11/11/24	
5	DIREKTUR KENAVIGASIAN	11-11-24	
6	DIREKTUR KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI	06-11-24	

## KATA PENGANTAR

Sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, maka disusunlah dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024.

Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024 ini merupakan dokumen pernyataan kesepakatan kinerja antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Menteri Perhubungan untuk mewujudkan target kinerja di tahun 2024. Dokumen ini memuat sasaran strategis, program / kegiatan utama beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja suatu Unit Kerja dapat dilakukan revisi atau penyesuaian dikarenakan terdapat pergantian pimpinan. Sehubungan dengan hal tersebut, Dokumen Reviu Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024 ini disusun.

Diharapkan Reviu Perjanjian Kinerja ini dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan kegiatan program tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Jakarta,

2024

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



ANTONI ARIF PRIADI

NIP. 19730808 199903 1 003



**REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Antoni Arif Priadi  
Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Selanjutnya Disebut Pihak Pertama

Nama : Dudy Purwagandhi  
Jabatan : Menteri Perhubungan

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2024

Pihak Kedua  
Menteri Perhubungan

DUDY PURWAGANDHI

Pihak Pertama  
Direktur Jenderal Perhubungan Laut

ANTONI ARIF PRIADI



**REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SP 1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP 1	Rasio konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0,95
		IKP 2	Persentase pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop secara teratur	%	27
SP 2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP 3	Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul	%	94
SP 3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP 4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	0,80
		IKP 5	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,26
		IKP 6	Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	97,25
SP 4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP 7	Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)	Rasio	1
		IKP 8	Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan	%	100


**Kegiatan**

**Anggaran**

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut	Rp. 28.824.135.000,00-
2. Pengelolaan Perencanaan Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Laut	Rp. 3.487.901.258.000,00-
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Laut	Rp. 23.962.088.000,00-
4. Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut	Rp. 78.963.444.000,00-
5. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut	Rp. 1.596.208.807.000,00-
6. Pelayanan Transportasi Laut	Rp. 2.483.250.606.000,00-
7. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut	Rp. 6.208.044.656.000,00-
8. Penunjang Teknis Transportasi Laut	Rp. 693.235.084.000,00-

Disetujui,

Menteri Perhubungan

  
DUDY PURWAGANDHI

Jakarta,

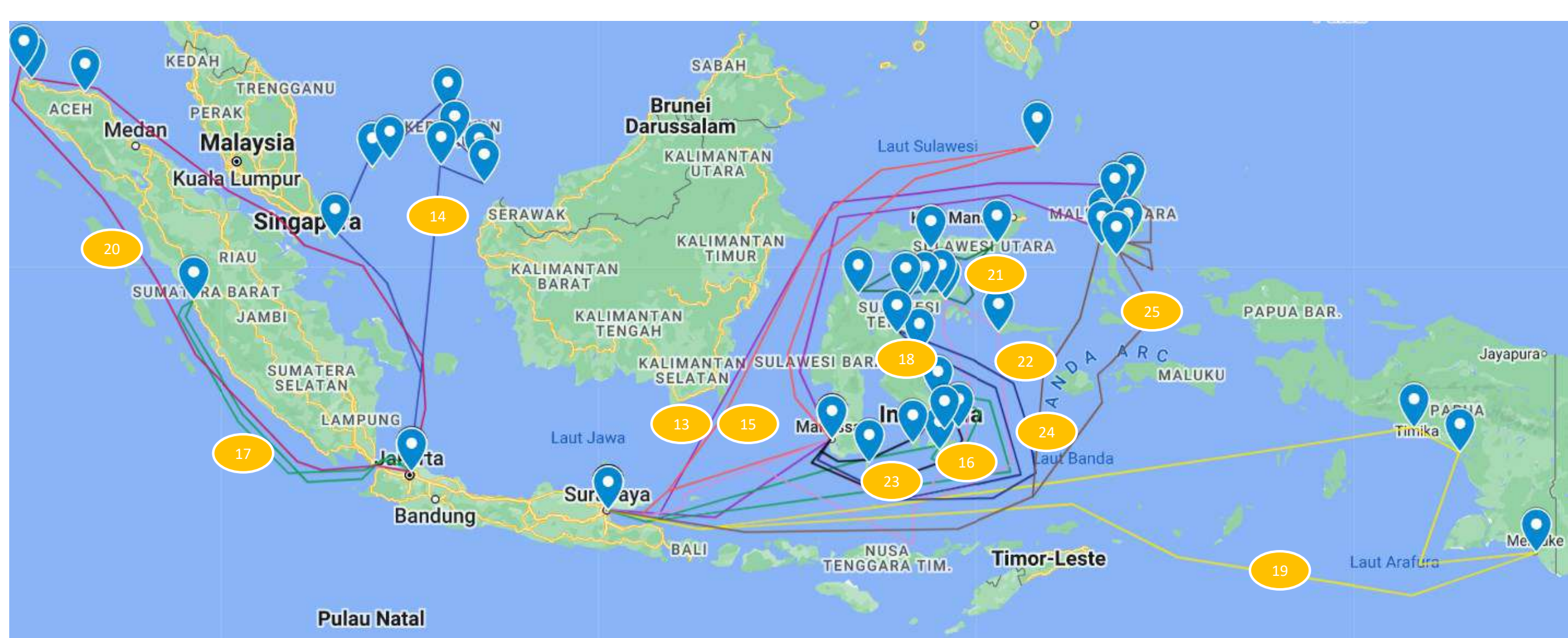
2024

Direktur Jenderal Perhubungan Laut

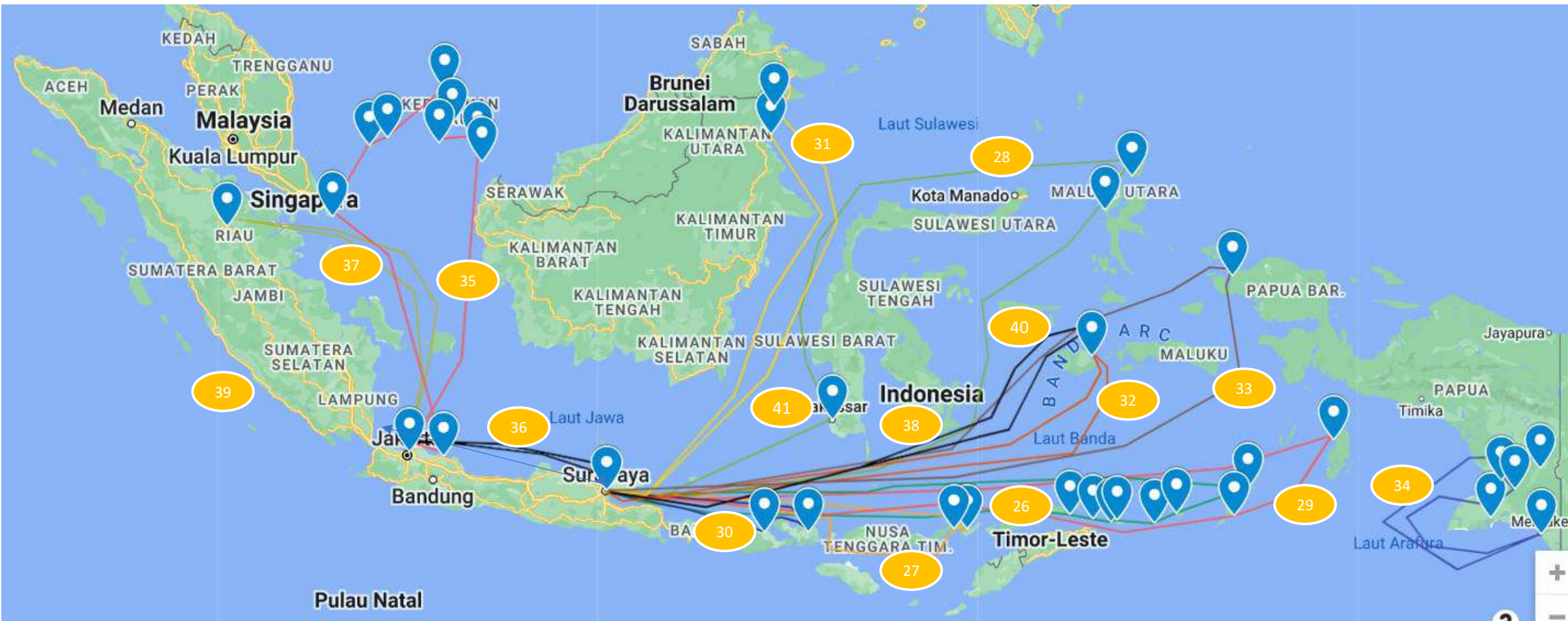
  
ANTONI ARIF PRIADI



1.	Bitung-Ulu Siau-Tagulandang-Tahuna-Marore-Mianga-Marampit-Lirung-Melangoane-Mangarang-Bitung	7.	Makassar-Awerange/Barru-Garongkong-Tanjung Silopo/Polewali-Mamuju-Belang-Belang-Nunukan-Makassar
2.	Tanjung Perak-Wanci-Namrole-Pulau Obi-Tanjung Perak	8.	Tanjung Perak-Larantuka-Lembata-Kalabahi-Tanjung Perak
3.	Tanjung Perak-Rote-Sabu-Tanjung Perak	9.	Sorong-Oransbari-Wasior-Nabire/Teluk Kimi-Serui-Waren-Sarmi-Sorong
4.	Tanjung Priok-Bengkalis-Meranti/Dorak-Belawan-Lhokseumawe/Krueng Geukeh-Malahayati/Krueng Raya-Tanjung Priok	10.	Tanjung Perak-Piru-Wayaloar-Malbufa-Babang-Saketa-Gimea-Bula-Tanjung Perak
5.	Teluk Bayur-Gunung Sitoli-Sinabang-Sikakap-Bengkulu/Pulau Baai-Teluk Bayur	11.	Tanjung Perak-FakFak-Kaimana-Elat-Dobo-Tanjung Perak
6.	Tanjung Perak-Ilwaki-Kisar-Leti-Kaiwatu/Moa-Lelang/P. Sermat-Tepa-Larat-Tanjung Perak	12.	Tanjung Perak-Oransbari-Wasior-Nabire/Teluk Kimi-Serui-Waren-Sarmi-Tanjung Perak



12.	Tanjung Perak-Oransbari-Wasior-Nabire/Teluk Kimi-Serui-Waren-Sarmi-Tanjung Perak	19.	Tanjung Perak – Makassar – Bobong (Taliabu) – Luwuk – Tanjung Perak
13.	Tanjung Perak-Makassar-Jailolo-Daruba-Galela-Tanjung Perak	20.	Tanjung Perak – Merauke – Agats – Timika (Pomako) – Tanjung Perak
14.	Tanjung Priok-Kijang-Letung-Tarempa-Pulau Laut-Selat Lampa-Subi-Serasan-Midai-Tanjung Priok	21.	Tanjung Priok – Lhokseumawe – Malahayati – Sabang – Tanjung Priok
15.	Tanjung Perak-Soasio-Galela-Daruba-Galela-Buli-Maba Pura-Weda-Tanjung Perak	22.	Bitung – Luwuk – Pagimana – Bunta – Mantangisi – Ampana – Parigi/Tinombo – Tilamuta – Bitung
16.	Tanjung Perak-Makassar-Tahuna-Tanjung Perak	23.	Makassar - Bungku – Kolonodale – Makasar
17.	Tanjung Perak-Bau-Bau/Murhum-Kendari/Bungkutoko-Tanjung Perak	24.	Makasar – Ereke – Raha – Sikeli – Selayar– Makassar
18.	Tanjung Priok – Teluk Bayur - Tanjung Priok	25.	Tanjung Perak - Tidore (Soasio) – Morotai – Galela – Maba/Buli – Weda – Tanjung Perak



26.	Tanjung Perak- Wetar -Kisar – Leti - Moa – Sermata - Tapa – Larat - Tanjung Perak	35.	Tanjung Priok – Tanjung Perak – Tanjung Priok
27.	Tanjung Perak - Lembata (Lewoleba) -Tabilota/ Larantuka - Tanjung Perak	36.	Tanjung Priok – Patimban – Kijang – Letung – Tarempa – Pulau Laut – Selat Lampa – Subi – Serasan – Midai – Tanjung Priok
28.	Tanjung Perak – Makassar – Jailolo – Morotai (Daruba) – Tanjung Perak	37.	Tanjung Priok – Pekanbaru– Tanjung Priok
29.	Tanjung Perak – Saumlaki – Dobo – Tanjung Perak	38.	Tanjung perak - Wayaloar- Malbufa – Babang - Saketa- Gimea/tapeleo - Tanjung perak
30.	Tanjung Perak – Badas – Bima – Tanjung Perak	39.	Tanjung priok - Pulau baai - Tanjung priok
31.	Tanjung Perak – Tarakan – Nunukan – Tanjung Perak	40.	Tanjung perak – Makassar – Jailolo – Daruba – Galela - Tanjung Perak
32.	Tanjung Perak – Namlea – Tanjung Perak	41.	Tanjung Perak - Makassar - Tahuna - Tanjung Perak
33.	Merauke (Kelapa Lima) – Kimaam – Moor – Bade (Mapi) – Gantentiri (Bovendigul) – Merauke (Klima)		
34.	Tanjung Perak – Sorong – Tanjung Perak		

**DATA OTP PER BULAN**

NO	JENIS KINERJA	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	AT	96,7%	91,6%	100,0%	94,0%	93,6%	92,8%	96,1%	93,3%	87,3%	91,0%	93,1%	76,8%
2	WT	100,0%	99,8%	100,0%	98,3%	99,1%	97,9%	99,5%	96,8%	100,0%	99,4%	99,1%	100,0%
3	ET:BT	88,9%	89,0%	100,0%	87,8%	86,3%	89,1%	89,2%	91,7%	95,0%	87,8%	87,4%	100,0%
4	OTP	95,2%	93,4%	100,0%	93,3%	93,0%	93,3%	95,0%	93,9%	94,1%	92,7%	93,2%	92,3%

**DATA OTP KUMULATIF**

NO	JENIS KINERJA	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	AT	96,7%	94,1%	96,1%	95,6%	95,2%	94,8%	95,0%	94,8%	93,9%	93,64%	93,59%	92,19%
2	WT	100,0%	99,9%	99,9%	99,5%	99,4%	99,2%	99,2%	98,9%	99,0%	99,08%	99,08%	99,16%
3	ET:BT	88,9%	88,9%	92,6%	91,4%	90,4%	90,2%	90,0%	90,3%	90,8%	90,48%	90,20%	91,02%
4	OTP	95,2%	94,3%	96,2%	95,5%	95,0%	94,7%	94,7%	94,6%	94,6%	94,40%	94,29%	94,12%

**DATA CAPAIAN OTP BERDASARKAN TARGET**

NO	JENIS KINERJA	TARGET 2024	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	AT	94%	102,9%	100,2%	102,2%	101,7%	101,2%	100,8%	101,0%	100,8%	99,9%	99,61%	99,57%	98,07%
2	WT	94%	106,4%	106,3%	106,3%	105,9%	105,8%	105,5%	105,6%	105,2%	105,4%	105,40%	105,41%	105,49%
3	ET:BT	94%	94,6%	94,6%	98,5%	97,2%	96,2%	95,9%	95,8%	96,0%	96,6%	96,26%	95,96%	96,83%
4	OTP	94%	101,3%	100,3%	102,4%	101,6%	101,1%	100,8%	100,8%	100,7%	100,6%	100,42%	100,31%	100,13%

**INFORMASI KECELAKAAN KAPAL  
TAHUN 2024**

NO	TANGGAL WAKTU KECELAKAAN	NAMA KAPAL DAN LOKASI KEJADIAN	ISI KOTOR (TON)	JENIS KAPAL	BENDERA KAPAL	PEMILIK / AGEN	KORBAN KERUGIAN		JENIS KECELAKAAN	DUGAAN FAKTOR PENYEBAB	KETERANGAN
							JIWA	MUATAN			
							H	I			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	27 Desember 2023, 12.13 LT Eks Robby 75 Kandas lalu di tubruk TK. MBS 96 Menghindari BG lancar IX	<b>BG. DANNY 8</b> 00.35.138 S / 117.16.986 E Buoy 16 Kutai Lama Alur Sungai Mahakam	GT. 3.155	TK	Indonesia	Nakhoda : SUBRAL HADID Pemilik : PT. DANNY SAMUDERA RAYA LINE	Nil	Nil	Kandas	Alam	Lap. KSOP Kelas I Samarinda
2	1 Januari 2024, 01.00 WITA Tubrukan dengan Kapal Tanpa Nama Awak Kapal 2, PNP 2 WNA England dan Turkiy	<b>KM. WONG GILI 002</b> Perairan Gili Meno	GT. 3	KT	Indonesia	Nakhoda : SUPRIADI Pemilik : PT. ISLAHUDIN	1 MD	Nil	Tubrukan	Teknis	Lap. UPP Kelas II Pemenang
3	2 Januari 2024, 05.15 LT TB. BLM JAYA I Awak 9 Orang Tolak Karang Asem Bali ke Pelabuhan Benete Muatan Pasir Tempus 24 Desember 2023	<b>BG. ELFA 2501</b> 08.52.130 S / 116.43.571 E Perairan Selat Alas	GT. 3.013	TK	Indonesia	Nakhoda : PITERSON NUSA Pemilik : PT. BAHTERA LAUTAN MANDIRI	Nil	3900	Kandas	Alam	Lap. UPP Kelas II Benete
4	3 Januari 2024, 11.00 WIB TB. ENDEAVOR 1 GT. 198 Awak Kapal 10P, Tolak Tg. Pelepas Malaysia ke Pasir Gudang	<b>TK. PACIFIC SUN 1</b> 01.04.241 N / 103.45.372 E Perairan Pulau Pemping	GT. 2.775	TK	Indonesia	Nakhoda : ARISON Pemilik : -	Nil	Nil	Kandas	Alam	Lap. KSOP Kelas I Tg. Balai Karimun
5	11 Januari 2024, 02.00 LT Muatan Minyak Hitam Awak Kapal 8 Orang	<b>SPOB. SBHM-I</b> Dermaga 203 Ujung Baru Pelabuhan Belawan	GT. 181	MT	Indonesia	Nakhoda : RAHMATULLAH Pemilik : PT. MUNASINDO MANDIRI SEJAHTERA (MMS)	Nil	450	Tenggelam	Manusia	Lap. KSOP Utama Belawan
6	11 Januari 2024, 04.00 LT Muatan 5 Ton GC, PNP 177 Tolak Lakor ke Pantai Mohain Pulau Moa	<b>KM. SABUK NUSANTARA 87</b> 08.12.002 S / 128.04.396 E Pantai Mohain Moa Lakor Maluku Barat Daya	GT. 2.097	KM	Indonesia	Nakhoda : ABDUL ROCHIM Pemilik : PT. INTI SAMUDRA TIMUR	Nil	Nil	Kandas	Alam	Lap. UPP Kelas III Wonreli
7	12 Januari 2024, 15.15 WIB Muatan Barang Campur Tolak Pekanbaru ke Tanjung Batu Kundur, Awak 4 Orang	<b>KM. CITRA INDAH</b> Pulau Danai Tanjung Batu Kundur	GT. 34	KT	Indonesia	Nakhoda : SUASRIL Pemilik : PT. CIPTA PERDANA LESTARI	Nil	5	Tenggelam	Alam	Lap. KSOP Kelas I Tg. Balai Karimun
8	12 Januari 2024, 20.35 WIB Awak 14 Orang, Tolak Sei Siak ke Tanjung Uban, menubruk Tiang Pancang Jembatan Kaca Skywalk	<b>SPOB. WIJAYA KUSUMA 3</b> Mempura Sungai Siak Sriindrapura	GT. 1.775	MT	Indonesia	Nakhoda : DEDY SYAHRIL Pemilik : PT. ADHI KARYA INTI SEJATI	Nil	Nil	Tubrukan	Alam	Lap. KSOP Kelas II Pekanbaru
9	14 Januari 2024, 00.24 WITA Muatan 197 Kontainer, Tolak Makassar ke Bau-Bau, Awak Kapal 20 Orang	<b>KM. ARMADA SEJATI</b> 05.07.34 S / 119.20.52 E Sebelah Kiri Lampu Suar Hijau Pulau SAMALONA	GT. 6.093	KM	Indonesia	Nakhoda : GEGOLO RUMADI SUMANTO Pemilik : PT. Salam PACIFIK INDONESIA LINES	Nil	Nil	Kandas	Alam	Lap. KSOP Utama Makassar
10	18 Januari 2024, 19.40 WIB Muatan Crude Oil, Tolak MINA AL FAHAL OMAN ke ZHANJIANGH CHINA Awak 31 Orang	<b>MT. DHT EUROPE</b> 01.06.331 N / 103.43.202 E Takong Kecil Pulau Nipa	GT. 160.882	MT	Hongkong	Nakhoda : SOIN PUNEET VINODKUMAR Pemilik : DHT TANKERS / PT BINTANG SAMUDRA UTAMA	Nil	Nil	Kandas	Alam	Lap. KSOP Kelas I Tg. Balai Karimun
11	20 Januari 2024 Awak Kapal 15 Orang, Tolak Brondong Menuju Lamongan	<b>KLM. PUTRA SUMBER MAS</b> Perairan Utara Dungkek	GT. 29	KT	Indonesia	Nakhoda : ROHMAD MUSTAKIM Pemilik : RAFI	Nil	Nil	Tenggelam	Alam	Lap. UPP Kelas III Sapeken
12	21 Januari 2024, 22.00 WITA Muatan Kendaraan Besar 6, Total 80 Ton, Tolak Bitung menuju Manado Awak Kapal 10 Orang, PNP 8 Orang	<b>LCT. BORA V</b> Perairan Pulau Tagulandang Sulawesi	GT. 317	KM	Indonesia	Nakhoda : JAMES MALUMBOT Pemilik : PT. CINTAMI LIONEL PERKASA	2 MD	80	Tenggelam	Alam	Lap. POSKODALOPS Yur : KSOP Kelas I Bitung

NO	TANGGAL WAKTU KECELAKAAN	NAMA KAPAL DAN LOKASI KEJADIAN	ISI KOTOR (TON)	JENIS KAPAL	BENDERA KAPAL	PEMILIK / AGEN	KORBAN KERUGIAN		JENIS KECELAKAAN	DUGAAN FAKTOR PENYEBAB	KETERANGAN
							JIWA	MUATAN			
13	24 Januari 2024, 12.00 WITA Muatan Alat Berat Awak Kapal 10 Tolak Balikpapan Menuju Tanjung Redeb	<b>LCT. KARYA FORTUNA</b> Alur S00.47.50 S / 117.17.30 E Sumur Kuning Alur Sungai Mahakam	GT. 6.625	KM	Indonesia	Nakhoda : EKO PURWANI Pemilik : PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINE	Nil	Nil	Tubrukan	Teknis	Lap. KSOP Kelas I Samarinda
14	28 Januari 2024, 19.45 WITA Tubrukan dengan BG. SOLUNA 20 Awak Kapal 20, Tolak Tanjung Perak Menuju Samarinda, Muatan Kontainer	<b>KM. SPIL RENATA</b> Alur Sungai Mahakam	GT. 317	KM	Indonesia	Nakhoda : IMAM SATRIO Pemilik : PT. GEMA MUTIARA MARINA	1 MD	317	Tenggelam	Manusia	Lap. KSOP Kelas I Samarinda
15	1 Februari 2023, 22.30 LT TB. MARGUNA I TK. CAHAYA ALAM 1 Awak TB 5 orang, TK 2 orang Tolak sekupang ke tembilahan	<b>TB. MARGUNA I</b> 01.03.256 N / 103.54.254 E Perairan Tanjung Uncang Batam	GT. 31	TB	Indonesia	Nakhoda : MARFILIUS Pemilik : PT. CAHAYA PERDANA TRANSALAM	Nil	Nil	Kandas	Alam	Lap. KSOP Khusus Batam
16	3 Februari 2023, 15.000 LT Awak 4, PNP 3 Tolak Kapal Presli yg mengalami Kerusukan mesin ke Pulau Mauan Tanpa SPB	<b>KM. CARPIDIEM</b> Sekita Pulau Mauan	GT. 32	KT	Indonesia	Nakhoda : DAHLAN WAJA SEDDA Pemilik : PT. NUGRA ARSYSTAWA	Nil	Nil	Terbakar	Teknis	LKK. KSOP Kelas III Labuhan Bajo
17	4 Februari 2023, 14.00 LT Muatan Tembakau 18.383 Ton Tolak Bitung Tujuan Filipina Awak Kapal 7 Orang	<b>BM. SEUNG JEONG</b> Perairan Pulau Marore	GT. 28	KT	Indonesia	Nakhoda : TAYABAS PARAJAA Pemilik : PT. THIRTA DASA LINTAS NUSA	Nil	Nil	Kandas	Teknis	Lap. Poskodalops Yur : KSOP Kelas I Bitung
18	12 Februari 2023, 14.18 LT SPOG menuju zona Labuh II Pandu No. 156 On Board ABK 63 Orang Buoy 24 dan KM. Lit Enterprise	<b>KM. LEUSER</b> 07.10.8S / 112.41.5.E	GT. 6.022	KM	Indonesia	Nakhoda : - Pemilik : PT. Pelni (Persero)	Nil	Nil	Tubrukan	Alam	Lap. KSOP Utama Tanjung Perak
19	1 Maret 2024, 18.00 LT 100 Ton Bio Solar Tolak Tarakan menuju Tanjung Selor PT. KAI	<b>SPOB. MAYON</b> 2.31.420 N / 117.54.935 E Tersus PT. KAI	GT. 81	KM	Indonesia	Nakhoda : FAHMID PANAI Pemilik : PT. MAYON SAMUDERA PACIFIK	Nil	100	Tenggelam	Alam	Lap. UPP Kelas II Tanjung Selor
20	1 Maret 2024, 19.50 LT 1.133 Ton General Cargo, Tolak Sunda Kelapa ke Pontianak Awak 17 Orang	<b>KM. LINTAS BAHARI 20</b> 00.05.357 N / 109.06.159 E Buoy 3 Alur Pelayaran Pontianak	GT. 1.135	KM	Indonesia	Nakhoda : RICKY Pemilik : PT. MUTIARA NASIONAL LINE	Nil	Nil	Kandas	Alam	Lap. KSOP Kelas I Pontianak
21	2 Maret 2024, 13.00 WIB Muatan Pupuk Delomit, Tolak Gresik Ke Sampit, Awak 7 Orang	<b>KLM. JANNAH SETIA</b> 50 Mil Utara Pulau Bawean	GT. 243	KT	Indonesia	Nakhoda : SAFRIUDIN Pemilik : PT. PUTRA SETIA ABADI	Nil	Nil	Tenggelam	Alam	Lap. UPP Kelas III Bawean
22	9 Maret 2024 TB. NELLY 39 Tolak Panjang Menuju PLTU 2 Labuan, Awak TB 10 Orang	<b>BG. MADISON</b> Perairan Penimbang	GT. 3.145	TK	Indonesia	Nakhoda : ADI NARYO Pemilik : PT. PELAYARAN MAHAMERU KENCANA ABADI	Nil	Nil	Kandas	Alam	Lap. UPP Kelas III Labuhan
23	12 Maret 2024 TB. SRIKANDI BARUNA 2201 Tolak ke Liwungan dari Panjang Awak Kapal 10 Orang	<b>BG. BARUNA POWER</b> 06.07.259 S / 105.45.863 E	GT. 3.350	TK	Indonesia	Nakhoda : AKMAL NUR Pemilik : PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA	Nil	Nil	Kandas	Teknis	Lap. UPP Kelas III Labuhan
24	12 Maret 2024, 13.05 WITA Awak Kapal 16 Orang Kapal posisi Labuh, Muatan Semen Tubrukan : KM. LUMOSO GEMBIRA	<b>KM. NOVA GLORIA</b> 10.10.992 S / 123.30.495 E Area Rede Kupang	GT. 1.479	KM	Indonesia	Nakhoda : ISWANTO Pemilik : PT. NOVA PERSADA LINE	Nil	Nil	Tubrukan	Alam	LKK. KSOP Kelas III Kupang
25	15 Maret 2023, 19.30 WIB Gandeng TK. INSAN III, Tolak Gresik Menuju Tg. Redeb, Awak TB 10, TK 5	<b>TB. SAMUDRA SINDO II</b> 06.53.835 S / 112.43.481 E	GT. 107	TB	Indonesia	Nakhoda : SOFIAN SURI Pemilik : PT. SEROJA JAYA AGENSII	Nil	Nil	Tenggelam	Teknis	Lap. KSOP Utama Tanjung Perak

NO	TANGGAL WAKTU KECELAKAAN	NAMA KAPAL DAN LOKASI KEJADIAN	ISI KOTOR (TON)	JENIS KAPAL	BENDERA KAPAL	PEMILIK / AGEN	KORBAN KERUGIAN		JENIS KECELAKAAN	DUGAAN FAKTOR PENYEBAB	KETERANGAN
							JIWA	MUATAN			
26	16 Maret 2023 Berawal TB. TITAN 37 dari Labuhan Mengalami Cuaca Buruk, Cut Towing Lalu Diketemukan Kandas	<b>BG. TITAN 38</b> 07.255.00 S / 106.390.00 T	GT. 3.115	TK	Indonesia	Nakhoda : KIKI CANDRA AGUS Pemilik : PT. NUSANTARA TERMINAL TERPADU	Nil	Nil	Kandas	Alam	Laporan UPP Kelas III Pelabuhan Ratu
27	16 Maret 2023 Semen 300 Ton, Awak Kapal 10l Muatan Semen 300 Ton Tolak Sorong menuju Mega	<b>LCT. LIEBERTI STAR</b> Perairan Makbon	GT. 343	KM	Indonesia	Nakhoda : YOHANIS TOATUBUN Pemilik : PT. INTI INTIM SAMUDRA	Nil	300	Tenggelam	Alam	Lap. KSOP Kelas I Sorong
28	19 Maret 2024, 06.00 WITA TB. SAMU 6, Muatan 2.992 Ton Batu Split, Tolak Labuhan Lombok Menuju Benete, Awak Kapal 7 Orang	<b>TK. SEALINK PACIFIK 107</b> 08.53.135 S / 116.44.396 E	GT. 1.355	TK	Indonesia	Nakhoda : HERIT JONAL BEE Pemilik : PT. SAMUDERA MULTI LINES	Nil	Nil	Kandas	Alam	Lap. UPP Kelas II Benete
29	20 Maret 2024 Api merambat ke KM. Bintang Karisma Jaya, Kapal dalam Keadaan belum Beroperasi, posisi Dermaga Nizam Zachman Muara Baru	<b>KM. MARCEL JAYA 09</b> Pelabuhan NIZAM ZACHMAN Dermaga Timur	GT. 179	KT	Indonesia	Nakhoda : - Pemilik : OKI	Nil	Nil	Terbakar	Teknis	Lap. KSOP Kelas III Sunda Kelapa
30	21 Maret 2024, 17.00 WIB Awak 8 Orang tolak Pasir Gudang Malaysia ke Pangkalbalam Nakhoda MD	<b>KM. SURYA HASIL LAUT 22</b> 01.03.049 S / 105.38.643 E Perairan Pulau Dokan	GT. 83	KT	Indonesia	Nakhoda : SUPENO Pemilik : PT. SURYA HASIL LAUT	1 MD	Nil	Terbakar	Teknis	Lap. KSOP Kelas IV Pangkalbalam
31	24 Maret 2024, 17.00 LT Muatan Kopro, Ikan dan Gabus Tolak Bangkurung ke Luwuk Awak 6 Orang	<b>KM. BINARIA INDAH 03</b> 1.1.379 S / 122.47.621 E Desa Bubung Luwuk Banggai	GT. 34	KT	Indonesia	Nakhoda : JAMALUDDIN Pemilik : JAMALUDDIN	Nil	5	Tenggelam	Alam	Lap. UPP Kelas II Luwuk
32	24 Maret 2024 Muatan Kontainer Kandas lalu tenggelam Awak 14 Orang, Tolak Belawan	<b>KM. BINTANG MULIA 2</b> 03.42.032 N / 099.08.755 E Pantai Cermin	GT. 691	KM	Indonesia	Nakhoda : PANTAS PASARIBU Pemilik : PT. SAMUDERA ARKAN NUSANTARA	Nil	Nil	Kandas	Alam	Lap. UPP Kelas II Tanjung Beringin
33	26 Maret 2024, 13.30 WIB Tubrukan MV. MSC CHERYL 3 Tolak Telaga Biru menuju Gresik Awak 13 Orang PNP 15	<b>CB. PAN MARINE 8</b> 06.58.225 S / 112.43.369 APBS	GT. 326	KM	Indonesia	Nakhoda : ARI GUNAWAN Pemilik : PT. PELNAS EKALYA PURNAMASARI / PT. OREMUS BAHARI MANDIRI	Nil	Nil	Tubrukan	Manusia	Lap. KSOP Kelas II Gresik
34	2 April 2024, 09.30 WIB Muatan Terbakar, Kapal Tolak Tg. Priok ke Marunda, Awak 14 Org, Muatan MFO, dan HSD Sumber api tangki 4 kanan	<b>MT. KUSUMA 2</b> Dermaga Karya Citra Nusantara Marunda	GT. 717	MT	Indonesia	Nakhoda : RIDO MARAJOHAN NAPITUPLU Pemilik : PT. SORAYA GEMILANG	Nil	Nil	Terbakar	Teknis	Lap. KSOP Kelas II Marunda
35	3 April 2024, 20.30 WITA, Tolak Benoa ke Ambon, Muatan Ikan Awak Kapal 5 Orang	<b>KM. NAGA MAS PERKASA</b> 8.39.713 S / 115.26.808 E Jungut Batu Nusa Lembongan	GT. 56	KT	Indonesia	Nakhoda : FERDY LAHIWU Pemilik : TAMO	Nil	8,4	Tenggelam	Teknis	Lap. UPP Kelas II Nusa Penida
36	16 April 2024, 12.30 LT kapal terbakar di Johor Malaysia 12.30 hanyut dan kandas 17.21 awak 12 org, tolak serawak ke Port Klang	<b>MV. LAYAR ANGGUN 8</b> 01.25.817 N / 104.32.862 E 01,13,37 N / 104,32,36 E	GT. 990	KM	Tanzania	Nakhoda : ENKGUS KUSNADI SUMARNA Pemilik : PT> GAMA BISTARI	Nil	Nil	Kandas	Teknis	lap. UPP Kelas I Tanjung Uban
37	27 April 2024, 23.00 LT awak kapal 10 orang, kapal tolak Timor Leste ke Manokwari muatan : -	<b>MV. DA HAO</b> 07.22,047 S / 125.52,464 E	GT. 2.999	KM	Tanzania	Nakhoda : MULYOTO Pemilik : SUN YUFENG	Nil	Nil	Terbakar	Teknis	Lap. KSOP Kelas III Kupang
38	30 April 2024 12.00 LT awak TB 9 orang, kapal tolak Nambo Wilker lawele ke Probinggo	<b>TK. PARTA JAYA</b> 06,40,042 S / 117,38,893 E	GT. 2.132	TK	Indonesia	Nakhoda TB : ASDAR Pemilik : PT. ASIA CENTRAL PRATAYAYA	Nil	Nil	Kandas	Teknis	Lap. UPP Kelas III Sapeken



NO	TANGGAL WAKTU KECELAKAAN	NAMA KAPAL DAN LOKASI KEJADIAN	ISI KOTOR (TON)	JENIS KAPAL	BENDERA KAPAL	PEMILIK / AGEN	KORBAN KERUGIAN		JENIS KECELAKAAN	DUGAAN FAKTOR PENYEBAB	KETERANGAN
							JIWA	MUATAN			
	digandeng TB. GRACE										
39	1 Mei 2024, 09.00 kapal tolak Maba ke Tobelo awak kapal 16 orang	<b>KM. SABUK NUSANTARA 35</b> 01,043,305 N / 128,01,414 E	GT. 1.161	KM	Indonesia	Nakhoda : TEYA SAPUTRA Pemilik : PT. SUBSEA LINTAS GLOBALINDO	Nil	Nil	Kandas	Alam	lap. UPP Kelas I Tobelo
40	8 Mei 2024, 07.00 muatan Pasir Tras 7.5 Ton	<b>BG. LESTARI 3005 (TB. LAKSAMANA M. ZAIN)</b> 03,16,363 LS / 116,08,174 BT	GT. 3.080	TK	Indonesia	Nakhoda TB. MUHAMMAD JUNANI Pemilik : PT. Pelayaran GROGOL SARANA UTAMA	Nil	Nil	Kandas	Alam	Lap. KSOP Kelas II Kotabaru
41	27 Mei 2024, 03.50 tolak sungai gantung ke Tembilahan awak kapal 2 orang muatan tabung gas lpg 3kg berisi sebanyak 8.400 kg	<b>KM. KARMILA JAYA</b> 0,19,48, S / 103,09,23 E Perairan Sungai Indragiri	GT. 6	KT	Indonesia	Nakhoda : RAMADONI Pemilik : PT. BAHTERA SWARNA DIPA LINES	Nil	50	Terbakar	Teknis	Lap. KSOP Kelas IV Tembilahan
42	28 Mei 2024, 00.30 WIT 61 Ton General Cargo, Awak 4 Org Tolak Jetty Tersus Trimegah Bangun Persada 06 ke Taniwei	<b>KLM. FANTASI I</b> 01,20,24.84 S / 127,39,00.98 E Desa Kawasi Obi Halmahera Selatan	GT. 57	KT	Indonesia	Nakhoda : ASLAN Pemilik : PT. AAWN SAMUDERA RAYA	Nil	61	Kandas	Alam	Lap. UPP Kelas III Laiwui
43	3 Juni 2024, 11,00 LT awak kapal 3 orang, muatan beras tolak Teluk Belitung ke Desa Merbau	<b>KLM. RAHMAD</b> 1,08,10 N / 102,31,39 E Perairan Desa Merbau	GT. 6	KT	Indonesia	Nakhoda : JUNIZAR Pemilik : JUNIZAR	Nil	5	Tenggelam	Alam	Lap. KSOP Kelas IV Selat Panjang
44	4 Juni 2024, 20.40 LT 70 Ekor Sapi, 200 Ekor Kambing Tolak Dawelur ke Kroing Awak kapal 16 orang	<b>KM. DANDELION</b> Dermaga Pelabuhan Kroing	GT. 1.305	KM	Indonesia	Nakhoda : EFENDI DEWA Pemilik : PT. KAWAN BERSAMA LOGISTIK	Nil	Nil	Tubrukan	Teknis	Lap. UPP Kelas II Saumlaki
45	9 Juni 2024, 04.45 WITA kapal tolak Baubau ke Makassar awak kapal 89 orang pnp 1.370 orang	<b>KM. UMSINI</b> Dermaga Soekarno Pelabuhan Makassar	GT. 14.501	KM	Indonesia	Nakhoda : MUHAMMAD ANWAR NOOR Pemilik : PT. PELNI	Nil	Nil	Terbakar	Teknis	Lap. KSOP Utama Makassar
46	10 Juni 2024, 05.00 LT kapal tolak sorong ke aroba Tersus PT. PRABU ALASKA, awak kapal 12P menubruk platform ROA digandeng TB. KHARISMA BAHARI 168	<b>TK. KHARISMA BAHARI 96</b> Perairan Teluk Bintuni	GT. 2.757	TK	Indonesia	Nakhoda TB : CHARLES SAP SALENDAH Pemilik : PT. KARYA USAHA SAMUDRA	Nil	Nil	Tubrukan	Alam	Lap. UPP Kelas II Bintuni
47	10 Juni 2024, 15.00 LT Awak Kapal 3 Orang muatan bahan bangunan  Menubruk SB KM. SONY LEE	<b>KM. CENINGAN EXPRESS</b> 8,39,171 S / 115,28,685 E Perairan Pamaruungan Nusa Penida	GT. 23	KT	Indonesia	Nakhoda : I KADEK DARMAWAN Pemilik : KADEK SUBAGIA	Nil	Nil	Tubrukan	Teknis	Lap. UPP Kelas II Nusa Penida
48	12 Juni 2024, 20.25 LT Tolak Pekanbaru ke Surabaya menubruk MV. BERLIAN INDAH tolak gresik ke Belawan (robek haluan kanan)	<b>KM. LINTAS BENGKULU</b> 00,56,500 N / 103,34,750 E	GT. 2.670	KM	Indonesia	Nakhoda : TRI HERNANTO Pemilik : PT. LINTAS KUMALA ABADI	Nil	Nil	Tubrukan	Teknis	Lap. KSOP Kelas II Tanjung Balai Karimun
49	18 Juni 2024, 15.00 LT kapal tolak Keramaian Jatim ke Masalembu Jatim, awak kapal 22 org PNP 57 org, 5 ton campuran	<b>KM. SABUK NUSANTARA 91</b> 05,34,646 S / 114,24,729 E Barat kolam dermaga Pelabuhan Masalembu	GT. 2.086	KM	Indonesia	Nakhoda : IRWAN HARDYANTO Pemilik : PT. PELNI	Nil	Nil	Kandas	Alam	Lap. UPP Kelas III Masalembu
50	21 Juni 2024, 08.42 LT Kapal tolak Semarang ke Kumai Awak Kapal 31 Orang, Pnp 775 Jiwa	<b>KM. KIRANA</b> Dermaga Pelabuhan Kumai	GT. 5.299	KM	Indonesia	Nakhoda : THOMAS WIDODO Pemilik : PT. DHARMA LAUTAN UTAMA	Nil	Nil	Tubrukan	Teknis	Lap. KSOP Kelas IV Kumai
51	27 Juni 2024, 04.00 WIB Awak Kapal 10 Orang, kapal tolak Termin	<b>LCT. BAHTERA ABADI 1</b> 05,51,092 S / 106,38,860 E	GT. 348	KM	Indonesia	Nakhoda : TRISNO RAMADHAN Pemilik : PT. BAHTERA RESTU	Nil	Nil	Kandas	Alam	Lap. KSOP Kelas IV Kepulauan Seribu

NO	TANGGAL WAKTU KECELAKAAN	NAMA KAPAL DAN LOKASI KEJADIAN	ISI KOTOR (TON)	JENIS KAPAL	BENDERA KAPAL	PEMILIK / AGEN	KORBAN KERUGIAN		JENIS KECELAKAAN	DUGAAN FAKTOR PENYEBAB	KETERANGAN
							JIWA	MUATAN			
	Operasi Tg. Priok ke Kep. Seribu	Pulau Pari Tanjungan				BERSAMA					
52	2 Juli 2024, 06.00 WIB Kapal tolak Pontianak ke Tersus PT. PERMATA INDAH SINERGI BENAO. Awak kapal : 8 Orang	<b>BG. GLOBAL TRANS II</b> Alur Sungai Barito (Teluk Timbau Barito Selatan)	GT. 886	TK	Indonesia	Nakhoda : JOHARI (TB. L.G.U VIII) Pemilik : PT. PELAYARAN RIMBA MEGAH ARMADA	Nil	Nil	Tenggelam	Teknis	Lap. KSOP Kelas III Rangga Ilung
53	2 Juli 2024, 19.05 WITA Kapal tolak Palu ke Balikpapan Muatan Batu Pecah dan Abu Batu Awak Kapal 9 Orang digandeng TB. ALORINDA 2	<b>BG. LABROY 188</b> 01,12,164 S / 117,07,380, E	GT. 1.318	TK	Indonesia	Nakhoda TB : SUNARTO Pemilik : PT. AZZAHRA BERKAH SAMUDRA	Nil	2267	Tenggelam	Alam	Lap. KSOP Kelas I Balikpapan
54	7 Juli 2024, 03.30 WIB Kapal tolak Tanjung Perak ke Pangkalbalam, Muatan Pupuk Awak Kapal 15 Orang	<b>KM. LINTAS ARMADA NUSANTARA</b> Perairan Pangkalbalam	GT. 740	KM	Indonesia	Nakhoda : BAMBANG SUEDI Pemilik : PT. PELAYARAN MULIA KAWAN SEJATI	Nil	500	Tenggelam	Teknis	Lap. KSOP Kelas IV Pangkalbalam
55	7 Juli 2024, 04.30 WIB Pelabuhan asal Sorong, Kapal Perintis tidak dalam pelayaran	<b>PAPUA SATU</b> Dermaga Utara Pelabuhan Yos Sudarso TUAL	GT. 409	KM	Indonesia	Nakhoda : - Pemilik : Direktur Jenderal Perhubungan Laut	Nil	Nil	Tenggelam	Teknis	Lap. UPP Kelas II Tual
56	13 Juli 2024, 09.00 LT Kapal tolak Lolak ke Palopo, Muatan Semen, awak Kapal 17 Orang	<b>KM. LINTAS SAHABAT 2</b> Desa Sirom, Lamala banggai Sulteng	GT. 2.093	KM	Indonesia	Nakhoda : YULIANUS MINTADOA Pemilik : PT. DUTA TRANSPORT NUSANTARA	Nil	Nil	Tenggelam	Alam	Lap. UPP Kelas II Luwuk
57	16 Juli 2024, 15.30 WIB Muatan Semen, awak Kapal 16 Orang Penumpang 26 Orang, tolak Bicoli ke Manitingting	<b>KM. SABUK NUSANTARA 35</b> Karang Pinit Desa Gotowasi	GT. 1.161	KM	Indonesia	Nakhoda : TEYA SAPUTRA Pemilik : PT. SUBSEA LINTAS GLOBALINDO	Nil	Nil	Kandas	Alam	Lap. UPP Kelas III Buli
58	20 Juli 2024, 10.20 LT Awak Kapal 1 Orang, PNP 22 Orang Tolak Jailolo ke Ternate diduga menghantam Balok Kayu sehingga kapal mengalami kebocoran	<b>SB. RAHMAT ILAHI 2</b> Perairan ternate - Maluku Utara	GT. 4	KT	Indonesia	Nakhoda : RISAL DENI Pemilik : DJOHAR PAJANG / PARDI	Nil	Nil	Tenggelam	Teknis	Lap. KSOP Kelas II Ternate
59	20 Juli 2024, 12.05 WIB Batu Boulder 1.169 TON Jatuh ke Laut Kapal tolak Jetty MCA Bojonegara ke Pelabuhan Patimban, Awak TB. Red Fish 10 Orang	<b>TK. NL 1807 (digandeng TB. RED FISH)</b> 05,47,517 S / 107,32,388 E Perairan Tanjung Karawang	GT. 835	TK	Indonesia	Nakhoda : SOPU SANTOSA Pemilik : PT. TRIJAYA BAROKAH ABADI	Nil	1,169	Tenggelam	Alam	Lap. KSOP Kelas II Patimban
60	23 Juli 2024, 08.27 WITA menubruk konveyor Jetty PLTU Muatan wood chips tolak China ke Balikpapan, awak kapal : 21 Org	<b>MV. SHANGHAI EXPRESS</b> Dermaga pelabuhan Balikpapan	GT. 54.567	KM	Singapore	Nakhoda : QIN SHENGCAN Pemilik : PT. LAJU DINAMIKA UTAMA	Nil	Nil	Tubrukan	Teknis	Lap. KSOP Kelas I Balikpapan
61	3 Mei 2024, 20.00 LT Awak kapal 3 Orang, tolak Nipah Panjang ke Tanjung Batu	<b>TB. RICH0</b> 00.42.349 S / 103.45.129 E	GT. 28	TB	Indonesia	Nakhoda : SUDIRMAN Pemilik : PT. PAKAR BANGUN JAYA	Nil	Nil	Tenggelam	Teknis	Lap. KSOP Kelas IV Kuala Tungkal
62	5 Mei 2024, Kapal belum diketahui keberadaannya, evakuasi abandon awak 16 orang selamat, muatan pupu, tolak gresik tujuan kumai	<b>KM. MITRA BAHARI IX</b> 03.56.702.S / 114.49.420. E Perairan Tanjung Putting Kalsel	GT. 1.581	KM	Indonesia	Nakhoda : ESTEFANI HUMIANG Pemilik : -	Nil	Nil	Tenggelam	Teknis	Lap. KSOP Kelas IV Kumai
63	3 Juni 2024, 10.00 LT Kapal tolak Tanah Grogot ke Cirebon Muatan Cangkang di tarik TB. SABANG 37	<b>BG. SUMBER JAYA 68</b> 05.02.600 S / 114.34.164 E Barat Pulau Keramian	GT. 2.145	TK	Indonesia	Nakhoda : MARIANUS HAREFA Pemilik : PT. INDONESIA MARINE TRANSPORT	Nil	Nil	Kandas	Alam	Lap. UPP Kelas III Masalembu
64	26 Juni 2024, 17.30	<b>MT. METRO MARITIM - III</b>	GT. 7.284	MT	Indonesia	Nakhoda : DIDI RUSADI	Nil	Nil	Tubrukan	Manusia	Lap. KSOP Kelas I

NO	TANGGAL WAKTU KECELAKAAN	NAMA KAPAL DAN LOKASI KEJADIAN	ISI KOTOR (TON)	JENIS KAPAL	BENDERA KAPAL	PEMILIK / AGEN	KORBAN KERUGIAN		JENIS KECELAKAAN	DUGAAN FAKTOR PENYEBAB	KETERANGAN
							JIWA	MUATAN			
		Kapal tubruk dermaga 01 Curah Cair Terminal Kijang Awak 19 Orang, tolak Pontianak ke Pulau Laut, Muatan Fame				Pemilik : PT. TIRTA PERMAI BAHARI					Pontianak
65	23 Juli 2024, 08.25 LT Tubrukan MV. CSSC YUAN JING	<b>MV. VIET HUAN 56-05</b> 05.44.352 S / 105.53.340 E Utara TSS Selat Sunda	GT. 31.242	KM	Panama	Nakhoda : - Pemilik : -	Nil	Nil	Tubrukan	Teknis	Lap. KSOP Kelas IV Bakauheni
66	1 Agustus 2024, 13.00 LT Kapal tolak Surabaya ke Banjarmasin Muatan PNP 24, KR 58 Unit Awak 29 Orang	<b>KM. NIKI SEJAHTERA</b> 05.11.154 S / 113.44.137 E Laut Jawa	GT. 9.982	KM	Indonesia	Nakhoda : ARIEF YUNianto Pemilik : PT. BERLIAN LINTAS SAMUDERA	Nil	Nil	Terbakar	Teknis	Lap. KSOP Kelas I Banjarmasin
67	17 Juli 2024, 23.00LT Kapal tolak Sunda Kelapa ke Tanjung Balai Karimun, kebocoran di kamar mesin, Awak Kapal 18 Orang	<b>KM. GLORIE INDAH I</b> 05.22.245 S / 106.33.052. T Kolam Pelabuhan	GT. 499	KM	Indonesia	Nakhoda : JUJU JUARA Pemilik : PT. BAHARI JAYA ABADI	Nil	400	Tenggelam	Teknis	Lap. KSOP Kelas IV Kepulauan Seribu
68	26 Juli 2024, 17.10 PNP 57 dan 6 KR2 Kapal tolak Tarempa ke Matak	<b>KM. SAMARINDA</b> 03.17.167 N / 106.14.124 E Perairan Kec. Kute Siantan Anambas	GT. 6	KT	Indonesia	Nakhoda : MUSNAWI Pemilik : MUSNAWI	1 MD	Nil	Tenggelam	Alam	Lap. UPP Kelas II Tarempa
69	5 Agustus 2024, 17.00 LT Kapal Tolak Bau-Bau ke Banda PNP 2.078 Org, awak 91 Orang Muatan Kontainer dan General Cargo	<b>KM. NGGAPULU</b> 03.48.2 S / 128.00.5 E Tanjung Alang	GT. 14.685	KM	Indonesia	Nakhoda : TAMRIN SINURAT Pemilik : PT. PELNI	Nil	Nil	Terbakar	Manusia	Lap. KSOP Kelas I Ambon
70	7 Agustus 2024, 04.32 WITA Tolak Tersus Manggis, ke Badas Awak Kapal 20 Orang, muatan Bio Solar, Pertamina, Peralite	<b>MT. ELISABET SATU</b> 08.30.147 S / 115.32.743 E 1 NM barat Pulau Gili Tepekong	GT. 2.938	MT	Indonesia	Nakhoda : M. HARIS AL RAZAK Pemilik : PT. ARTA SAMUDERA LINE	5 MD	Nil	Terbakar	Teknis	Lap. KSOP Kelas IV Padangbai
71	8 Agustus 2024, 06.30 Kapal Tolak Komodo ke Labuan Bajo Awak Kapal 4, PNP 4 GT. 33	<b>KM. MONALISA 01</b> 8.36.086 S / 119.34.389 T Tanjung Kuning Batu Tiga	GT. 33	KT	Indonesia	Nakhoda : ABDUL GAFUR Pemilik : PT. INSAN CITA MARINE	Nil	Nil	Tenggelam	Alam	Lap. KSOP Kelas III Labuhan Bajo
72	8 Agustus 2024, 09.30 WITA Kapal Tolak TUKS ENDE ke TUKS Waingapu, Muatan AVTUR Awak Kapal 16 Orang	<b>MT. S. NICOLEEN</b> 9.38.20 S / 120.14.50 E Alur (Kolam Putar) Jetty TUKS Pertamina dan Dermaga ASDP	GT. 3.244	MT	Indonesia	Nakhoda : PARUQ SUBAIR Pemilik : PT. PERTAMINA TRANS KONTINENTAL WAINGAPU	Nil	Nil	Kandas	Alam	Laporan KSOP Kelas IV Waingapu
73	11 Agustus 2024, 00.45 WIB Kapal tolak Panjang ke Patimban Muatan Kosong, Awak 19 Orang	<b>KM. MAJU 88</b> 06.11.944 S / 108.20.336 E Tanjung Indramayu	GT. 1.537	KM	Indonesia	Nakhoda : RUDIANTO Pemilik : PT. PRANATA LINE	Nil	Nil	Tenggelam	Alam	Laporan UPP Kelas III Indramayu
74	11. Agustus 2024, 13.00 WITA Tuubrukan TB. NELLY 31, TK. NELLY 52 LCT. MULIA JAYA	<b>KM. LABOBAR</b> Fermaga Beaching KSOP Bitung	GT. 3.482	KM	Indonesia	Nakhoda : SUMARJO PUJO HARNOWO Pemilik : PT. PELNI	Nil	Nil	Tubrukan	Teknis	Lap. KSOP Kelas I Bitung
75	11 Agustus 2024, 15.00 WIB Kapal Tolak Sampit Tujuan Sampit Awak 21 Orang	<b>KM. KIRANA 1</b> Kolam Pelabuhan Tanjung Emas	GT. 2.326	KM	Indonesia	Nakhoda : AGUNG KUSYONO Pemilik : PT. DHARMA LAUTAN UTAMA	Nil	Nil	Terbakar	Teknis	Lap. KSOP Kelas I Tanjung Emas
76	12 Agustus 2024, Kapal tolak Pelabuhan ratu ke Palembang Kapal melepas dari TB. TITAN 45 karena alasan cuaca	<b>BG. TITAN 32</b> 07.06.076 S / 105.41.245. E Pesisir Pantai Pulau Deli	GT. 3.144	TK	Indonesia	Nakhoda : - Pemilik : PT. NUSANTARA TERMINAL TERPADU	Nil	Nil	Kandas	Alam	Lap. UPP Kelas III Labuhan

NO	TANGGAL WAKTU KECELAKAAN	NAMA KAPAL DAN LOKASI KEJADIAN	ISI KOTOR (TON)	JENIS KAPAL	BENDERA KAPAL	PEMILIK / AGEN	KORBAN KERUGIAN		JENIS KECELAKAAN	DUGAAN FAKTOR PENYEBAB	KETERANGAN
							JIWA	MUATAN			
77	13 Agustus 2024, 21.00 LT Kapal ditarik TB. Medelin Spirit Mengakibatkan jembatan roboh muatan batu bara assist TB. PARIS 22	<b>TK. SENTANA JAYA</b> Sungai Musi Desa Lalan	GT. 2.940	TK	Indonesia	Nakhoda : KHOMSYAH ALIEF Pemilik : -	5 MD	Nil	Tubrukan	Teknis	Lap. Disnav Palembang
78	15 Agustus 2024 Kapal tolak Banten Tujuan Bayah Muatan kosong, awak 22 Orang	<b>KM. BARUNA RAYA</b> Perairan Pulau Panaitan	GT. 2.920	KM	Indonesia	Nakhoda : PURHANDI SUPRIADI Pemilik : PT. SUBSEA LINTAS GLOBALINDO	Nil	Nil	Kandas	Alam	Lap. UPP Kelas III Labuhan
79	21 Agustus 2024, 08.00 WIT kapal tolak Manokwari ke Timor Leste Awak 9 Orang, muatan 3500 Ton Semen	<b>KM. TONGYANG FUIRUI</b> 03.139.8 S / 127.11 S	GT. 6.770	KM	Indonesia	Nakhoda : RAMLY RUSDI Pemilik : PT. INDO KARYA LINE	Nil	Nil	Kandas	Teknis	Lap. UPP Kelas II Namelea
80	24 Agustus 2024, 21.50 Kapal tolak Tg. Api Api Palembang ke Tanjung Kalian Muntok Awak 19 muatan kosong	<b>KMP. MUTIS</b> 02.07.937 S / 105.13.93 E Pantai Batu Rakit Tanjung Kalian	GT. 621	KM	Indonesia	Nakhoda : MUHIDIN Pemilik : PT. ASDP INDONESIA FERRY	Nil	Nil	Kandas	Alam	Lap. KSOP Kelas IV Muntok
81	25 Agustus 2024, 09.30 awak 14, muatan kosong, tolak Bitung ke Pelabuhan Tangkiang	<b>MT. SAMUDRA SINDO 38</b> 01.03.018 S / 123.17.724 E	GT. 1.002	MT	Indonesia	Nakhoda : JULIANTONO Pemilik : PT. HAYUU TIRTA SEJAHTERA	Nil	Nil	Kandas	Alam	Lap. UPP Kelas II Luwuk
82	30 Agustus 2024, 22.40 WITA 4 Awak kapal, kapal meledak, lalu tenggelam, 1 awak kapal mengalami luka-luka	<b>SB. OCEAN QUEEN</b> 08.29.337 S / 119.52.363 E Kolam Pelabuhan	GT. 26	KT	Indonesia	Nakhoda : ALDUS SENUDIN Pemilik : SEREPINDO MITRA BAHARI	Nil	Nil	Tenggelam	Teknis	Lap. KSOP Kelas III Labuhan Bajo
83	1 September 2024, 15.00 LT TB. MARINE PERKASA 8 awak kapal 10 Orang, muatan batubara terbakar kapal tolak sungai lilin ke Cilegon	<b>BG. OCEAN PERKASA 8</b> 02.21.635 S / 105.33.940 E Tanjung Selokan	GT. 3.122	TK	Indonesia	Nakhoda : RIDWAN SANTOSO Pemilik : PT. TRIMANA SAMUDRA NUSA	Nil	Nil	Terbakar	Alam	Lap. KSOP Kelas IV Muntok
84	2 September 2024, 17.30 Muatan sayur 12 Ton Awak 4 Orang, tolak Selat Air Hitam ke Perairan Selat Panjang	<b>SB. PORTI EXPRESS 22</b> 01.01.12 N / 102.43.22 E	GT. 34	KT	Indonesia	Nakhoda : ISMAIL HARUN Pemilik : -	Nil	12	Terbakar	Teknis	Lap. KSOP Kelas IV Selat Panjang
85	4 September 2024, 18.20 Kapal tolak Bontang tujuan Pontianak, muatan pupuk	<b>MV. NIAGA BAHARI</b> 00.05.217 U / 109.06.065 Mendekati buoy No. 3 Poros Alur Pontianak	GT. 2.175	KM	Indonesia	Nakhoda : - Pemilik : PT. SUB HOLDING PELINDO JASA MARITIM	Nil	Nil	Kandas	Teknis	Lap. WA KSOP Kelas I Pontianak
86	9 September 2024, 15.00 WIT Muatan Nickel ore, tolak Molawe ke Weda, awak 10 Orang TB. CHLOE 03	<b>TK. KAPUAS JAYA 303</b> 0.52.207 S / 128.06.277 E	GT. 2.933	TK	Indonesia	Nakhoda : REIN BERTAL LALENOH Pemilik : PT. MEGAH ARMADA MARITIM	Nil	Nil	Tenggelam	Teknis	Lap. UPP Kelas III Saketa
87	11 September 2024, 07.10 LT Kapal tola Sungai Lumpur ke Tulang Bawang, awak 6 orang Muatan kosong Towed TB. JULIA 01	<b>TK. ANAK NUSA Z</b> 04.25.389 S / 105.56.52 E Muara Kuala Teladas	GT. 29	TK	Indonesia	Nakhoda : IBNU SAPARI Pemilik : MUHAMMAD AGUS	Nil	Nil	Kandas	Teknis	Lap. UPP Kelas II Menggala
88	12 September 2024, Kapal tolak ADAUT ke Saumlaki awak 4 orang	<b>KM. DAUSA 02</b> Selat Egron	GT. 6	KM	Indonesia	Nakhoda : EDWARD ANGWARMASSE Pemilik : -	Nil	5	Tenggelam	Teknis	Lap. UPP Kelas II Saumlaki
89	12 September 2024 menggandeng TK. SOEKAWATI 2705, muatan gypsum tolak Satui ke Semen Tonasa Biringkasi	<b>TB. KSD 39</b> Area Labuh APBS	GT. 147	TB	Indonesia	Nakhoda : ARDY TRIYONO PADONDAN Pemilik : PT. PELAYARAN BATAMITRA SEJAHTERA	Nil	Nil	Terbakar	Manusia	Lap. KSOP Kelas II Gresik

NO	TANGGAL WAKTU KECELAKAAN	NAMA KAPAL DAN LOKASI KEJADIAN	ISI KOTOR (TON)	JENIS KAPAL	BENDERA KAPAL	PEMILIK / AGEN	KORBAN KERUGIAN		JENIS KECELAKAAN	DUGAAN FAKTOR PENYEBAB	KETERANGAN
							JIWA	MUATAN			
90	14 September 2024, 11.30 WITA Awak kapal 7 Orang, muatan Pipa kapal tolak samarinda ke Bunyu	<b>LCT. HAMOTA</b> 01.17.681 S / 116.49.460 E	GT. 343	KM	Indonesia	Nakhoda : IMRAN Pemilik : ANDALAN LANCAR SAMUDERA BAHARI	Nil	Nil	Kandas	Alam	Lap. KSOP Kelas I Balikpapan
91	17 September 2024, 19.35LT kapal tubrukan dengan KM. BENUA 999	<b>KM. TIRTA SAMUDRA 35</b> Sekitar Karang Jemuang	GT. 2.272	KM	Indonesia	Nakhoda : - Pemilik : -	Nil	Nil	Tubrukan	Teknis	Lap. VTS Surabaya
92	20 September 2024, 13.00 LT Tubrukan dengan KM. SABUK NUSANTARA 107	<b>KM. YULIAN 88</b> 07.10.668 S / 112.42.984 E	GT. 2.995	KM	Indonesia	Nakhoda : DWI ATMOJO W Pemilik : PT. SINAR SARITAMA MANDIRI	Nil	Nil	Tubrukan	Alam	Lap. UPP Kelas II Branta
93	21 September 2024, Muatan Terbakar gandeng TB. GONAYA V Awak 10 Muatan Batubara, tolak Kuala Cinaku ke Pelabuhan Ratu	<b>BG. MJL 3015</b> Perairan Pulau Liwungan	GT. 3.099	TK	Indonesia	Nakhoda : JULIYUS SAFRIZA Pemilik : PT. MASADA JAYA LINES	Nil	Nil	Terbakar	Alam	Lap. UPP Kelas III Labuhan
94	21 September 2024, 11.30	<b>MV. ASIA GLORY 6</b> Alur Masuk Kolam Bandar Bima	GT. 6.191	KM	Indonesia	Nakhoda : SIMSON SANGGEL Pemilik : PT. RAGMIER SHIPPING JAKARTA PT. PREMIER SHIPPING	Nil	Nil	Kandas	Alam	Lap. KSOP Kelas IV Bima
95	23 September 2024, sekitar TSS Batam, kapal tujuan Singapore	<b>MV. KSL SAN FRANSISKO</b> 01.16.465 N / 104.05.507 E Sekitar TSS Batam dengan kapal MV. CHINA ENERGY	GT. 94.528	KM	Hongkong	Nakhoda : - Pemilik : -	Nil	Nil	Tubrukan	Teknis	Lap. BA VTS Batam Disnav Type A Kelas I Tanjung Pinang
96	26 September 2024, Gandeng By TB. PRIMA SAKTI II Awak 10 Orang dari Bunati ke Pelabuhan Ende	<b>TK. PRIMA SAMUDRA II</b> Perairan Ropa Maurole	GT. 2.084	TK	Indonesia	Nakhoda : DONAL DIAHAAN Pemilik : PT. LINTAS MARITIM INDONESIA	Nil	Nil	Tenggelam	Teknis	Lap. KSOP Kelas IV Ende
97	26 September 2024, Gandeng by TK. SURYA NAWA 21, muatan Kosong Asal Malaysia ke Lematang TB. ALFINE MARINE 22 dan beberapa kapal tradisional	<b>TB. SURYA WIRA 23</b> Perairan Ampera Palembang	GT. 205	TB	Singapore	Nakhoda : DENI WINANDA Pemilik : PT. WIRATRANS SAMUDRA	Nil	Nil	Tubrukan	Alam	Lap. KSOP Kelas II Palembang
98	27 September 2024, awak 18 Muatan biji besi 7300 Ton Kapal dari Tapak Tuan Aceh ke Surabaya	<b>KM. GEORGIA SEJAHTERA</b> 4.55.67 S / 103.34.419 E	GT. 5.332	KM	Indonesia	Nakhoda : DWI HANDOYO Pemilik : -	Nil	Nil	Kandas	Teknis	WA MCC oleh UPP Linau Bintuhan
99	5 Oktober 2024, 20.50 LT Kapal di Gandeng TB. TRUST 72 Muatan 6.875.515 Lateritic Iron Concentric In Bulk, Tolak ke Labuan Uki dari Kotabaru	<b>BG. TRUST LINE 306</b> Area Labuh PT. CONCH NORTH SULAWESI CEMENT	GT. 3.091	TK	Indonesia	Nakhoda : RIMIANTO Pemilik : PT. PELAYARAN SAMUDERA RIZQI	Nil	Nil	Tenggelam	Teknis	IKK. UPP Kelas III Labuan Uki
100	12 Oktober 2024, 15.00 LT Awak 6 Orang, PNP 16 Orang Kapal Tolak Labuan Bajo	<b>KM. MAHESWARI</b> 08.36.228 S / 119.44.739 E	GT. 109	KT	Indonesia	Nakhoda : ANCAHAR Pemilik : MUHAMMADIN	Nil	Nil	Terbakar	Teknis	IKK. KSOP Kelas II Labuan Bajo
101	18 Oktober 2024, 14.30 LT Muatan Batubara Kapal Tolak Jetty Suaran ke STS Muara Pantai	<b>TK. INTAN KELANA 23</b> 02.01.135 N / 117.48.040 E	GT. 3.141	TK	Indonesia	Nakhoda : - Pemilik : -	Nil	Nil	Tenggelam	Manusia	IKK. UPP Kelas II Tanjung Redeb
102	19 Oktober 2024 (Kejadian 12 Agustus) Kapal Muat Batu Bara Tolak Rangga Ilung ke Malili	<b>TB. KALTIM DOLPHIN 10-15</b> 05.08.373 S / 118.09.614 E Pulau Marasende Liukang	GT. 124	TB	Indonesia	Nakhoda : YULIUS TISON MADOI Pemilik : PT. PANCARAN SAMUDERA TRANSPORT	Nil	Nil	Kandas	Alam	IKK. UPP Kelas II Macini Baji

NO	TANGGAL WAKTU KECELAKAAN	NAMA KAPAL DAN LOKASI KEJADIAN	ISI KOTOR (TON)	JENIS KAPAL	BENDERA KAPAL	PEMILIK / AGEN	KORBAN KERUGIAN		JENIS KECELAKAAN	DUGAAN FAKTOR PENYEBAB	KETERANGAN
							JIWA	MUATAN			
	Awak Kapal 10 Orang Gandeng TK. KALTIM FT. 36.04										
103	23 Oktober 2024, 02.17 Muatan Nil Awak Kapal 4 Orang dengan 15 Pekerja Kapal Selat Beliah ke Belinyu	<b>KIP. TIMAH 17</b> 01.34.494 S / 105.40.891 E Laut Cupat Belinyu	GT. 548	KM	Indonesia	Nakhoda : SUBROTO Pemilik : PT. TIMAH	1 MD	Nil	Terbakar	Teknis	IKK. KSOP Kelas IV Pangkalbalam
104	25 Oktober 2024, 19.40 LT Muatan Pasir, Awak Kapal TB. Pen 1 Kapal Tolak Biringkasi ke Balikpapan	<b>TK. SOEKAWATI 2705</b> 01.25.541 S / 119.17.251 E Lariang	GT. 2.125	TK	Indonesia	Nakhoda : - Pemilik : PT. MAHAKARYA LINTAS SAMUDERA	Nil	Nil	Tenggelam	Alam	IKK. UPP Belang Belang
105	5 November 2024, 22.00 LT TB. DEWI CITRAWATI II Menubruk Jetty Conveyor milik PT. GARDA TUJUH BUANA	<b>BG. INTAN KELANA 26</b> 03.34.47 N / 117.47.208 E Perairan PT. Garda Tujuh Buana	GT. 3.241	TK	Indonesia	Nakhoda : DAVID HERMAWAN Pemilik : PT. IMC PELITA LOGISTIK	Nil	Nil	Tubrukan	Alam	IKK. UPP Kelas III Pulau Bunyu
106	17 November 2024, 08.30 Tolak Tarempa Tujuan Kijang 2005 KA No. 3291/L	<b>KM. INDAH FAJAR</b> Pelabuhan Sunda Kelapa	GT. 685	KM	Indonesia	Nakhoda : - Pemilik : PT. PELAYARAN TROPICJAYA PERKASA	Nil	Nil	Tenggelam	Teknis	WA Grup MCC Maritime Safety Information
107	22 November 2024, 15.35 LT YD3820 Awak Kapal 10 Orang	<b>TB. BINA MARINE 65</b> Area Labuh Pulau Kemarau	GT. 266	KM	Indonesia	Nakhoda : - Pemilik : PT. SUKSES WAHANA MARITIM	Nil	Nil	Terbakar	Teknis	Sip Reporting System Palembang VTS
108	2 Desember 2024, Muatan Nil, Tolak Bakauheni ke Bayah, Awak Kapal 16 Orang di Evakuasi oleh PLP Tanjung Priok	<b>MV. FELYA (EKS. GAYATRI)</b> Cibandawah, Hutan Nasional Taman Ujung Kulon	GT. 6.306	KM	Indonesia	Nakhoda : GUSTAF SUMOLANG Pemilik : PT. PELAYARAN ANUGRAH MAKMUR SEJAHTERA	Nil	Nil	Kandas	Teknis	IKK. UPP Kelas III Labuhan
109	4 Desember 2024, 18.00 kapal tolak kolaka ke Gresik Awak 18 Orang	<b>KM. SRIWJAYA MAKMUR</b> Perairan Barat Parak Bontomanai Selayar	GT. 2011	KM	Indonesia	Nakhoda : ARDIANSYAH Pemilik : PT. NIAGA SUKSES BERSAMA / PT. VIEN FADHILAH MUTIARA	Nil	Nil	Kandas	Alam	IKK. UPP Kelas III Selayar
110	5 Desember 2024, 10.30 Awak 10 Orang muatan Nil Tolak Taboneo ke Banjarmasin	<b>TB. BINA 208</b> 03.43.226 S / 114.25.305 E Perairan Taboneo	GT. 96	TB	Indonesia	Nakhoda : NIRMAWAN ANWAR Pemilik : PT. RIANDY FIESTA SAMUDERA	Nil	Nil	Tenggelam	Alam	IKK. KSOP Banjarmasin
111	5 Desember 2024, 13.10 LT Awak 10 Orang, Muatan Nihil Tolak Taboneo ke Banjarmasin	<b>TB. CARITA</b> 03.43.576 S / 114.24.756 E Perairan Taboneo	GT. 232	TB	Indonesia	Nakhoda : JAILANI Pemilik : PT. TERA LOGISTIK INDONESIA	Nil	Nil	Tenggelam	Teknis	IKK. KSOP Banjarmasin
112	7 Desember 2024 13.00 Awak Nil	<b>BG. KALTIM FT 3608</b> 06.86.723 S / 112.43.309 W	GT. 13.250	TK	Indonesia	Nakhoda : - Pemilik : -	Nil	Nil	Kandas	Teknis	WA Grup MCC Maritime Safety Information
113	7 Desember 2024, 16.12 LT Muatan Dump Truk 10 Unit Awak Kapal 8 Orang, Tolak Oma (Tulehu) ke Pel Induk Tulehu	<b>LCT. GOLDEN 7</b> 128.28.28 / 3.37.089	GT. 231	KM	Indonesia	Nakhoda : MARTHEN SOLISSA Pemilik : PT. CAHAYA SURYA PERDANA / PT. TASA SAMUDERA RAYA	Nil	Nil	Kandas	Alam	IKK. UPP Kelas II Tulehu
114	8 Desember 2024 Kapal Penumpang Tradisional 5 Awak Kapal, 61 Penumpang Kapal tolak Sapudi ke Kalbut di Selamatkan MT. Berlian Selatan	<b>KM. FAJAR LORENA SAFARI</b> Perairan Situbondo	GT. 54	KT	Indonesia	Nakhoda : RAMLI Pemilik : -	3 MD	Nil	Tenggelam	Teknis	IKK. KSOP Kelas IV Panarukan
115	9 Desember 2024, 21.30 LT Nakhoda Tidak ditemukan,	<b>KM. BAHTERA MEGA</b> 05.15.140 S / 114.50.952 E	GT. 4.393	KM	Indonesia	Nakhoda : TRI HERNANTO Pemilik : PT. MEGA LAJU	1 MD	Nil	Tenggelam	Alam	IKK. UPP Kelas III Masalembu

NO	TANGGAL WAKTU KECELAKAAN	NAMA KAPAL DAN LOKASI KEJADIAN	ISI KOTOR (TON)	JENIS KAPAL	BENDERA KAPAL	PEMILIK / AGEN	KORBAN KERUGIAN		JENIS KECELAKAAN	DUGAAN FAKTOR PENYEBAB	KETERANGAN
							JIWA	MUATAN			
		19 Mil Timur Pulau Keramaian				SUKSES					
116	12 Desember 2024, 05.23 Tongkang Tambat dan Tali Putus Kapal Hanyut lalu kandas, awak kapal 2 Orang TB. MARTHA GLORY	<b>BG. SENTANA MARINE</b> 07.01.41. S / 106.32.39 E	GT. 3.198	TK	Indonesia	Nakhoda : EDY ABDURAHMAN Pemilik : PT. ASIA MULIA TRANSPASIFIK PT. BLM	Nil	Nil	Kandas	Alam	IKK. UPP Kelas III Pelabuhan Ratu
117	13 Desember 2024, 19.38 menunggu informasi masuk ke Dermaga 7, lalu terseret arus Tubrukan dengan MT. GAS SOFIA 226 PNP awak 23	<b>KMP. TRIMAS FHADILA</b> Area labuh Jangkar Indahkiat	GT. 6.527	KM	Indonesia	Nakhoda : SYECHAN Pemilik : PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS	Nil	Nil	Tubrukan	Teknis	IKK. KSOP Kelas I Banten
118	14 Desember 2024, 20.45 Kapal mengalami kebocoran, awak 8 Orang, Pnp 165 Orang, tolok Patlian ke Tobelo	<b>KM. ALES MULIA</b> Perairan Desa Tagalaya	GT. 120	KT	Indonesia	Nakhoda : AFILUDIN Pemilik : PT. TUNAS MANGANITU LINES	2 MD	Nil	Tenggelam	Alam	IKK. UPP Kelas I Tobelo
119	19 Desember 2024, 05.30 WIB Kapal menangkap ikan ke laut tolak luwuk awak 15 Orang	<b>KMN. AFAN JAYA 01</b> 0.57.339 S / 122.55.832 E Desa Bung Luwuk	GT. 4	KT	Indonesia	Nakhoda : ZAKA HIDAYAH Pemilik : ZAKA HIDAYAH	Nil	Nil	Tenggelam	Alam	IKK. UPP Kelas II Luwuk
120	22 Desember 2024, 02.30 Kapal tolok Makassar ke Kupang, Awak 20 Orang, KM. Kuala Mas Menyenggol KM. MARITIM Khatulistiwa	<b>KM. KUALA MAS</b> Area Labuh Tenau Kupang	GT. 6.007	KM	Indonesia	Nakhoda : PATAHUDDIN Pemilik : PT. TEMAS	Nil	Nil	Tubrukan	Teknis	IKK. KSOP Kelas III Kupang
121	22 Desember 2024, 20.00 awak 5, PNP 14 kapal sedang proses pengelasan tanpa izin Syahbandar	<b>KM. MALUKU EXPLORER</b> 8.29.30 S / 119.51.29 E	GT. 256	KM	Indonesia	Nakhoda : EDO KUSWANTORO Pemilik : PT. INDO MITRA BAHARI	Nil	Nil	Tubrukan	Manusia	IKK. KSOP Kelas III Labuan Bajo
122	23 Desember 2024, 20.35 kapal muat biji besi dari Gunung Sitoli ke dermaga susoh, awak TB. DAYA 10	<b>TK. DBS 9</b> 03.43.429 N / 096.47.895 E Perairan Kuala Batu Susoh	GT. 2.017	TK	Indonesia	Nakhoda : Pemilik : PT. HAOXIANG SHIPPING INDONESIA	Nil	Nil	Kandas	Alam	IKK. UPP Kelas III Susoh
123	24 Desember 2024, 03.10 LT Kapal tradisional penumpang muatan Sembako, tolok Jailolo ke Soasio Tubrukan dengan SB. Buton Indah Awak 4, PNP 10	<b>PM. TUJUH PUTRI 22</b> 0.45.25 N / 127.28.31 E Perairan Tanjung Mafututu Tidore	GT. 18	KT	Indonesia	Nakhoda : ISMAIL FATAHA Pemilik : -	Nil	Nil	Tubrukan	Manusia	IKK. KSOP Kelas II Ternate
124	25 Desember 2024, 13.30 Kapal proses sandar ke dermaga sumber dari ruang kamar mesin	<b>KMP. MULIA NUSANTARA</b> Pelabuhan Telaga Punggur Batam	GT. 681	KM	Indonesia	Nakhoda : Pemilik : PT. PRIMA EXECUTIVE	Nil	Nil	Terbakar	Teknis	Lap. Kronologis WA Pangkalan Tg. Uban
125	27 Desember 2024, 23.59 LT MV. RIMBA EMPAT tujuan ke Malahayati MV. RIMBA EMPAT mengalami permasalahan mesin VS MT. PANCARAN KHATULISTIWA	<b>MV. RIMBA EMPAT</b> Area Labuh TELUK BAYUR	GT. 4.745	KM	Indonesia	Nakhoda : Pemilik : PT. RIMBA SEGARA LINE	Nil	Nil	Tubrukan	Teknis	BA. VTS Teluk Bayur
126	27 Desember 2024, 07.45 Kapal Muatan Batu Bara, Awak Kapal 10 Orang, tolok Banjarmasin ke Lombok, Kapal di Kandas TB. MITRA ANUGERAH 8	<b>BG. SAMUDERA JAYA 3001</b> Selatan Pulau Mamburit Kangean	GT. 3.551	TK	Indonesia	Nakhoda : MUSMULYADI Pemilik : PT. SINAR RIAU SAMUDERA JAYA	Nil	Nil	Kandas	Teknis	IKK. UPP Kelas III Sapeken
127	30 Desember 2024, 23.50 Kapal tolok Ketapang ke Gilimanuk truk box terbakar, kapal awak 14, 22KR4, 7SM, 42 PNP	<b>KMP. JAMBO VIII</b> 08.09.400 S / 114.25.900 E Rede Penyeberangan Gilimanuk	GT. 1.216	KM	Indonesia	Nakhoda : NASPUDIN Pemilik : PT. DUTA BAHARI MENARA LINE	Nil	Nil	Terbakar	Teknis	IKK. UPP Kelas II Gilimanuk
128	31 Desember 2024, 16.45	<b>KM. OCEAN PURE 1</b>	GT. 396	KT	Indonesia	Nakhoda : ISMAIL TATALI	Nil	Nil	Terbakar	Teknis	IKK. UPP Kelas II

NO	TANGGAL WAKTU KECELAKAAN	NAMA KAPAL DAN LOKASI KEJADIAN	ISI KOTOR (TON)	JENIS KAPAL	BENDERA KAPAL	PEMILIK / AGEN	KORBAN KERUGIAN		JENIS KECELAKAAN	DUGAAN FAKTOR PENYEBAB	KETERANGAN
							JIWA	MUATAN			
	kapal tolak sorong ke Pulau Pam Awak 17 PNP 12	00.20.961 S / 130.11.962 E				Pemilik : PT. OCEAN PURE CHARTER					Raja Ampat

**2024 HBS TTK KRM**



REKAP UPT KECELAKAAN KAPAL  
TAHUN 2024

NO	BULAN	UPT	PENYEBAB	REKAP			TOTAL
				ALAM	TEKNIS	MANUSIA	
				10	2	2	14
1	JANUARI	1	KSOP KELAS I SAMARINDA	ALAM	•		
		2	UPP KELAS II PEMENANG	TEKNIS		•	
		3	UPP KELAS II BENETE	ALAM	•		
		4	KSOP KELAS I TANJUNG BALAI KARIMUN	ALAM	•		
		5	KSOP UTAMA BELAWAN	MANUSIA			•
		6	UPP KELAS III WONRELI	ALAM	•		
		7	KSOP KELAS I TANJUNG BALAI KARIMUN	ALAM	•		
		8	KSOP KELAS II PEKANBARU	ALAM	•		
		9	KSOP UTAMA MAKASSAR	ALAM	•		
		10	KSOP KELAS I TANJUNG BALAI KARIMUN	ALAM	•		
		11	UPP KELAS III SAPEKEN	ALAM	•		
		12	KSOP KELAS I BITUNG	ALAM	•		
		13	KSOP KELAS I SAMARINDA	TEKNIS		•	
		14	KSOP KELAS I SAMARINDA	MANUSIA			•

NO	BULAN	UPT	PENYEBAB	REKAP			TOTAL
				ALAM	TEKNIS	MANUSIA	
				2	2	0	4
2	FEBRUARI	1	KSOP KHUSUS BATAM	ALAM	•		
		2	KSOP KELAS III LABUHAN BAJO	TEKNIS		•	
		3	KSOP KELAS I BITUNG	TEKNIS		•	
		4	KSOP UTAMA TANJUNG PERAK	ALAM	•		

NO	BULAN	UPT	PENYEBAB	REKAP			TOTAL
				ALAM	TEKNIS	MANUSIA	
				10	4	1	15
3	MARET	1	UPP KELAS II TANJUNG SELOR	ALAM	•		
		2	KSOP KELAS I PONTIANAK	ALAM	•		
		3	UPP KELAS III BAWEAN	ALAM	•		
		4	UPP KELAS III LABUHAN	ALAM	•		
		5	UPP KELAS III LABUHAN	TEKNIS		•	
		6	KSOP KELAS III KUPANG	ALAM	•		
		7	KSOP UTAMA TANJUNG PERAK	TEKNIS		•	
		8	UPP KELAS III PELABUHAN RATU	ALAM	•		
		9	KSOP KELAS I SORONG	ALAM	•		
		10	UPP KELAS II BENETE	ALAM	•		
		11	KSOP KELAS III SUNDA KELAPA	TEKNIS		•	
		12	KSOP KELAS IV PANGKALBALAM	TEKNIS		•	

	13	UPP KELAS II LUWUK	ALAM	•		
	14	UPP KELAS II TANJUNG BERINGIN	ALAM	•		
	15	KSOP KELAS II GRESIK	MANUSIA			•

NO	BULAN	UPT	PENYEBAB	REKAP			TOTAL
				ALAM	TEKNIS	MANUSIA	
				0	5	0	5
4	APRIL	1.	KSOP KELAS II MARUNDA	TEKNIS	•		
		2.	UPP KELAS II NUSA PENIDA	TEKNIS	•		
		3.	UPP KELAS I TANJUNG UBAN	TEKNIS	•		
		4.	KSOP KELAS III KUPANG	TEKNIS	•		
		5.	UPP KELAS III SAPEKEN	TEKNIS	•		

NO	BULAN	UPT	PENYEBAB	REKAP			TOTAL
				ALAM	TEKNIS	MANUSIA	
				3	1	0	4
5	MEI	1.	UPP KELAS I TOBELO	ALAM	•		
		2.	KSOP KELAS II KOTABARU	ALAM	•		
		3.	KSOP KELAS IV TEMBILAHAN	TEKNIS		•	
		4.	UPP KELAS II LAIWUI	ALAM	•		

NO	BULAN	UPT	PENYEBAB	REKAP			TOTAL
				ALAM	TEKNIS	MANUSIA	
				4	5	0	9
6	JUNI	1.	KSOP KELAS IV SELATPANJANG	ALAM	•		
		2.	UPP KELAS II SAUMLAKI	TEKNIS		•	
		3.	KSOP UTAMA MAKASSAR	TEKNIS		•	
		4.	UPP KELAS II BINTUNI	ALAM	•		
		5.	UPP KELAS II NUSA PENIDA	TEKNIS		•	
		6.	KSOP KELAS II TANJUNG BALAI KARIMUN	TEKNIS		•	
		7.	UPP KELAS III MASALEMBU	ALAM	•		
		8.	KSOP KELAS IV KUMAI	TEKNIS		•	
		9.	KSOP KELAS IV KEP. SERIBU	ALAM	•		

NO	BULAN	UPT	PENYEBAB	REKAP			TOTAL
				ALAM	TEKNIS	MANUSIA	
				4	5	0	9
7	JULI	1	KSOP KELAS III RANGGAILUNG	TEKNIS	•		
		2	KSOP KELAS I BALIKPAPAN	ALAM	•		
		3	KSOP KELAS IV PANGKALBALAM	TEKNIS		•	
		4	UPP KELAS II TUAL	TEKNIS		•	
		5	UPP KELAS II LUWUK	ALAM	•		
		6	UPP KELAS II BULI	ALAM	•		
		7	KSOP KELAS II TERNATE	TEKNIS		•	
		8	KSOP KELAS II PATIMBAN	ALAM	•		

9	KSOP KELAS I BALIKPAPAN	TEKNIS		•	
---	-------------------------	--------	--	---	--

NO	BULAN	UPT	PENYEBAB	REKAP			TOTAL
				ALAM	TEKNIS	MANUSIA	
				9	11	2	22
8	AGUSTUS	1	KSOP KELAS IV KUALA TUNGKAL	TEKNIS	•		
		2	KSOP KELAS IV KUMAI	TEKNIS	•		
		3	UPP KELAS III MASALEMBU	ALAM	•		
		4	KSOP KELAS I PONTIANAK	MANUSIA			•
		5	KSOP KELAS IV BAKAUHANI	TEKNIS		•	
		6	KSOP KELAS I BANJARMASIN	TEKNIS		•	
		7	KSOP KELAS IV KEPULAUAN SERIBU	TEKNIS		•	
		8	UPP KELAS II TAREMPA	ALAM	•		
		9	KSOP KELAS I AMBON	MANUSIA			•
		10	KSOP KELAS IV PADANGBAI	TEKNIS		•	
		11	KSOP KELAS III LABUHAN BAJO	ALAM	•		
		12	KSOP KELAS IV WAINGAPU	ALAM	•		
		13	UPP KELAS III INDRAMAYU	ALAM	•		
		14	KSOP KELAS I BITUNG	TEKNIS		•	
		15	KSOP KELAS I TANJUNG EMAS	TEKNIS		•	
		16	UPP KELAS III LABUHAN	ALAM	•		
		17	KSOP KELAS II PALEMBANG	TEKNIS		•	
		18	UPP KELAS III LABUHAN	ALAM	•		
		19	UPP KELAS II NAMLEA	TEKNIS		•	
		20	KSOP KELAS IV MUNTOK	ALAM	•		
		21	UPP KELAS II LUWUK	ALAM	•		
		22	KSOP KELAS III LABUHAN BAJO	TEKNIS		•	

NO	BULAN	UPT	PENYEBAB	REKAP			TOTAL
				ALAM	TEKNIS	MANUSIA	
				6	9	1	16
9	SEPTEMBER	1	KSOP KELAS IV MUNTOK	ALAM	•		
		2	KSOP KELAS IV SELAT PANJANG	TEKNIS		•	
		3	KSOP KELAS I PONTIANAK	TEKNIS		•	
		4	UPP KELAS III SAKETA	TEKNIS		•	
		5	UPP KELAS II MENGGALA	TEKNIS		•	
		6	UPP KELAS II SAUMLAKI	TEKNIS		•	
		7	KSOP KELAS II GRESIK	MANUSIA			•
		8	KSOP KELAS I BALIKPAPAN	ALAM	•		
		9	KSOP UTAMA TG. PERAK	TEKNIS		•	
		10	UPP KELAS II BRANTA	ALAM	•		
		11	UPP KELAS III LABUHAN	ALAM	•		
		12	KSOP KELAS IV BIMA	ALAM	•		
		13	KSOP KHUSUS BATAM	TEKNIS		•	
		14	KSOP KELAS IV ENDE	TEKNIS		•	
		15	KSOP KELAS II PALEMBANG	ALAM	•		
		16	UPP KELAS II LINAU BINTUHAN	TEKNIS		•	

NO	BULAN	UPT		PENYEBAB	REKAP			TOTAL
					ALAM	TEKNIS	MANUSIA	
					2	3	1	6
10	OKTOBER	1	UPP KELAS III LABUAN UKI	TEKNIS		•		
		2	KSOP KELAS II LABUAN BAJO	TEKNIS		•		
		3	UPP KELAS II TANJUNG REDEB	MANUSIA			•	
		4	UPP KELAS II MACINI BAJI	ALAM	•			
		5	KSOP KELAS IV PANGKALBALAM	TEKNIS		•		
		6	UPP KELAS III BELANG-BELANG	ALAM	•			

NO	BULAN	UPT		PENYEBAB	REKAP			TOTAL
					ALAM	TEKNIS	MANUSIA	
					1	2		3
11	NOVEMBER	1	UPP KELAS III PULAU BUNYU	ALAM	•			
		2	KSOP KELAS III SUNDA KELAPA	TEKNIS		•		
		3	KSOP KELAS I PALEMBANG	TEKNIS		•		

NO	BULAN	UPT		PENYEBAB	REKAP			TOTAL
					ALAM	TEKNIS	MANUSIA	
					8	11	2	21
12	DESEMBER	1	UPP KELAS III LABUHAN	TEKNIS		•		
		2	UPP KELAS III SELAYAR	ALAM	•			
		3	KSOP KELAS I BANJARMASIN	TEKNIS		•		
		4	KSOP KELAS I BANJARMASIN	TEKNIS		•		
		5	KSOP KELAS III TANJUNG PAKIS	ALAM	•			
		6	UPP KELAS II TULEHU	ALAM	•			
		7	KSOP KELAS IV PANARUKAN	TEKNIS		•		
		8	UPP KELAS III MSALEMBU	ALAM	•			
		9	UPP KELAS III PELABUHAN RATU	ALAM	•			
		10	KSOP KELAS I BANTEN	TEKNIS		•		
		11	UPP KELAS I TOBELO	ALAM	•			
		12	UPP KELAS II LUWUK	ALAM	•			
		13	KSOP KELAS III KUPANG	TEKNIS		•		
		14	KSOP KELAS III LABUAN BAJO	MANUSIA			•	
		15	UPP KELAS III SUSOH	ALAM	•			
		16	KSOP KELAS II TERNATE	MANUSIA			•	
		17	KSOP KHUSUS BATAM	TEKNIS		•		
		18	KSOP KELAS II TELUK BAYUR	TEKNIS		•		
		19	UPP KELAS III SAPEKEN	TEKNIS		•		
		20	UPP KELAS III GILIMANUK	TEKNIS		•		
		21	UPP KELAS II RAJA AMPAT	TEKNIS		•		

REKAPITULASI KECELAKAAN KAPAL  
TAHUN 2024

NO	DATA KECELAKAAN KAPAL	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
<b>A</b>	<b>JENIS KECELAKAAN</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>	<b>VIII</b>	<b>IX</b>	<b>X</b>	<b>XI</b>	<b>XII</b>	
1	KAPAL TENGGELAM	5	0	5	1	2	1	9	3	3	3	1	6	39
2	KAPAL TERBAKAR	0	1	2	2	1	1	0	4	4	2	1	3	21
3	KAPAL TUBRUKAN	3	1	2	0	0	6	2	2	4	0	1	5	26
4	KAPAL KANDAS	6	2	6	2	3	3	1	6	5	1	0	7	42
	<b>JUMLAH</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>128</b>
<b>B</b>	<b>KORBAN &amp; KERUGIAN</b>													
1	KORBAN JIWA ( Meninggal, Hilang )	4	0	1	0	0	0	1	2	0	1	0	6	15
2	KERUGIAN BARANG (ton) ( Kendaran, hewan )	4752	0	405	8,4	111	5	4336	0	17	0	0	0	9634,4
	<b>JUMLAH</b>													
<b>C</b>	<b>BENDERA KAPAL</b>													
1	BERBENDERA INDONESIA	13	4	15	3	6	9	10	15	16	6	3	21	121
2	BERBENDERA ASING	1	0	0	2	0	0	2	0	2	0	0	0	7
	<b>JUMLAH</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>128</b>
<b>D</b>	<b>UKURAN KAPAL</b>													
1	KAPAL GT < 7	1	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0	1	7
2	KAPAL GT 7 - 35	2	3	1	0	2	1	0	2	2	0	0	1	14
3	KAPAL GT 35 - 500	3	0	6	1	1	1	2	0	3	2	1	7	27
4	KAPAL GT > 500	8	1	8	4	2	8	8	13	10	4	2	12	80
	<b>JUMLAH</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>128</b>
<b>E</b>	<b>JENIS KAPAL</b>													
1	KAPAL MOTOR (KM)	5	1	6	2	2	6	7	8	8	1	2	10	58
2	MOTOR TANKER (MT)	3	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	8
3	KAPAL TRADISIONAL / KLM	3	2	4	1	2	2	2	2	1	1	0	5	25
4	KAPAL TUG BOAT (TB)	0	1	1	0	1	0	0	0	2	1	0	2	8
5	KAPAL TONGKANG (BARGE)	3	0	4	1	1	2	3	2	5	3	1	4	29
5	YACHTH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>128</b>
<b>F</b>	<b>DUGAAN FAKTOR PENYEBAB</b>													
1	MANUSIA	2	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	2	9
2	ALAM	10	2	10	0	3	5	5	7	6	2	1	8	59
3	TEKNIS	2	2	4	5	3	5	7	7	9	3	2	11	60
	<b>JUMLAH</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>128</b>